



LAPORAN AKTUALISASI

**MONITORING PEMENUHAN ANALISIS SUBSTANSI ATAS PERMINTAAN ALAT
KELENGKAPAN DEWAN (AKD) MENGGUNAKAN GOOGLE DATA STUDIO
SEBAGAI *INTERACTIVE DASHBOARD* PRODUK KAJIAN DI PUSAT ANALISIS
KEPARLEMENAN (STUDI KASUS: BIDANG EKONOMI, KEUANGAN,
INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN KOMISI IV)**

Disusun oleh:

Nama : Rahmat Sawalman
NIP : 199702242024041001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XII
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI**

**MONITORING PEMENUHAN ANALISIS SUBSTANSI ATAS PERMINTAAN ALAT
KELENGKAPAN DEWAN (AKD) MENGGUNAKAN GOOGLE DATA STUDIO
SEBAGAI *INTERACTIVE DASHBOARD* PRODUK KAJIAN DI PUSAT ANALISIS
KEPARLEMENAN (STUDI KASUS: BIDANG EKONOMI, KEUANGAN,
INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN KOMISI IV)**

Disusun oleh:

Nama : Rahmat Sawalman
NIP : 199702242024041001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama

Peserta Diklat



Rahmat Sawalman, S.Kel., M.Si.
199702242024041001

Mengetahui,
Coach



Emi Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 199403222020122001

Menyetujui,
Mentor



Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
NIP. 198003252009121001

KATA PENGANTAR

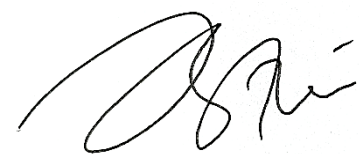
Puji syukur serta salam penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XII Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Rasa hormat penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama menyusun Laporan Aktualisasi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. selaku Kepala Pusat Analisis Keparlemenan yang mendukung penuh penulis untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XII.
2. Bapak Teddy Setiawan, S.T., M.T. selaku mentor yang telah memberikan waktu, pikiran, arahan, dan saran dalam meningkatkan kualitas aktualisasi ini.
3. Ibu Emi Rahmawati, S.H., M.H. selaku *coach* yang telah memberikan waktu, pikiran, arahan, dan saran dalam meningkatkan kualitas aktualisasi ini.
4. Para Widyaiswara Pusat Pengembangan Kompetensi Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah menjadi fasilitator dalam pendalaman dan penguatan setiap agenda mata pelatihan dasar CPNS.
5. Pusat Analisis Keparlemenan selaku unit kerja tempat di mana penulis beraktivitas dan melaksanakan kegiatan aktualisasi;
6. PNS Analis Legislatif dan CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI yang selalu memberi inspirasi dan dukungan di setiap kegiatan Pelatihan Dasar CPNS;
7. Seluruh keluarga dan sahabat yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam tulisan ini, sehingga saran dan kritik sangat diharapkan demi perbaikan aktualisasi ini.

Jakarta, 8 Oktober 2024

Penulis,



Rahmat Sawalman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN.....	6
A. Visi dan Misi Organisasi.....	6
B. Struktur Organisasi	7
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta	8
BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS.....	11
A. Identifikasi Isu	11
B. Penetapan Isu Prioritas	25
1. Teknik Tapisan Isu	25
2. Pemilihan Isu Prioritas	29
C. Analisis Isu	31
D. Gagasan Pemecahan Isu	32
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI	39
A. Matriks Rancangan Aktualisasi	39
B. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	50
BAB V	52
A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	52
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan	53
C. Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tugas/Fungsi/Tujuan Organisasi.....	77
D. <i>Stakeholders</i>	79
E. Capaian Kegiatan Aktualisasi	80

F. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	81
G. Analisis Dampak Kegiatan Aktualisasi	83
PENUTUP.....	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Identifikasi Isu di Pusat Analisis Keparlemenan.....	11
Tabel 3.2. Tangkapan Layar Produk Kajian di Pusaka (https://pusaka.dpr.go.id).....	17
Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Isu Prioritas dengan Metode USG (<i>Urgency, Seriousness, dan Growth</i>)	26
Tabel 3.4. Teknik Tapisan Isu dengan Metode USG.....	27
Tabel 3.5. Produk Kajian di Pusaka dalam Pelaksanaan Kegiatan Analisis Substansi	32
Tabel 3.6. Penugasan terkait Tema/Isu Penyusunan Analisis oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kepada Analisis Legislatif di Ekkuinbang Komisi IV	33
Tabel 4.1. Matriks Rancangan Aktualisasi.....	39
Tabel 4.2. Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	50
Tabel 5.1. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	52
Tabel 5.2. Hasil Evaluasi Penggunaan Google Data Studio sebagai <i>Interactive Dashboard</i> produk kajian di Komisi IV.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Setjen DPR RI.....	7
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Keahlian Setjen DPR RI.....	8
Gambar 3.1. Tangkapan Layar Fitur Instagram Pusaka sebagai Media Ekspose Produk Kajian.....	22
Gambar 3.2 <i>Fishbone Diagram</i> terkait Isu Belum Tersedianya Sistem Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka	31
Gambar 3.3 <i>Sample Prototype</i> Google Data Studio sebagai <i>Interactive Dashboard</i> Produk Kajian di Bidang Ekuinbang Komisi IV.....	35
Gambar 5.1 Koordinasi Rancangan Aktualisasi kepada Analisis Legislatif Bidang Ekuinbang Komisi IV	54
Gambar 5.2 Koordinasi dengan Mentor terkait Evaluasi Persiapan Penyusunan <i>Database</i> Produk Kajian	55
Gambar 5.3 Data Permintaan Analisis Substansi atas Permintaan AKD.....	57
Gambar 5.4 Data Isu Sepekan.....	57
Gambar 5.5 Data Info Singkat	58
Gambar 5.6 Data <i>Policy Brief</i>	58
Gambar 5.7 Koordinasi dengan Mentor terkait Evaluasi Penyusunan <i>Database</i> Produk Kajian.....	59
Gambar 5.8 Proses Integrasi Data dari Google Spreadsheet ke Google Data Studio.....	60
Gambar 5.9 Sumber Data Inventarisasi	60
Gambar 5.10 <i>Main Dashboard</i> Produk Kajian	62
Gambar 5.11 <i>Heat Table</i> Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan AKD.....	62
Gambar 5.12 <i>Dashboard</i> Isu Sepekan	63
Gambar 5.13 <i>Dashboard</i> Info Singkat.....	63
Gambar 5.14 <i>Dashboard Policy Brief</i>	64
Gambar 5.15 <i>Dashboard Parliamentary Review</i>	64
Gambar 5.16 <i>Dashboard</i> Jurnal Ilmiah.....	65
Gambar 5.17 <i>Dashboard</i> Buku	65
Gambar 5.18 <i>Dashboard</i> Laporan Hasil Penelitian	66
Gambar 5.19 Diseminasi Penggunaan Google Data Studio sebagai <i>Interactive Dashboard</i> Produk Kajian	68
Gambar 5.20 <i>Barcode</i> dan Tautan Akses ke Dashboard Produk Kajian Komisi IV	69
Gambar 5.21 Penambahan Menu <i>Main Dashboard</i> Produk Kajian Komisi IV	75
Gambar 5.22 Perbaikan kesalahan penulisan (<i>typo</i>).....	75
Gambar 5.23 Dokumentasi Pengerjaan Finalisasi Laporan Hasil	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembentukan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualitas dan integritas tinggi. Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN memainkan peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih, serta dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk itu, ASN harus dibentuk sebagai entitas yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Salah satu komponen vital dalam pengelolaan ASN adalah proses seleksi dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, CPNS diangkat melalui proses seleksi yang ketat dan diwajibkan menjalani masa percobaan selama satu tahun. Dalam masa percobaan ini, CPNS harus mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) yang bertujuan untuk membentuk pegawai yang siap menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Nomor: B/534/DL.02.01/5/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XI, XII, XIII Tahun 2024, bahwa Setjen DPR RI menyelenggarakan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dengan metode *blended learning*. Pelatihan ini memadukan metode klasikal dan metode *distance learning* (pembelajaran jarak jauh), yang secara keseluruhan dilakukan pada tanggal 24 Juni sampai 19 Oktober 2024. Kegiatan Latsar ini diharapkan menjadi wadah pembentukan karakter, kompetensi, dan pemahaman nilai-nilai dasar yang esensial bagi ASN. Nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) merupakan pondasi yang harus ditanamkan kepada setiap CPNS. Melalui Latsar, CPNS dibekali dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya nilai-nilai ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN.

Dalam rangkaian agenda Latsar CPNS, peserta tidak hanya dibekali dengan pemahaman teoretis mengenai nilai-nilai dasar ASN, tetapi juga diharapkan mampu mengaplikasikan

pengetahuan tersebut dalam bentuk kegiatan aktualisasi di unit kerja masing-masing. Kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu yang ada di unit kerja, serta merumuskan solusi yang inovatif dan implementatif. Dalam konteks ini, penulis berfokus pada analisis isu yang terjadi di unit kerja Pusat Analisis Keparlemenan Setjen DPR RI, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja dan pelayanan di lingkungan kerja tersebut.

Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) merupakan salah satu unit kerja Eselon II Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengkajian keparlemenan melalui analisis, asistensi, dan ekspose mengenai isu strategis dan isu aktual untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Dalam proses pelaksanaannya, perlu dilakukan manajemen tata kelola dan optimalisasi terhadap proses bisnis di unit kerja Pusaka sehingga *output* produk yang dihasilkan sebagai bentuk dukungan kepada parlemen lebih optimal. Dalam optimalisasi proses bisnis di unit kerja, peningkatan kompetensi literasi digital menjadi faktor utama yang perlu diaktualisasikan. Literasi digital dipandang sebagai sebuah konsep dan praktik yang tidak hanya menitikberatkan pada kecakapan dalam penguasaan teknologi, namun literasi digital juga menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital secara produktif. Pelatihan dan pengembangan keterampilan digital merupakan hal yang esensial dari manajemen ASN untuk menjaga agar setiap pegawai tetap kompeten dan produktif, terkhusus perannya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang anggota DPR RI. Rendahnya kompetensi literasi digital di lingkungan organisasi mengakibatkan munculnya berbagai isu dan akan berdampak pada menurunnya kualitas dalam proses bisnis produk kajian di Pusaka.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis akan melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan melakukan analisis isu di unit kerja Pusat Analisis Keparlemenan Setjen DPR RI, guna memberikan solusi yang konstruktif dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 4 dan 34 menegaskan tentang asas perilaku pelaku pelayanan publik yang sejalan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Pasal 10 terkait AAUPB yang sejalan dengan *core values* BerAKHLAK & Bab XI terkait pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan).

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Pasal 34 & 34A mengatur tentang pelaksanaan prajab bagi CPNS).
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional (Pasal 13 Permen PAN & RB jis. Pasal 14 Peraturan BKN 20/2019).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pasal 62 & 63 terkait masa percobaan CPNS) (Pasal 34 PP 11/2017 jis. Pasal 62 Permen PAN & RB 6/2024)
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

12. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen DPR RI) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal 328 terkait pelaksanaan fungsi Pusbangkom untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi).
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SKJ.13 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.
14. Surat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Nomor: B/534/DL.02.01/5/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XI, XII, XIII Tahun 2024.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari aktualisasi ini dibuat antara lain:

1. CPNS mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan;
2. CPNS mampu menerapkan nilai-nilai Manajemen ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan;
3. CPNS mampu menerapkan nilai-nilai SMART ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan; dan
4. CPNS mampu mengaktualisasikan nilai berpikir kritis dan kreatif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari pelaksanaan aktualisasi dibagi menjadi manfaat bagi peserta pelatihan dan manfaat bagi unit kerja sebagai berikut:

1. Peserta Pelatihan
 - a. Terinternalisasinya nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara;
 - b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk berpikir kritis dalam menganalisis permasalahan yang ada lingkungan kerja; dan
 - c. Terinternalisasinya nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK di lingkungan kerja.

- d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai manajemen ASN dan SMART ASN.
2. Unit Kerja Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka)
 - a. Mendukung visi dan misi serta budaya kerja di unit kerja Pusat Analisis Keparlemenan;
 - b. Menjadi bahan dalam melakukan bimbingan dan evaluasi terkait pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK, Manajemen ASN, dan SMART ASN; dan
 - c. Aktualisasi yang dilaksanakan dapat menjadi solusi dari masalah yang terjadi di unit kerja khususnya di Pusat Analisis Keparlemenan.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebagai unsur penunjang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian (Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024, visi dan misi Setjen DPR RI sebagai berikut:

Visi:

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang profesional dan modern dalam mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Misi:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Setjen DPR RI terdiri atas Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektorat Utama. Badan Keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal (Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Tugas Badan Keahlian adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPR RI. Dalam menunjang tugas dan fungsi tersebut, visi dan misi Badan Keahlian adalah:

Visi:

“Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, dan akuntabel”.

Misi:

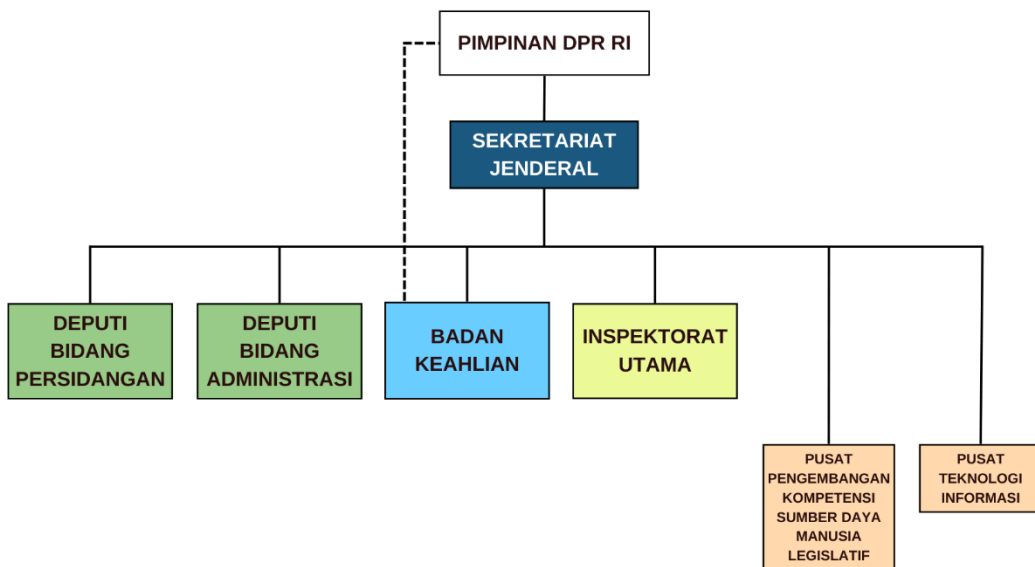
1. Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
2. Menyelenggarakan tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Keahlian dibantu oleh lima pusat, yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM; Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan; Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara; Pusat Analisis Keparlemenan; dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain:

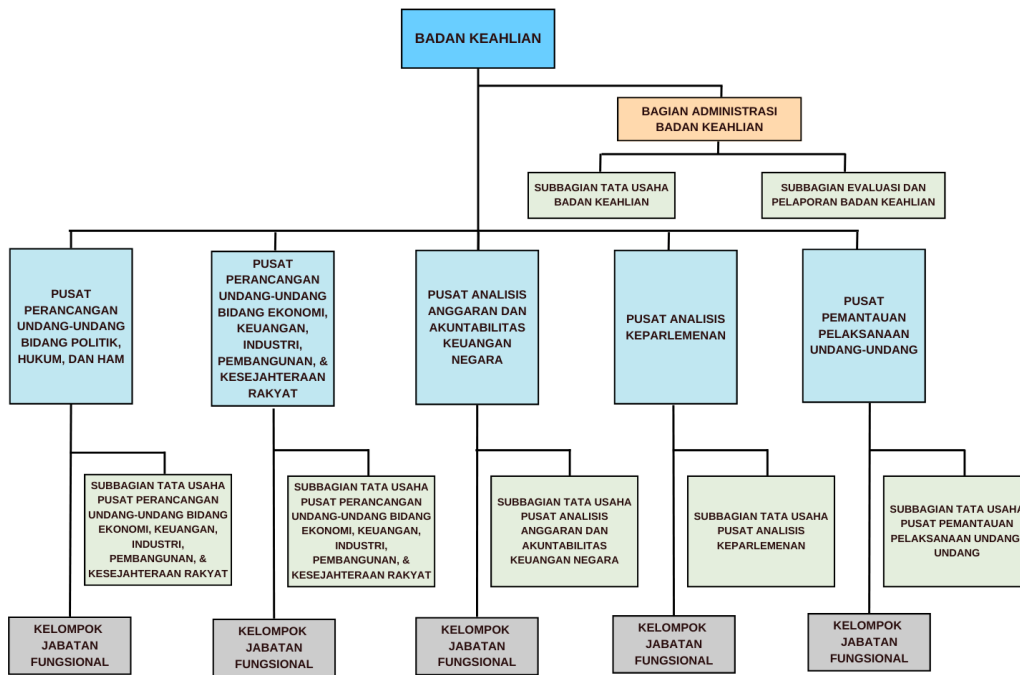
1. Menyelenggarakan dukungan keahlian yang prima guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPR RI.
2. Menjalankan tata kelola organisasi Pusaka yang profesional, baik, dan bersih.
3. Menyajikan hasil analisis, pendampingan, dan ekspose yang didukung data yang cepat, akurat, dan andal untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan DPR RI.

B. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian Setjen DPR RI:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Setjen DPR RI



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Keahlian Setjen DPR RI

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Sebagaimana Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Legislatif, bahwa *Tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif yaitu melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.*

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Legislatif dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (2) Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, sebagai berikut:

1. **Analisis** substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, meliputi:
 - a. Analisis substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
 - b. Analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang;
 - c. Analisis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
 - d. Analisis substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;

- e. Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dewan;
 - f. Analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;
 - g. Analisis substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual secara periodik yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; dan
 - h. Analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan.
2. **Asistensi** dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, meliputi:
- a. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi;
 - b. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran;
 - c. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;
 - d. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi; dan
 - e. Pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif terkait sistem lembaga legislatif yang aktual.
3. **Ekspose** hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, meliputi:
- a. Pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di alat kelengkapan dewan; dan
 - b. Pemaparan dan pembahasan hasil analisis yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di publik.

Adapun uraian kegiatan Analisis Legislatif Ahli Pertama diatur dalam ketentuan Pasal 8 Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif, meliputi:

- 1. Melakukan analisis deskriptif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
- 2. Melakukan analisis deskriptif substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif;
- 3. Melakukan analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
- 4. Melakukan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
- 5. Melakukan analisis deskriptif substansi isu strategis dan/atau aktual;
- 6. Mengumpulkan dan mengolah data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;

7. Melakukan analisis deskriptif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk ringkasan isu;
8. Menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan ringan;
9. Menelaah substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan;
10. Menelaah substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah;
11. Menelaah substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
12. Menelaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
13. Menelaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
14. Menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral;
15. Menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral;
16. Menelaah substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
17. Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
18. Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internal unit; dan
19. Memaparkan dan/atau membahas hasil analisis deskriptif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial.

BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

Isu-isu instansi/unit kerja merupakan isu kritical yang dipandang sebagai isu yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang perlu diselesaikan dengan adanya perbaikan manajemen tata kelola yang baik. Dalam memahami isu-isu unit kerja, perlu dilakukan identifikasi isu untuk selanjutnya dapat dianalisis sehingga merumuskan suatu rekomendasi atas permasalahan yang terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 3 (tiga) isu unit kerja yang perlu dianalisis guna optimalisasi manajemen tata kelola dan *output* produk di Pusaka, antara lain:

Tabel 3.1. Identifikasi Isu di Pusat Analisis Keparlemenan

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
1	Belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem monitoring dimaksud sangat terkait dengan tugas Analis Legislatif dalam hal analisis substansi, yaitu dapat memberikan akses ke data terkini dan historis untuk analisis mendalam. Serta, mendukung pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD dengan akses data secara <i>real-time</i>. (Pasal 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan memonitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD. - Tidak adanya pembaharuan <i>database</i> mengakibatkan keterbatasan dalam pengambilan keputusan. - Analisis terhadap isu menjadi terbatas dan tidak fleksibel. - Interpretasi terhadap data menjadi kurang efektif apabila tidak didukung oleh sistem monitoring. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan aksesibilitas melalui eksistensi sistem monitoring pemenuhan analisis substansi oleh AKD. - Kemudahan navigasi dan penelusuran produk di Pusaka yang memuat informasi diantaranya: <i>time series</i>, komisi, bidang, substansi/ruang lingkup, dan kuantitas produk. - Pengelolaan data lebih efisien melalui penyajian data produk secara <i>real-time</i>. 	<p>Manajemen ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem monitoring membantu Analis Legislatif untuk menjalankan tugas dengan lebih profesional. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan <i>real-time</i>, Analis Legislatif dapat membuat keputusan berdasarkan data dan meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas. - Sistem monitoring produk kajian dapat meningkatkan peran ASN di lingkup Pusaka sebagai Perencana

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
		<p>6 Permen PANRB No. 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk kajian yang di ekspose tidak dilengkapi dengan kategori substansi/ruang lingkup bidang di setiap komisinya. - Tidak adanya <i>database</i> terkait produk kajian yang telah diekspose. - Tidak adanya <i>dashboard</i> informasi yang memuat kuantitas produk yang di ekspose di setiap substansi/ruang lingkup bidang untuk masing-masing komisi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanpa sistem monitoring, penulis masih melakukan pencarian produk secara manual untuk dijadikan referensi tulisan selanjutnya, sehingga berdampak pada inefisiensi waktu dan tenaga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan elektabilitas pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD. - Memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap data produk kajian. 	<p>informasi yang komprehensif, Pelaksana dalam tugas menyediakan akses cepat terhadap data, dan Pengawas dalam hal transparansi dan akuntabilitas data kajian.</p> <p>SMART ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem monitoring merupakan wujud dari pemanfaatan literasi digital yang perlu dioptimalkan. Hal ini memungkinkan Analis Legislatif berkomunikasi dan berkolaborasi secara efisien melalui <i>platform</i> digital dengan AKD. - Literasi digital melalui penggunaan sistem monitoring merupakan kompetensi dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan teknologi digital (<i>digital skill</i>).
2	Belum optimalnya ekspose hasil produk kajian di Instagram Pusaka	<ul style="list-style-type: none"> - Instagram sebagai salah satu media ekspose hasil kajian yang dapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan dalam jangkauan dan visibilitas produk kajian kepada audiens sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jangkauan dan kredibilitas audiens dengan memastikan desain visual yang digunakan menarik, 	<p>Manajemen ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kompetensi melalui peningkatan keterampilan digital

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
		<p>membagikan informasi hasil analisis suatu produk kajian secara interaktif dan informatif kepada publik (Pasal 7 Ayat (2) huruf c Permen PANRB No. 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instagram Pusaka secara aktif mengunggah informasi mengenai ekspose hasil berupa produk isu sepekan dan info singkat, namun untuk produk kajian <i>policy brief</i> dan <i>parliamentary review</i> tidak diunggah. - Belum optimalnya visualisasi unggahan yang memperhatikan estetika unggahan. - Belum optimalnya penggunaan fitur lainnya seperti <i>highlights</i> dan <i>reels</i>. 	<p><i>engagement</i> kepada publik masih rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang interaktifnya visual unggahan Instagram tidak menarik minat audiens untuk membaca. - Kurangnya kreativitas dan penyajian informasi menimbulkan kesan monoton pada tampilan. 	<p>serta memaksimalkan penggunaan fitur seperti <i>highlight</i> dan <i>reels</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi ekspose produk kajian lainnya seperti <i>policy brief</i> dan <i>parliamentary review</i>. - Peningkatan kualitas penyampaian informasi melalui infografis yang informatif. - Interaksi yang lebih intens dengan audiens melalui fitur <i>Call-to-Action</i> (CTA) untuk mendorong audiens mengunjungi situs web Pusaka. - Peningkatan kredibilitas Pusaka dengan menampilkan keahlian yang di bidang analisis keparlemen dan membangun reputasi positif. - Monitoring dan evaluasi yang efektif melalui fitur analitik Instagram untuk memantau performa setiap unggahan. 	<p>Instagram untuk tujuan komunikasi dan publikasi produk kajian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja dan efektivitas melalui komunikasi yang lebih efektif melalui ekspose produk kajian secara luas dan efektif, serta beradaptasi dengan tuntutan komunikasi modern. - Peningkatan kompetensi manajerial dalam mengelola Instagram sebagai media ekspose. <p>SMART ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Literasi digital melalui Instagram menjadi unsur penting dalam ekspose produk kajian ke publik khususnya memberikan <i>supporting</i> kepada AKD. - Optimalisasi ekspose produk kajian melalui Instagram Pusaka menjadi bagian dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan teknologi digital (<i>digital skill</i>), dan

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
					kompetensi dalam merasionalkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (<i>netiquette</i>) dalam sebuah unit kerja (<i>digital ethics</i>).
3	Belum optimalnya penggunaan <i>software</i> analisis statistik di Pusaka	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi penggunaan <i>software</i> analisis statistik merupakan tugas Analis Legislatif pada kegiatan analisis substansi yang mampu membantu dalam menginterpretasikan data secara <i>reliable</i> (Pasal 7 Ayat (2) huruf a Permen PANRB No. 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif). - Metode analisis yang digunakan di setiap artikel produk Pusaka hanya terbatas secara kualitatif melalui studi literatur dan wawancara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya <i>tools</i> atau jenis uji statistik yang digunakan dalam analisis data sehingga dapat berdampak pada hasil yang kurang <i>reliable</i>. - Kurangnya kepekaan individu dan/atau lingkungan untuk terus meningkatkan pengetahuan dalam hal teknologi berbasis <i>software</i> analisis statistik. - Kesulitan melakukan efisiensi proses bisnis di lingkungan kerja, dan kegagalan dalam mengidentifikasi risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efisiensi waktu pengerjaan hasil analisis melalui penggunaan <i>software</i> statistik. - Akurasi dan keandalan data yang lebih komprehensif dan akurat terkhusus pada analisis data dengan model prediktif. - Visualisasi data yang lebih modern sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan informasi kompleks menjadi sederhana. - Peningkatan kemampuan analisis melalui <i>tools</i> uji statistik yang beragam seperti analisis regresi, analisis multivariat, dan analisis spasial. - Pengambilan keputusan yang lebih akurat melalui 	<p>Manajemen ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kompetensi berkelanjutan melalui optimalisasi <i>software</i> analisis statistik dalam menganalisa kompleksitas data. - Kompetensi dalam penggunaan <i>software</i> analisis statistik harus dimiliki oleh Analis Legislatif sehingga data kajian yang dihasilkan akan lebih <i>reliable</i>. Integrasi tugas dan fungsi Analis Legislatif dengan pengembangan kompetensi fungsional menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan (Pasal 215 PP N0. 11/201 tentang Manajemen PNS). <p>SMART ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan literasi digital dalam mengoperasikan

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
		<ul style="list-style-type: none"> - Analisis data kuantitatif hanya terbatas pada penggunaan Microsoft Excel dan SPSS, sehingga hasil kajian di Pusaka sejauh ini tidak bervariasi dalam hal metode analisis. - Kurang optimalnya penggunaan aplikasi analisis statistik yang tidak hanya terbatas pada <i>tools</i> analisis tetapi juga yang dilengkapi dengan interpretasi data secara visual. 		<p>visualisasi yang lebih jelas dan waktu pengerjaan yang lebih cepat.</p>	<p><i>software</i> analisis statistik bagi Analisis Legislatif berperan dalam menganalisis isu dengan output pada pengambilan keputusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASN yang terampil secara digital dapat mengeksplorasi berbagai fitur lanjutan dari <i>software</i> analisis statistik, seperti regresi, analisis varians, atau model prediktif, untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan akurat. - Optimalisasi penggunaan <i>software</i> analisis statistik bagi Analisis Legislatif merupakan kompetensi <i>digital skill</i>.

1. Belum tersedianya *Interactive Dashboard* produk kajian di Pusaka

Pemanfaatan literasi digital perlu dioptimalkan di unit kerja PUSAKA untuk keperluan pengumpulan data dari berbagai sumber, menganalisis informasi, dan menyajikan hasil dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anggota DPR RI. Literasi digital memungkinkan Analisis Legislatif di PUSAKA untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efisien melalui *platform* digital. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait analisis dan asistensi, unit kerja PUSAKA dapat menggunakan *digital tools* untuk memonitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).






Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) Setjen DPR RI melingkupi 3 (tiga) bidang diantaranya Bidang Politik, Hukum, dan HAM; Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan; dan Bidang Kesejahteraan Rakyat. Masing-masing bidang substansi tersebut bertanggungjawab terhadap Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebagaimana ketentuan Pasal 6 Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif, "*Tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yaitu melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif*". Pengembangan sistem monitoring produk kajian sangat terkait dengan tugas Analisis Legislatif dalam hal analisis substansi, yaitu dapat memberikan akses ke data terkini dan historis untuk analisis lebih mendalam, guna mendukung pemenuhan **analisis substansi** atas permintaan AKD dengan akses data secara *real-time*. Pengembangan sistem monitoring dimaksud mampu mendukung efisiensi evaluasi dan monitoring hasil kajian yang dihasilkan oleh Pusaka sebagaimana dipertegas dalam ketentuan Pasal 299 huruf e Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen DPR RI, bahwa "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Pusat Analisis Keparlemenan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dukungan evaluasi hasil analisis keparlemenan*".

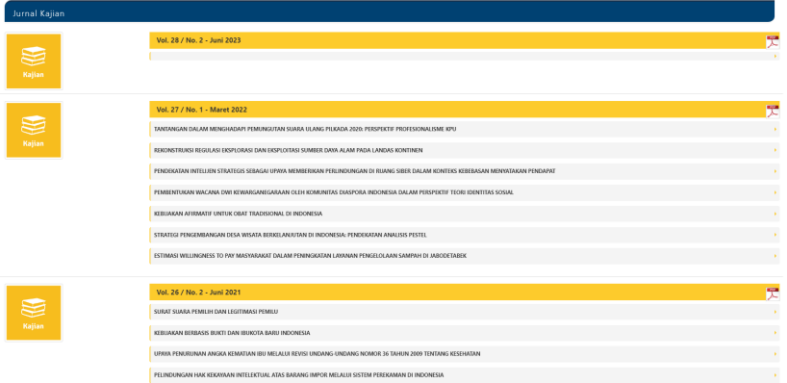
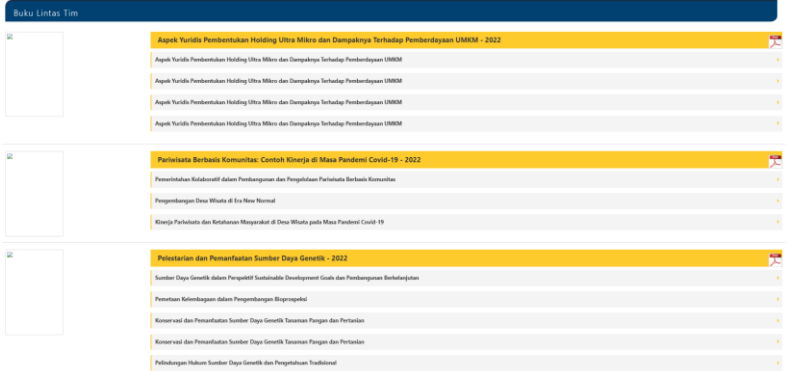

Mengingat tugas pokok Pusaka yaitu melaksanakan pengkajian keparlemenan melalui analisis, asistensi, dan ekspose mengenai isu strategis dan aktual, output hasil analisis dituangkan dalam produk antara lain isu sepekan, info singkat, *policy brief*, dan *parliamentary review*, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian. Adapun kondisi eksisting terkait produk-produk kajian di Pusaka, antara lain:

- a. Tidak adanya *database* terkait produk kajian yang telah diekspose sehingga menyulitkan dalam proses *searching* isu dari produk yang telah diterbitkan sebelumnya.

- b. Produk kajian yang diekspose tidak dilengkapi dengan kategori substansi/ruang lingkup bidang di setiap komisinya, sehingga menyulitkan dalam monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD.
- c. Tidak adanya *dashboard* informasi yang memuat kuantitas produk yang di ekspose di setiap substansi/ruang lingkup bidang untuk masing-masing komisi.

Tabel 3.2. Tangkapan Layar Produk Kajian di Pusaka (<https://pusaka.dpr.go.id>)

No.	Produk	Bukti Pendukung
1	Isu Sepekan	<p style="text-align: center;">ISU SEPEKAN</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Rencana Pembentukan Angkatan Siber TNI Aulia Fitri, S.I.P., M.Si. (Han)</p> <p>Konsekuensi Pemberhentian Ketua KPU RI RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.</p> <p>Upaya Polri dalam Memberantas Peredaran Narkoba Puteri Hikmawati, S.H., M.H. Yustina Sari, S.H., M.H.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Konservasi Mangrove: Perlunya Inovasi dan Kolaborasi Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si. Megatrikania Kendali, S.T., M.Si</p> <p>Problematika Keterbatasan Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Mandala Harefa, S.E., M.Si. Brigita Diaz Primadita, S.Si., M.T.</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">Selengkapnya</p>
2	Info Singkat	<p style="text-align: center;">INFO SINGKAT</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> Rencana Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024 RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.</p> <p> Tantangan Demokrasi dalam Pemilihan Calon Tunggal pada Pilkada 2024 ARYO WASISTO, M.Si.</p> <p> Masa Depan Industri Tekstil Indonesia Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> Mekanisme Pendanaan Debt For Nature Swap untuk Mendukung Pelestarian Alam Indonesia Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.</p> <p> Kolaborasi Global dalam Penanganan Hepatitis: Posisi dan Peran Indonesia Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">Selengkapnya</p>
3	<i>Policy Brief</i>	<p style="text-align: center;">POLICY BRIEF</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Pelindungan Konsumen Pengguna QRIS Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.</p> <p>Pengelolaan Sampah Plastik melalui Pendekatan Ekonomi Sirkular Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.</p> <p>Tantangan dan Upaya Mencapai Target Tax Ratio Indonesia Tahun 2025 Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.</p> </div> <div style="width: 45%;"></div> </div> <p style="text-align: right;">Selengkapnya</p>
4	<i>Parliamentary Review</i>	<p style="text-align: center;">PARLIAMENTARY REVIEW</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Angkutan Umum dalam Kecelakaan Lalu Lintas Puteri Hikmawati, S.H., M.H.</p> <p>Peningkatan Digitalisasi Administrasi Pemerintah Daerah Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.</p> <p>Keterwakilan 30 Persen Perempuan dalam Pemilu 2024 Sali Susiana, S.Sos, M.Si.</p> <p>Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia serta Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Drs. Julii Panglima Saragih, M.M. Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E. T. Ade Surya, S.T., M.M.</p> <p>Menuju Pendapatan Per Kapita Tinggi Era Indonesia Emas 2045 Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E., M.S.E. Dr. Rasbin, S.TP, M.S.E. Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.</p> </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>

5	Jurnal	
6	Buku	
7	Laporan Hasil Kajian	

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari isu mengenai belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka, antara lain:

a. Keterbatasan dalam Pengambilan Keputusan

- 1) Ketiadaan *database*: Tidak adanya keterbaruan *database* terkait kategori substansi produk di Pusaka sehingga menyulitkan dalam hal monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) secara *real-time*.
- 2) Data tidak terintegrasi: Tanpa sistem monitoring, data dari berbagai sumber sering kali tidak terintegrasi dengan baik. Hal tersebut menyulitkan pengambilan

keputusan karena pencarian informasi substansi yang diperlukan masih dilakukan secara manual.

3) Lambatnya akses informasi: Tanpa sistem monitoring, pengambilan keputusan dapat terhambat karena proses pencarian dan penggabungan data memakan waktu.

b. Tidak Efisiensinya Waktu dan Tenaga dalam Penulisan

1) Proses *Searching* Produk yang Manual: Tanpa sistem monitoring, penulis masih melakukan pencarian produk secara manual untuk dijadikan referensi tulisan selanjutnya, sehingga berdampak pada inefisiensi waktu dan tenaga.

2) Kurangnya Kemudahan dalam Berbagi Informasi: Sistem monitoring mempermudah berbagi produk Pusaka untuk dapat ditelusuri. Hal ini akan memudahkan penyelesaian pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD yang sifatnya insidental.

Dengan dikembangkannya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD di Pusaka, berbagai kondisi dan manfaat diharapkan dapat tercapai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam unit kerja. Adapun kondisi yang diharapkan tersebut, antara lain:

a. Peningkatan Aksesibilitas Informasi: Sistem monitoring sebagai *platform* terpusat yang memungkinkan Analis Legislatif dapat mengakses seluruh produk kajian dengan mudah. Pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang relevan berdasarkan kategori substansi atau ruang lingkup produk, tanpa perlu mencari secara manual atau mengakses dokumen secara terpisah.

b. Kemudahan Navigasi dan Penelusuran: Dengan sistem monitoring berbasis digital, pengguna dapat menggunakan fitur pencarian dan filter untuk menavigasi informasi dengan lebih cepat. Misalnya, pengguna dapat mencari produk kajian berdasarkan *time series*, komisi, jenis kajian, dan ruang lingkup bidang, yang memudahkan proses menemukan informasi yang diperlukan dengan cepat.

c. Visualisasi Data yang Lebih Baik: Kemudahan dalam menganalisis data secara lebih komprehensif dan membuat keputusan yang lebih informatif dari visualisasi data seperti grafik dan *chart* yang memudahkan pengguna dalam memahami tren, distribusi, dan hubungan antar informasi.

d. Pengelolaan Data yang Lebih Efisien: Dengan adanya *database* yang terintegrasi, pengelolaan data menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Sistem monitoring dapat

secara otomatis memperbarui data berdasarkan input terbaru, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan informasi yang ditampilkan *real-time*.

- e. Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi: Dapat memudahkan unit kerja Pusaka dalam memonitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD baik secara tahunan maupun insidental.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: Memungkinkan pencatatan dan pelacakan penggunaan data, memberikan transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas data.

Secara keseluruhan, penerapan sistem monitoring di Pusaka diharapkan dapat menjawab masalah kurangnya *database* yang terintegrasi dan mengoptimalkan monitoring pelaksanaan pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD. Hal tersebut akan memberikan manfaat signifikan dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas informasi yang tersedia untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Analisis Legislatif.

Digitalisasi Manajemen ASN merupakan proses dari Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “*Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi*”. Pembelajaran dimaksud adalah yang terintegrasi sebagai sebuah pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN untuk tetap terintegrasi dengan pekerjaan. Kemudian, juga dijelaskan dalam Pasal 203 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, yang berbunyi “*Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan*”. Dengan demikian, inovasi sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD di Pusaka dapat mendukung integrasi dimaksud dengan menyediakan *platform* dimana proses pembelajaran dan pekerjaan dapat berjalan bersamaan, serta mendukung dalam pengembangan kompetensi PNS.

Pengembangan sistem monitoring dimaksud tentunya sangat terkait dengan Kedudukan dan Peran ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya di Pusaka. Sebagaimana pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “*Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara*”. Serta, pada Pasal 12 berbunyi “*Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum*

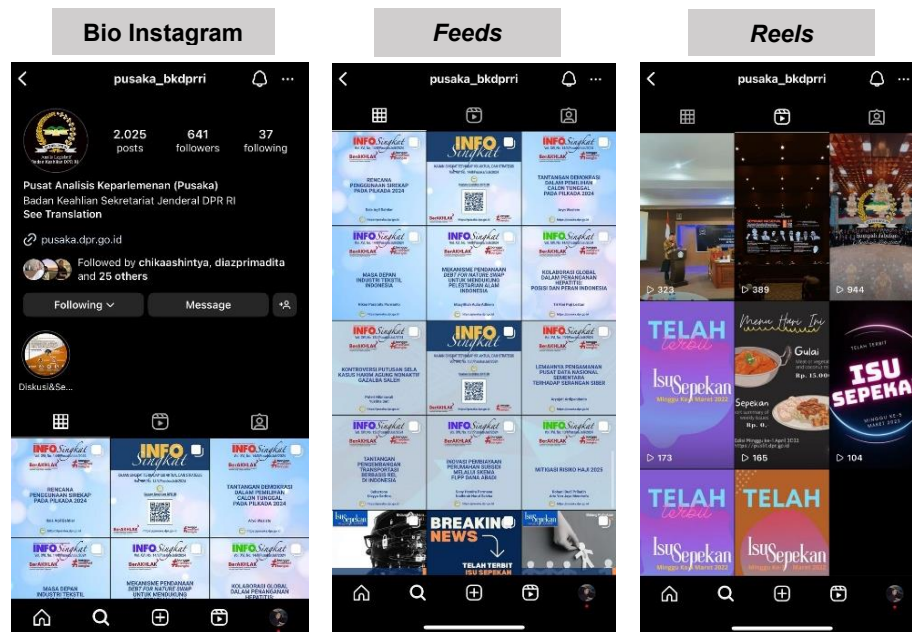
pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme". Dalam hal kedudukan Pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan negara haruslah profesional dan efisien. Sistem monitoring dimaksud membantu pegawai ASN di Pusaka untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan *real-time*, penggunaan sistem monitoring memastikan bahwa pegawai dapat membuat keputusan yang berdasarkan data yang tepat, meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas sebagai unsur aparatur negara. Dalam hal kaitannya dengan Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas, sebagai berikut:

- a. Sebagai Perencana: Sistem monitoring secara digital menyediakan informasi yang komprehensif tentang produk kajian khususnya ruang lingkup bidang yang dikaji sehingga dalam melakukan perencanaan dalam pengkajian isu selanjutnya, isu yang telah dikaji sebelumnya dalam produk Pusaka dapat dijadikan referensi.
- b. Sebagai Pelaksana: Sistem monitoring digital berupa media digital mendukung pelaksanaan tugas dengan menyediakan akses cepat ke data yang diperlukan dan dilengkapi dengan visualisasi data produk kajian. Fitur-fitur seperti filter dan visualisasi data dapat membantu dalam memonitoring pelaksanaan pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD.
- c. Sebagai Pengawas: Sistem monitoring meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan data yang jelas dan terstruktur serta memungkinkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kualitas dan relevansi produk kajian atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

2. Belum optimalnya ekspose hasil produk kajian di Instagram Pusaka

Instagram menjadi sala satu *platform* utama bagi pemerintah untuk memberikan layanan informasi pemerintahan, mengingat Instagram sebagai salah satu media sosial yang paling banyak digunakan dalam masyarakat dan jumlah penggunanya terus meningkat. Literasi digital melalui Instagram menjadi unsur penting dalam suatu organisasi pemerintahan, terutama dalam hal publikasi artikel ilmiah guna menyebarluaskan informasi. Dalam konteks manajemen ASN, hal tersebut termasuk keterampilan dalam menggunakan platform digital sebagai media komunikasi, pengelolaan data, dan penyampaian informasi. Dengan menggunakan Instagram secara efektif, ASN dapat meningkatkan transparansi tentang hasil kajian dan program-

program yang sedang dijalankan pemerintah. Hal ini membuat informasi lebih mudah diakses oleh publik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.



Gambar 3.1. Tangkapan Layar Fitur Instagram Pusaka sebagai Media Ekspose Produk Kajian

Penggunaan Instagram di Pusaka sebagai salah satu media ekspose hasil kajian keparlemenan dengan *username* @pusaka_bkdprri. Instagram Pusaka memuat informasi mengenai ekspose hasil berupa produk diantaranya isu sepekan dan info singkat. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekspose hasil di Instagram tidak hanya terkait dengan substansi topik kajian tetapi perlu memperhatikan estetika *layout* di Instagram *Feeds*. Visualisasi unggahan yang memperhatikan estetika tampilan akan menarik minat pengguna Instagram untuk membaca substansi kajian yang diunggah. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan fitur lainnya seperti *highlight* dan *reels*. Hal lainnya yaitu ekspose produk kajian yang diunggah hanya terbatas isu sepekan dan info singkat, sedangkan produk periodik lainnya seperti *policy brief* dan *parliamentary review* tidak dioptimalkan untuk diunggah. Oleh karena itu, Pusaka perlu melakukan optimalisasi ekspose hasil produk kajian di Instagram mengingat sejauh ini unggahan hasil kajian di Instagram Pusaka masih kurang optimal.

Optimalisasi penggunaan Instagram sebagai media ekspose produk kajian di Pusaka diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam hal jangkauan audiens maupun kualitas penyampaian informasi. Adapun kondisi yang diharapkan dalam optimalisasi penggunaan Instagram di Pusaka, sebagai berikut:

- a. Peningkatan Jangkauan dan Kredibilitas Audiens: Memastikan setiap unggahan memiliki desain visual yang menarik, serta memaksimalkan penggunaan fitur seperti *highlight* dan *reels*. *Highlight* dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelompokkan kajian berdasarkan topik, sementara *Reels* dapat memperkenalkan ringkasan kajian dalam format video singkat yang lebih mudah dicerna.
- b. Peningkatan Kualitas Penyampaian Informasi: Menggunakan infografis yang jelas dan informatif dapat membantu menjelaskan topik kajian dengan lebih efektif dan memudahkan audiens dalam memahami inti dari hasil kajian.
- c. Interaksi yang Lebih Intens dengan Audiens: Mengintegrasikan CTA dalam setiap postingan untuk mendorong audiens melakukan tindakan tertentu, seperti mengunjungi situs web Pusaka, mengunduh kajian lengkap, atau mengikuti akun Instagram Pusaka.
- d. Peningkatan Kredibilitas: Memperlihatkan hasil kajian yang mendalam dan terperinci melalui Instagram dapat menegaskan posisi Pusaka sebagai sumber informasi yang terpercaya dalam bidang analisis keparlemenan dan membangun reputasi positif.
- e. Monitoring dan Evaluasi yang Efektif: Memanfaatkan fitur analitik Instagram untuk memantau performa setiap unggahan, mengetahui audiens yang paling aktif, dan mengukur dampak dari berbagai jenis konten.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menekankan pentingnya pengembangan kompetensi Pegawai ASN melalui pembelajaran terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Dalam konteks ini, optimalisasi Instagram sebagai media ekspose produk kajian berkontribusi pada pengembangan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan melalui peningkatan keterampilan digital khususnya Instagram untuk tujuan komunikasi dan publikasi produk kajian. Keterampilan ini mencakup desain grafis, pengelolaan konten, dan penggunaan fitur-fitur Instagram seperti *Stories*, *Highlights*, dan *Reels*. Selanjutnya, integrasi pembelajaran dengan pekerjaan melalui pengelolaan praktis yang mana pegawai di Pusaka tidak hanya memperdalam pengetahuan substansi saja tetapi juga mampu menerapkan informasi/ekspose hasil kajian melalui Instagram. Aspek yang relevan lainnya yaitu peningkatan kinerja dan efektivitas melalui komunikasi yang lebih efektif melalui ekspose produk kajian secara luas dan efektif, serta beradaptasi dengan tuntutan komunikasi modern. Peningkatan profesionalisme dan kepemimpinan juga menjadi aspek yang membantu dalam merumuskan solusi kreatif untuk

menjawab tantangan dalam publikasi produk kajian di media sosial, serta peningkatan kompetensi manajerial dalam mengelola Instagram sebagai media ekspose.

3. Belum optimalnya penggunaan *software* analisis statistik di Pusaka

Keterampilan literasi digital mencakup pemahaman dasar tentang penggunaan perangkat lunak dan teknologi. ASN yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu mengoperasikan *software* analisis statistik dengan efisien. *Software* analisis statistik bagi institusi pemerintahan khususnya instansi/unit kerja yang membidangi pengkajian dan penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam menganalisis isu dengan output pada pengambilan keputusan. ASN yang terampil secara digital dapat mengeksplorasi berbagai fitur lanjutan dari *software* analisis statistik, seperti regresi, analisis varians, atau model prediktif, untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan akurat.

Hadirnya *software* analisis statistik di Pusaka dapat membantu dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi yang terkait pengkajian keparlemen yang meliputi analisis, asistensi, dan ekspose mengenai isu strategis dan aktual. Output hasil analisis dituangkan dalam produk PUSAKA antara lain isu sepekan, info singkat, *policy brief*, dan *parliamentary review*. Tujuan penggunaan *software* analisis statistik lainnya yaitu mengefisienkan waktu dalam membuat hasil analisa, dapat menganalisis data dimana pun berada, dan memberikan solusi bagi pemangku kepentingan, serta hasil kajian lebih akurat dan *reliable*. Berdasarkan informasi yang diperoleh, analisis statistik yang biasa digunakan oleh peneliti di PUSAKA hanya terbatas secara deskriptif dari hasil studi literatur dan beberapa diantaranya hanya menggunakan aplikasi dasar statistik seperti Microsoft Office Excel dan SPSS. Bagaimanapun, kebutuhan akan aplikasi analisis statistik sangat dibutuhkan yang mana tidak hanya terbatas pada proses atau *tools* analisis yang digunakan tetapi juga dapat merepresentasikan *output* hasil secara visual seperti grafik atau diagram 2 dimensi.

Dengan mengoptimalkan penggunaan *software* analisis statistik di Pusat Analisis Keparlemen (Pusaka), diharapkan dapat tercapai beberapa kondisi yang mendukung efektivitas dan kualitas hasil analisis kajian. Adapun kondisi yang diharapkan dengan dioptimalkannya penggunaan *software* dimaksud, sebagai berikut:

- a. Peningkatan Efisiensi Waktu: Penggunaan *software* analisis statistik yang lebih canggih akan mempercepat proses pembuatan hasil analisis. *Software* ini mampu mengolah data dalam jumlah besar dan kompleks dengan cepat, mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses data dibandingkan dengan metode manual atau aplikasi dasar seperti Microsoft Office Excel. Dengan demikian, peneliti dapat menyelesaikan analisis lebih

cepat, memungkinkan mereka untuk menangani lebih banyak kajian dalam waktu yang sama.

- b. Akurasi dan Keandalan Data: *Software* analisis statistik yang lebih kompleks biasanya menyediakan berbagai metode analisis yang lebih komprehensif dan akurat. Hal tersebut termasuk teknik statistik lanjutan dan model prediktif yang dapat meningkatkan keandalan hasil kajian. Dengan demikian, produk akhir yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih dapat dipercaya.
- c. Visualisasi Data yang Lebih Modern: Grafik dan diagram dua dimensi yang dihasilkan dapat membantu menyajikan hasil kajian dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik. Visualisasi ini memudahkan peneliti dalam memahami informasi kompleks dengan cepat, sehingga keputusan berbasis data dapat diambil dengan lebih efektif.
- d. Peningkatan Kemampuan Analisis: Pusaka dapat menerapkan berbagai teknik analisis yang lebih kompleks seperti analisis regresi, analisis multivariat, dan analisis spasial. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif dari data yang dikumpulkan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang sedang dianalisis.
- e. Pengambilan Keputusan yang Lebih Akurat: Melalui visualisasi yang lebih jelas dan waktu pengerjaan yang lebih cepat dapat mendukung kinerja dan keputusan AKD dengan lebih baik.

Optimalisasi penggunaan *software* analisis statistik di Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) sangat relevan dengan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Keterkaitannya dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama, diantaranya pengembangan kompetensi berkelanjutan melalui optimalisasi *software* analisis statistik dalam menganalisa data yang kompleks sebagaimana tuntutan organisasi yang semakin dinamis dan berbasis data. Selain itu, peningkatan kualitas produk kajian melalui penggunaan *software* yang lebih andal dapat menghasilkan kajian yang lebih akurat dan relevan. Serta, integrasi pembelajaran dan pekerjaan yang tidak terpisahkan sehingga apa yang menjadi tujuan dari unit kerja dapat tercapai.

B. Penetapan Isu Prioritas

1. Teknik Tapisan Isu

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di PUSAKA, perlu dilakukan analisis untuk menentukan isu yang prioritas harus segera diselesaikan. Dalam analisis isu instansi/unit kerja, dapat digunakan metode USG yang terdiri dari *Urgency*, *Seriousness*, *Growth*

(Lembaga Administrasi Negara RI, 2008; Salem et al., 2021). Metode USG adalah teknik yang digunakan untuk menapis isu dan menentukan prioritas isu mana yang perlu diselesaikan. *Urgency* menentukan seberapa mendesak isu untuk dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. *Seriousness* menentukan seberapa serius suatu isu perlu dibahas dan dikaitkan dengan dampak yang dapat ditimbulkan dari isu tersebut. *Growth* menentukan seberapa besar kemungkinan isu tersebut dapat memburuk jika tidak segera ditangani. Kriteria nilai menggunakan skala *likert* dengan rentang skor 1 - 5, yakni skor 1 sangat kecil hingga skor 5 sangat besar. Skor-skor ini yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan prioritas penanganan isu, sehingga isu-isu yang paling mendesak, serius, dan berpotensi berkembang dapat diatasi terlebih dahulu. Penentuan skor dari ketiga isu dilakukan bersama mentor yang memiliki pemahaman yang lebih komprehensif atas permasalahan di unit kerja Pusaka.

Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Isu Prioritas dengan Metode USG (*Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*)

Kriteria	Skor	Kategori	Indikator
<i>Urgency</i>	5	Sangat Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan
	4	Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan
	3	Cukup Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan
	2	Kurang Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun
	1	Tidak Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu > 1 tahun
<i>Seriousness</i>	5	Sangat Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada Unit PUSAKA, <i>stakeholder</i> terkait, dan publik
	4	Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada Unit PUSAKA dan <i>stakeholder</i> terkait
	3	Cukup Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada Unit PUSAKA
	2	Kurang Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada semua analis legislatif
	1	Tidak Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada individu analis legislatif
<i>Growth</i>	5	Sangat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu I bulan
	4	Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan
	3	Cukup Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan

	2	Kurang Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun
	1	Tidak Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu >1 tahun

Berikut ini analisis penilaian isu prioritas menggunakan metode USG:

Tabel 3.4. Teknik Tapisan Isu dengan Metode USG

No.	Isu	Skor Nilai			Total	Prioritas
		U	S	G		
1.	Belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka	5	4	3	12	1
2.	Belum optimalnya ekspose hasil produk kajian di Instagram Pusaka	3	3	2	8	2
3.	Belum optimalnya penggunaan <i>software</i> analisis statistik di Pusaka	2	3	2	7	3

Berikut adalah alasan komprehensif untuk setiap skor yang diberikan menggunakan metode USG (*Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*) pada ketiga isu di Pusaka:

a. Belum Tersedianya Sistem Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan AKD di Pusaka

- 1) **Urgency:** Isu ini memiliki nilai *urgency* 5 karena belum tersedianya sistem monitoring yang memadai menyebabkan kesulitan dalam pencarian dan pemanfaatan data kajian yang telah diproduksi. Tanpa adanya sistem yang memadai untuk mengakses dan mengelola produk kajian, efisiensi kerja menurun dan data penting bisa terlewat. Dalam konteks keparlemen yang dinamis, kecepatan dan ketepatan informasi sangat krusial untuk mendukung kebutuhan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Ketiadaan sistem monitoring ini langsung berdampak pada produktivitas dan kualitas *output* produk kajian Pusaka, yang mendesak untuk segera diperbaiki agar proses analisis substansi atas permintaan AKD kedepannya lebih efektif.

- 2) **Seriousness**: Isu ini memiliki nilai *seriousness* 4 karena langsung berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas kerja Pusaka. Tanpa adanya sistem monitoring data yang baik, ada risiko besar bahwa informasi yang relevan dapat hilang atau tidak dapat diakses tepat waktu. Ini dapat menghambat proses pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD. Meskipun dampaknya bisa besar, tidak langsung mempengaruhi keselamatan atau keberlangsungan operasional.
- 3) **Growth**: Isu ini memiliki nilai *growth* 3 karena pertumbuhan dari isu ini cukup memburuk dalam waktu 6 bulan. Dampak negatif kemungkinan akan berkembang seiring dengan meningkatnya volume data dan kebutuhan analisis substansi atas permintaan AKD secara insidental. Keterlambatan dalam penanganan isu ini bisa menyebabkan peningkatan kesulitan dalam mengelola dan mengakses *database*, yang pada akhirnya akan mengganggu kualitas dan waktu analisis substansi.

b. Belum optimalnya ekspose hasil produk kajian di Instagram Pusaka

- 1) **Urgency**: Isu ini memiliki nilai *urgency* 3 lebih rendah dibandingkan isu 1. Meskipun penting untuk meningkatkan visibilitas dan dampak dari hasil kajian, ketidakefektifan di Instagram tidak secepatnya mengganggu proses internal dan output Pusaka seperti tidak tersedianya *dashboard*. Masalah ini lebih terkait dengan strategi komunikasi dan pemasaran, yang memiliki dampak yang kurang mendesak dalam operasional sehari-hari.
- 2) **Seriousness**: Isu ini memiliki nilai *urgency* 3 karena kurangnya optimalisasi di Instagram mempengaruhi jangkauan dan dampak dari informasi yang disampaikan, yang dapat mengurangi efektivitas komunikasi Pusaka kepada publik dan pemangku kepentingan. Meskipun dampaknya signifikan untuk citra dan penyebaran informasi, itu tidak langsung mengancam kelancaran operasi atau kualitas produk.
- 3) **Growth**: Isu ini memiliki nilai *growth* 2 karena meskipun peningkatan dalam penggunaan Instagram akan memberikan manfaat tambahan, keterlambatan dalam mengoptimalkan *platform* ini tidak akan menyebabkan masalah besar secara langsung dalam jangka pendek. Peningkatan jangkauan informasi mungkin akan lebih bersifat tambahan, dan dampak negatifnya akan lebih terlihat dalam jangka waktu panjang.

c. Belum optimalnya penggunaan *software* analisis statistik di Pusaka

- 1) **Urgency**: Isu ini memiliki nilai *urgency* 2 yang lebih rendah dari kedua isu lainnya. Meskipun penggunaan *software* analisis statistik yang lebih canggih dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi analisis, ketidakoptimalan dalam penggunaan *software* saat ini tidak langsung menghambat operasional sehari-hari. Mengingat sejauh ini analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif seperti studi literatur, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Oleh karena itu, isu ini tidak terlalu mendesak dibandingkan dengan isu-isu lainnya.
- 2) **Seriousness**: Isu ini memiliki nilai *seriousness* 3 karena penggunaan *software* analisis yang lebih canggih dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan analisis, yang berpotensi mempengaruhi hasil kajian dan kepuasan pemangku kepentingan. Meskipun penting untuk meningkatkan akurasi dan representasi visual hasil analisis, dampaknya tidak segera mengganggu operasional namun berpotensi mempengaruhi kualitas produk analisis dalam jangka panjang.
- 3) **Growth**: Isu ini memiliki nilai *growth* 2 karena keterlambatan dalam mengadopsi teknologi analisis yang lebih canggih tidak segera memburuk dengan cepat, meskipun di masa depan mungkin akan menjadi lebih penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan analisis data yang kompleks. Namun, saat ini, dampak negatif dari isu ini tidak berkembang dengan cepat.

2. Pemilihan Isu Prioritas

Berdasarkan analisis tapisan isu dengan metode USG, maka isu prioritas yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah isu belum tersedianya *interactive dashboard* produk kajian di Pusaka. Isu tersebut dinilai sebagai isu yang sangat berpengaruh bagi unit kerja karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan *urgency*, *seriousness*, dan *growth* dampaknya. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai mengapa isu ini dipilih sebagai prioritas utama:

a. **Urgency (Kedekatan atau Kepentingan Mendesak)**

- 1) Dampak Langsung pada Proses Kerja: Tanpa adanya *interactive dashboard*, proses pencarian dan pengelolaan data produk kajian menjadi sangat sulit. Pusaka memproduksi berbagai produk analisis seperti isu sepekan, info singkat, *policy brief*, dan *parliamentary review* yang membutuhkan akses mudah dan cepat untuk data historis serta pemantauan output secara *real-time*. Ketiadaan *dashboard*

menghambat efisiensi operasional dan memperlambat proses pencarian informasi yang vital untuk pengambilan keputusan.

- 2) Akses yang Cepat: Dalam konteks keparlemenan, akses yang cepat dan efisien terhadap data sangat penting untuk memberikan asistensi yang tepat waktu kepada anggota DPR dan mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Urgensi ini meningkat karena ketidaktersediaan *dashboard* dapat memperlambat aliran informasi dan berdampak langsung pada efektivitas kerja Pusaka.

b. *Seriousness* (Keseriusan Masalah)

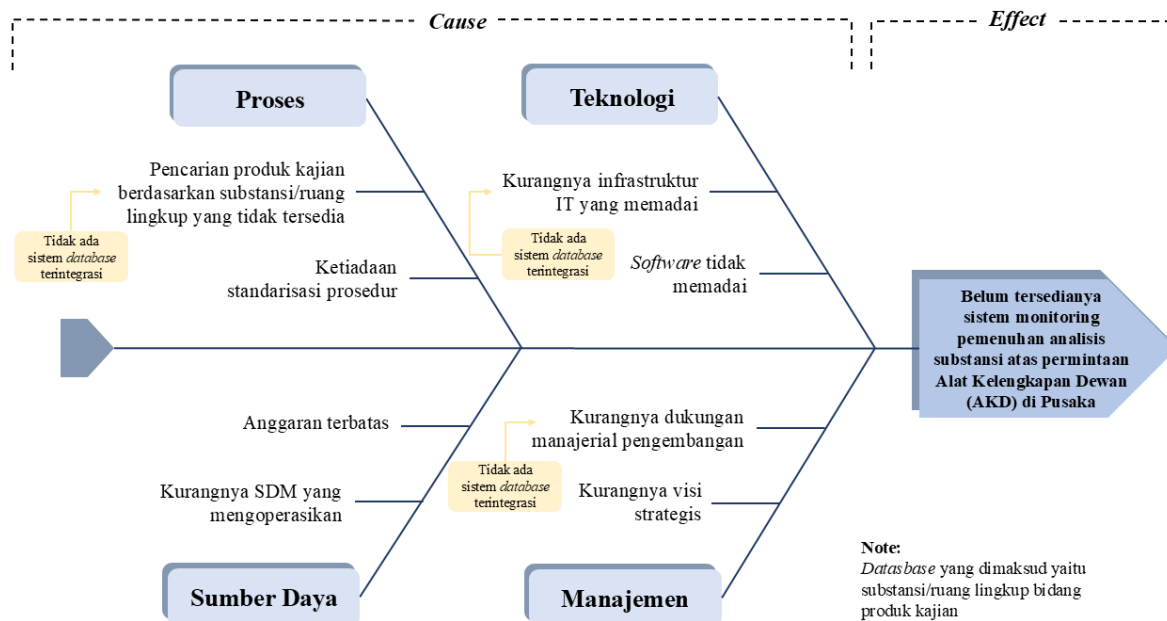
- 1) Kualitas dan Efektivitas Produk: Ketiadaan *dashboard* berdampak serius pada kualitas dan efektivitas produk Pusaka. Tanpa sistem yang terintegrasi untuk mengelola data, ada risiko besar bahwa informasi penting bisa terlewat atau tidak terkelola dengan baik. Ini dapat mengurangi akurasi dan kualitas produk akhir yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, serta menghambat kemampuan Pusaka untuk memberikan analisis yang mendalam dan berguna.
- 2) Manajemen Data yang Kurang Optimal: Ketiadaan *database* yang memadai membuat pencarian data menjadi sangat sulit dan tidak efisien. Ini menghambat kemampuan Pusaka untuk mengelola dan memanfaatkan data kajian secara optimal. Data yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan, kehilangan informasi penting, dan ketidakmampuan dalam melacak dan menganalisis tren dari waktu ke waktu.

c. *Growth* (Potensi Pertumbuhan atau Pemburukan Masalah)

- 1) Potensi Memburuk yang Berkelanjutan: Masalah ini cenderung memburuk seiring dengan pertumbuhan volume data dan kompleksitas analisis yang dilakukan. Tanpa adanya sistem manajemen data yang baik, kesulitan dalam pengelolaan dan akses data akan semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam efisiensi operasional dan kualitas *output* Pusaka.
- 2) Dampak Terhadap Keputusan dan Laporan: Jika isu ini tidak segera diatasi, dampaknya dapat meluas, mempengaruhi kemampuan Pusaka dalam menghasilkan laporan dan analisis yang tepat waktu dan relevan. Ketidakmampuan untuk mengelola data secara efektif dapat mempengaruhi kemampuan untuk memberikan rekomendasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang dapat berdampak pada proses legislasi dan pembuatan kebijakan.

C. Analisis Isu

Isu terkait belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka kemudian dianalisis menggunakan metode *fishbone diagram*. Metode ini bertujuan untuk memetakan berbagai faktor penyebab yang berkontribusi terhadap masalah tersebut berdasarkan cabang-cabang terkait dan menekankan pada hubungan sebab-akibat (*Cause-and-Effect*) (Holifahtus Sakdiyah et al., 2022). Adapun hasil analisa *fishbone diagram* terkait isu tersebut, sebagai berikut:



Gambar 3.2 *Fishbone Diagram* terkait Isu Belum Tersedianya Sistem Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka

Dari hasil analisis *fishbone diagram* di atas, diketahui bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan isu tersebut muncul antara lain faktor proses, teknologi, sumber daya, dan manajemen. Dari masing-masing faktor tersebut terdapat tiga penyebab utama yang paling berpengaruh terhadap belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD di Pusaka yaitu proses pencarian produk kajian berdasarkan substansi/ruang lingkup yang tidak tersedia, kurangnya infrastruktur IT yang memadai dapat membatasi kemampuan untuk mengembangkan dan memelihara sistem monitoring, dan kurangnya dukungan manajerial pengembangan sistem monitoring.

Dari penyebab yang sudah diketahui tersebut kemudian dilakukan analisis lanjutan untuk menentukan akar penyebab dari penyebab utama tersebut. Hasil Analisa menunjukkan bahwa akar penyebabnya adalah "Tidak ada sistem *database* yang terintegrasi". Adapun *database* yang dimaksud yaitu data substansi/ruang lingkup produk kajian (isu sepekan, info singkat,

policy brief, parliamentary review, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian). Akar penyebab ini diperoleh dari studi literatur dan wawancara kepada pegawai di unit kerja Pusaka. Tanpa sistem *database* terintegrasi, akan menyulitkan dalam proses monitoring pemenuhan analisis substansi oleh AKD setiap tahunnya, serta pencarian data substansi/ruang lingkup produk kajian menjadi tidak efisien yang mana akan menyulitkan analisis substansi selanjutnya untuk mencari referensi substansi/ruang lingkup yang sudah/belum dikaji dalam produk kajian. Selain itu, tanpa sistem *database* terintegrasi, kebutuhan akan infrastruktur IT untuk pengembangan sistem monitoring tidak dapat dirancang dan dikembangkan. Serta, tanpa sistem *database* terintegrasi, pengembangan sistem monitoring tidak mendapat dukungan manajerial yang memadai.

D. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan hasil analisis isu terkait belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka, diketahui akar penyebab dari penyebab utama yaitu tidak adanya sistem *database* produk kajian yang terintegrasi. *Database* yang dimaksud yaitu substansi/ruang lingkup bidang produk kajian. Mengingat produk kajian yang dihasilkan oleh Pusaka secara periodik dalam kuantitas yang banyak, maka gagasan pemecahan isu akan difokuskan pada Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan (Ekkuinbang) Komisi IV. Inventarisasi *database* dilakukan dengan mengklasifikasikan jenis produk kajian, nama penulis, kategori substansi/ruang lingkup bidang, dan kuantitas produk kajian dengan periode penerbitan produk kajian yaitu Januari – Agustus 2024. Terdapat 7 (tujuh) produk kajian di Pusaka yang akan dilakukan inventarisasi dan klasifikasi ke dalam *database* (Tabel 3.5).

Tabel 3.5. Produk Kajian di Pusaka dalam Pelaksanaan Kegiatan Analisis Substansi

No	Produk Kajian	Periode Terbit
1	Ringkasan Isu (Isu Sepekan)	1 (satu) minggu sekali
2	Memo Kebijakan (Info Singkat)	2 (dua) minggu sekali
3	Makalah Singkat Kebijakan (<i>Policy Brief</i>)	3 (tiga) bulan sekali
4	Makalah Kebijakan (<i>Parliamentary Review</i>)	3 (tiga) bulan sekali
5	Jurnal	Non-Periodik
6	Buku	
7	Laporan Hasil Kajian	

Urgensi dari aktualisasi mengenai penyelesaian isu ini yaitu dapat memonitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka khususnya Komisi IV (Tabel 3.6). Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, Analis Legislatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif, Selain itu, urgensi lainnya dari penyelesaian isu ini yaitu memudahkan penulis (Analis Legislatif) dalam mencari produk kajian berdasarkan kategori substansi/ruang lingkup kajian yang sebelumnya telah terbit untuk kemudian dijadikan sebagai referensi penulisan isu aktual/strategis berikutnya.

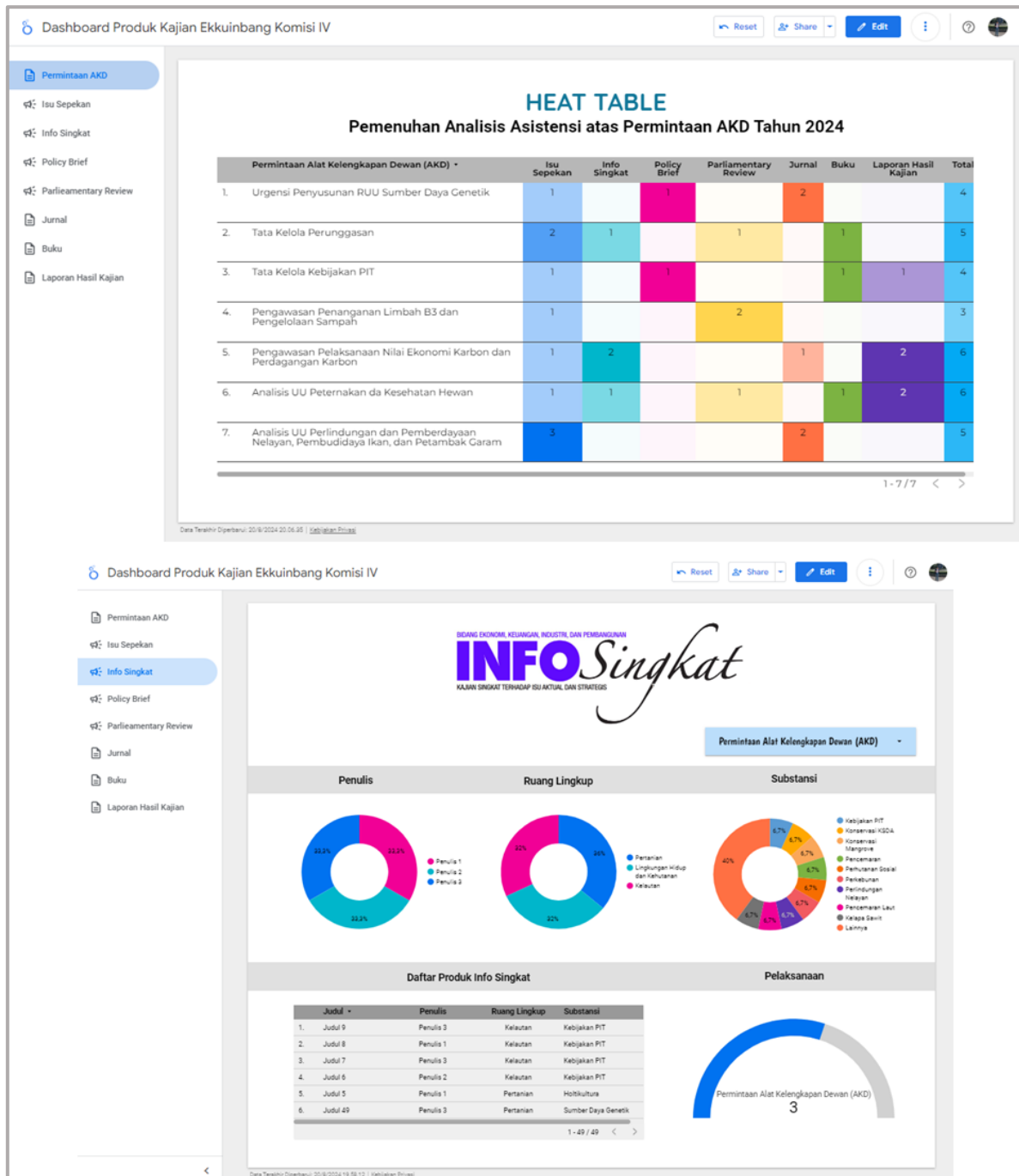
Tabel 3.6. Penugasan terkait Tema/Isu Penyusunan Analisis oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kepada Analis Legislatif di Ekkuinbang Komisi IV

Fungsi Legislasi	Fungsi Pengawasan
1. Urgensi Penyusunan RUU tentang Pengelolaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.	1. Tata Kelola Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Analisis UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	2. Tata Kelola Perunggasan. 3. Pengawasan Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon dan Perdagangan Karbon.
3. Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	4. Pengawasan Penanganan Limbah B3 dan Pengelolaan Sampah.

Kemudahan dalam memonitoring pemenuhan analisis substansi dalam *database* produk kajian di Komisi IV tidak cukup hanya dijelaskan secara deskriptif, namun harus didukung dengan visualisasi data melalui *dashboard* yang interaktif. Salah satu *tools* yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan *database* produk kajian di Komisi IV yaitu Google Data Studio. Aplikasi ini merupakan produk visualisasi data kolaboratif gratis yang memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi data dan laporan berbasis web yang dapat diakses secara *online* (Fernando, 2018). Dengan kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai sumber data dan menyediakan visualisasi yang interaktif, Google Data Studio dapat membantu mengatasi kurangnya sistem *database* terintegrasi di Pusaka khususnya di Komisi IV. Tujuan penggunaan aplikasi ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi pencarian dan pengelolaan data produk kajian, mempermudah visualisasi dan analisis data substansi/ruang lingkup produk kajian, dan yang paling utama yaitu memonitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD setiap tahunnya secara *real-time*. Berdasarkan hal tersebut di atas, adapun gagasan kreatif pemecahan isu yaitu **“Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai Interactive Dashboard Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV)”**.

Gagasan kreatif pemecahan isu tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan fungsi, tugas, dan wewenang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan juga kepada Analis Legislatif dalam pencarian produk kajian berdasarkan kategori substansi/ruang lingkup bidang secara efektif dan efisien. Selain memudahkan Analis Legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal analisis, asistensi, dan ekspose hasil kajian sebagaimana tertuang dalam Permen PANRB No. 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Analis Legislatif, gagasan ini juga sangat terkait dengan Manajemen ASN berupa peran Pegawai ASN dalam hal sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai perencana, pengembangan *dashboard* mampu menyediakan informasi yang komprehensif terkait produk kajian yang telah terbit sehingga memudahkan dalam perencanaan dalam pengkajian isu selanjutnya, Sebagai pelaksana, pengembangan *dashboard* mampu mendukung pelaksanaan tugas dengan efisien dengan adanya akses cepat ke data yang diperlukan secara *real-time*. Sebagai pengawas, *dashboard* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan data yang jelas dan terstruktur serta memungkinkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kualitas dan relevansi produk kajian dengan penugasan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kepada Pusaka. Pengembangan *interactive dashboard*

menggunakan Google Data Studio merupakan wujud dari pemanfaatan literasi digital yang perlu dioptimalkan. Hal ini memungkinkan Analisis Legislatif berkomunikasi dan berkolaborasi secara efisien melalui *platform* digital dengan AKD. Literasi digital melalui penggunaan *interactive dashboard* merupakan kompetensi dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan teknologi digital (*digital skill*).



Gambar 3.3 *Sample Prototype* Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian di Bidang Ekkuinbang Komisi IV

Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, disusunlah tahapan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan selama masa habituasi. Tahapan kegiatan ini disusun berdasarkan pendekatan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) (Wahjono et al., 2024). Adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Kegiatan perencanaan meliputi dua tahapan kegiatan yaitu koordinasi dengan mentor dan rekan kerja Ekkuinbang Komisi IV terkait dengan rancangan aktualisasi, dan koordinasi dengan mentor terkait evaluasi persiapan penyusunan *database* produk kajian. Indikator terukur dan teruji dari kegiatan ini yaitu pelaksanaan koordinasi dilakukan minimal 1 (satu) kali pertemuan pada masing-masing tahap kegiatan. Diharapkan penjelasan terkait rancangan aktualisasi dapat dipahami oleh rekan kerja Analis Legislatif di Bidang Ekkuinbang Komisi IV dan masukan selama koordinasi dari rekan kerja akan menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan/revisi rancangan aktualisasi.

Mitigasi dalam kegiatan perencanaan ini yaitu menetapkan jadwal pertemuan yang jelas kepada pihak terkait, menyusun agenda koordinasi dan materi yang relevan sebelum pertemuan dilakukan, dan menyiapkan rencana opsional untuk pertemuan yang mungkin dibatalkan atau ditunda, serta melakukan dokumentasi dan notulensi untuk memudahkan dalam proses evaluasi.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Kegiatan pengorganisasian dalam hal ini yaitu melakukan penyusunan *database* dan pengembangan Google Data Studio produk kajian Komisi IV. Kegiatan penyusunan *database* produk kajian meliputi dua tahapan yaitu melakukan inventarisasi data produk kajian dan koordinasi dengan mentor. Tahapan inventarisasi data dari produk kajian Komisi IV diklasifikasikan berdasarkan jenis produk kajian, nama penulis, kategori substansi/ruang lingkup bidang, kuantitas produk kajian, dan *link website*. Produk kajian yang akan diinventarisasi yaitu isu sepekan, info singkat, *policy brief, parliemantary review*, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian. Inventarisasi data menggunakan *One Drive Microsoft 365* dan pengklasifikasian menggunakan *Google Spreadsheet*. Periode produk kajian yang diinventarisasi yaitu yang diterbitkan dari Januari hingga Agustus 2024. Setelah tahapan inventarisasi data, kemudian dilakukan koordinasi dengan mentor terkait evaluasi penyusunan *database* produk kajian. Adapun indikator teruji dan terukur dari tahapan kegiatan ini yaitu melakukan inventarisasi data produk kajian (diterbitkan dari Januari – Agustus 2024) sebanyak 29 produk.

Setelah melakukan inventarisasi dan klasifikasi data di Google Spreadsheet, kemudian dilakukan integrasi data ke Google Data Studio. Penyajian infografis pada *interactive dashboard* ditampilkan dengan visual yang interaktif dan informatif dengan data yang disajikan secara *real-time*. *Dashboard* terdiri dari 8 menu utama yaitu main *dashboard* yang memuat *heat table* daftar pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD dan menu lainnya memuat produk kajian.

Mitigasi dalam kegiatan ini yaitu melakukan pengecekan dan verifikasi data secara berkala selama proses inventarisasi data produk kajian, melakukan uji coba integrasi data dengan *dataset* mini sebelum implementasi dari data asli, dan menggunakan desain *dashboard* secara konsisten, interkatif, dan informatif.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Kegiatan pelaksanaan meliputi diseminasi dan uji coba penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian kepada Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV. Indikator terukur dan teruji dari kegiatan ini yaitu melakukan diseminasi dan uji coba kepada 9 Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV dengan target 100% pengguna dapat memahami penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian.

Mitigas pada kegiatan pelaksanaan ini yaitu menyediakan dukungan teknis yang jelas selama pelatihan dan mengadakan sesi tanya jawab dan evaluasi umpan balik dari rekan kerja untuk menilai efektivitas penggunaan *dashboard* produk kajian.

4. *Controlling* (Pengendalian)

Kegiatan pengendalian meliputi evaluasi penggunaan Google Data Studio, perbaikan hasil evaluasi, dan penyusunan laporan akhir aktualisasi. Evaluasi penggunaan Google Data Studio dilakukan dengan metode kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan *dashboard* dimaksud dalam memonitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD. Responden dari kuesioner dimaksud yaitu Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang sebanyak 9 responden. Kriteria penilaian menggunakan skala *likert* dengan rentang skor 1 – 5, yakni skor 1 sangat kecil hingga skor 5 sangat besar. Indikator keberhasilan aktualisasi dari hasil kuesioner yaitu > 80% (skor 5 dan 4). Target dari kegiatan ini yaitu menyelesaikan laporan akhir dengan mencakup semua aspek perbaikan yang diperlukan dan mendapat persetujuan dari pihak terkait dalam waktu 2 minggu setelah evaluasi.

Mitigasi dari kegiatan pengendalian ini yaitu menyusun kuesioner dengan pertanyaan yang jelas dan relevan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi *dashboard*, menyediakan ruang untuk komentar terbuka agar pengguna dapat memberikan umpan balik yang lebih mendetail, mengadakan sesi *review* bersama mentor untuk menangani hasil evaluasi dan perbaikan yang diperlukan, dan menyediakan draf laporan akhir untuk umpan balik dari pihak terkait sebelum penyusunan laporan final.

BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	: Pusat Analisis Keparlemenan
Identifikasi Isu	: a. Belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka b. Belum optimalnya ekspose hasil produk kajian di Instagram Pusaka c. Belum optimalnya penggunaan <i>software</i> analisis statistik di Pusaka
Isu yang Diangkat	: Belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka
Gagasan Pemecahan Isu	: Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai <i>Interactive Dashboard</i> Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV)

Tabel 4.1. Matriks Rancangan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Planning Persiapan, perencanaan, dan koordinasi dengan mentor dan rekan	1.1 Koordinasi untuk menyampaikan rancangan aktualisasi	a. Daftar hadir b. Draf notulensi c. Dokumentasi kegiatan	Berorientasi Pelayanan Rapat dilaksanakan untuk mempresentasikan rancangan dengan jelas terkait penggunaan Google Data Studio dan mendengarkan	Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf d UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas keterpaduan merujuk pada prinsip integritas dan koordinasi	Tugas dan Fungsi Pusaka Kegiatan perencanaan dalam pengembangan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusaka sebagaimana diatur dalam Pasal 298 <i>jo.</i> Pasal 299 huruf a Peraturan

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	kerja Komisi IV			<p><i>feedback</i> dari rekan kerja Komisi IV.</p> <p>Kolaboratif Kerja sama tim selama rapat memungkinkan terjadinya penyelarasan tujuan dan strategi.</p>	<p>yang efektif dengan mentor dan rekan kerja Komisi IV.</p> <p>SMART ASN Melalui rapat koordinasi, pengenalan <i>tools</i> Google Data Studio sebagai bentuk literasi digital dapat diinternalisasikan ke dalam tim.</p>	<p>Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen DPR RI, bahwa persiapan yang matang memastikan data yang relevan tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas Pusaka dalam proses analisis, asistensi, dan ekspose produk kajian dengan ketersediaan <i>database</i>.</p>
		1.2 Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi persiapan penyusunan <i>database</i> produk kajian.	Draf notulensi dan dokumentasi	<p>Kolaboratif Koordinasi yang baik dengan mentor dalam persiapan penyusunan <i>database</i>.</p> <p>Adaptif Adanya masukan dan koreksi dari mentor sehingga diperlukan pendekatan adaptif atas perubahan pada rancangan yang ada.</p>	<p>Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf b UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas profesionalitas merujuk pada koordinasi yang dilakukan harus mengikuti metodologi yang terstandar untuk memastikan bahwa <i>database</i> produk kajian disusun dengan cara sistematis dan terukur.</p> <p>SMART ASN Literasi digital dalam mengelola data melibatkan</p>	<p>Tugas dan Fungsi Analis Legislatif Kegiatan ini sangat relevan dalam mendukung tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permen PANRB No. 11/2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif. Tahap persiapan dapat memastikan ketersediaan data yang relevan untuk analisis, perencanaan menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas <i>database</i>, dan koordinasi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berfungsi dengan baik dan mendukung tujuan analisis, asistensi, dan ekspose hasil</p>

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					proses menyimpan, mengatur, dan memelihara data dengan struktur terorganisir agar mudah diakses dan dikelola (<i>digital skills</i>).	analisis. Dengan demikian, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja Analis Legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara optimal.
2.	Organizing Penyusunan <i>database</i> produk kajian Komisi IV	2.1 Melakukan inventarisasi data dari produk kajian Komisi IV berdasarkan jenis produk kajian, nama penulis, kategori substansi/ruang lingkup bidang, kuantitas produk kajian, dan <i>link website</i> produk (periode Januari – Agustus 2024)	<i>Database</i> produk kajian Komisi IV (Google Spreadsheet), produk kajian dimaksud yaitu: a. Isu Sepekan b. Info Singkat c. <i>Policy Brief</i> d. <i>Parliamentary Review</i> e. Buku f. Jurnal g. Laporan Hasil Kajian	Akuntabel Melakukan inventarisasi data dengan cara yang terstruktur dengan memastikan setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten Pemahaman yang mendalam terkait berbagai produk kajian dan cara mengklasifikasikannya dengan benar.	Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf h UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas efektivitas dan efisiensi mengacu pada kemampuan melakukan inventarisasi data berdasarkan kategorisasi sehingga mampu menyediakan informasi yang relevan. SMART ASN Budaya digital (<i>digital culture</i>) yang mendukung kolaborasi dan komunikasi melalui inventarisasi produk kajian secara digital seperti Google Spreadsheet.	Tugas dan Fungsi Pusaka Sebagaimana diatur dalam Pasal 298 <i>jo.</i> Pasal 299 huruf b Persekjen DPR RI No. 3/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI No. 6/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Seten DPR RI, bahwa kegiatan penyusunan <i>database</i> produk kajian yang lengkap dan terintegrasi membantu dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dengan memberikan informasi yang relevan dan <i>up-to-date</i> , yang penting untuk proses pembuatan kebijakan berbasis data. Tugas dan Fungsi Analis Legislatif Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Permen PANRB No. 11/2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, bahwa penyusunan <i>database</i>

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2.2 Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi penyusunan <i>database</i> produk kajian.	Draf notulensi dan dokumentasi	<p>Kolaboratif Koordinasi yang baik dengan tim Komisi IV dalam penyusunan <i>database</i> produk kajian.</p> <p>Adaptif Adanya masukan dan koreksi dari mentor sehingga diperlukan pendekatan adaptif atas perubahan pada rancangan yang ada.</p>	<p>Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf b UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas profesionalitas merujuk pada koordinasi penyusunan <i>database</i> sehingga mampu menghasilkan <i>output</i> yang berkualitas.</p> <p>SMART ASN Kegiatan koordinasi terkait dengan prinsip kolaborasi sehingga proses inventarisasi dan pengelompokan data produk kajian menjadi lebih efisien.</p>	yang terstruktur dan komprehensif mendukung Analisis Legislatif dalam melakukan analisis substansi dengan menyediakan akses mudah ke data yang relevan dan historis, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan efektif.
3.	Organizing Pembuatan dan pengembangan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i>	3.1 Melakukan integrasi <i>database</i> produk kajian dari Google Spreadsheet ke Google Data Studio	<i>Database</i> produk kajian Komisi IV periode Januari – Agustus 2024 telah terintegrasi dengan Google Data Studio	<p>Kompeten Proses integrasi memerlukan pemahaman mendalam tentang Google Spreadsheet dan Google Data Studio.</p> <p>Adaptif Integrasi data memerlukan penyesuaian cara data</p>	<p>Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf g UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas akuntabilitas merujuk pada integrasi data secara transparan dengan menyediakan</p>	Tugas dan Fungsi Pusaka Sebagaimana diatur dalam Pasal 298 <i>jo.</i> Pasal 299 huruf e Persekjen DPR RI No. 3/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI No. 6/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen DPR RI, bahwa <i>dashboard</i> dapat memberikan dukungan evaluasi hasil analisis dengan menyajikan data

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	produk kajian Komisi IV			disiapkan atau ditampilkan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pengaturan dan format data sesuai dengan kebutuhan visualisasi.	informasi yang jelas dan terstruktur. SMART ASN Kegiatan ini terkait dengan kompetensi <i>digital siklus</i> yang merujuk pada penyusunan <i>database</i> melalui Google Spreadsheet dan mampu mengintegrasikan data tersebut untuk divisualisasikan.	yang terintegrasi dan visualisasi yang mendukung penugasan AKD kepada Pusaka. Tugas dan Fungsi Analisis Legislatif Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Permen PANRB No. 11/2022 tentang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif, bahwa dengan Google Data Studio, dapat mendukung Analisis Substansi yang mana Analisis Legislatif dapat mengakses dan menganalisis data produk kajian secara dinamis.
		3.2 Melakukan desain <i>dashboard</i> Google Data Studio dengan visual yang interaktif dan informatif	Adanya <i>interactive dashboard</i> produk kajian Komisi IV melalui Google Data Studio	Akuntabel Desain <i>dashboard</i> yang akuntabel juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan informasi yang <i>reliable</i> sehingga AKD mampu memahami dan menilai keandalan dan kredibilitas informasi yang disajikan. Kompeten Kemampuan dalam desain grafis dan prinsip-prinsip visualisasi data menjadi hal	Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf h UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas efektivitas dan efisiensi merujuk pada desain <i>dashboard</i> yang interaktif dan informatif sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan Google Data Studio untuk mendesain <i>dashboard</i> , proses visualisasi data menjadi lebih efisien.	<i>Dashboard</i> yang interaktif memungkinkan pemantauan tren, identifikasi substansi/ruang lingkup bidang, dan evaluasi kebijakan secara <i>real-time</i> . Selain itu, pada Pasal 7 huruf c, dengan Google Data Studio, dukungan Ekspose hasil analisis oleh Analisis Legislatif dapat disajikan dalam format visual yang interaktif dan menarik. <i>Dashboard</i> menyajikan data secara <i>real-time</i> , sehingga memudahkan AKD menginterpretasikan tindak lanjut penugasan yang diberikan.

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				esensial sehingga <i>dashboard</i> produk kajian lebih informatif dan interaktif.	SMART ASN Kegiatan ini terkait dengan konsep <i>digital skills</i> yang merujuk pada keterampilan untuk mendesain elemen visual dan interaktif yang mempermudah interpretasi data.	
		3.3 Koordinasi dengan Mentor terkait hasil pengembangan Google Data Studio	Draf notulensi dan dokumentasi	Kolaboratif Kerja sama dengan mentor dan rekan kerja Komisi IV terkait hasil pengembangan Google Data Studio. Adaptif Adanya masukan dan koreksi dari mentor sehingga diperlukan pendekatan adaptif atas perubahan pada rancangan yang ada.	Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf i UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas keterbukaan merujuk pada koordinasi pengembangan <i>dashboard</i> untuk memastikan bahwa data disajikan dalam format yang transparan dan mudah dipahami. SMART ASN Kegiatan ini terkait dengan <i>digital culture</i> yang merujuk pada penerapan budaya kolaborasi dan komunikasi efektif dalam	

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					menggunakan Google Data Studio.	
4.	Actuating Aktualisasi penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian kepada Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV	4.1 Diseminasi penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian kepada Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV 4.2 Melakukan uji coba penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive</i>	a. Daftar hadir b. Draf notulensi c. Dokumentasi kegiatan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> dapat berfungsi dengan baik	Berorientasi Pelayanan Selama diseminasi, penting untuk memastikan bahwa <i>interactive dashboard</i> dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna seperti AKD dan Analisis Legislatif. Harmonis Selama proses diseminasi, penting untuk membangun hubungan positif dengan pengguna dan memastikan semua pihak merasa dihargai dan didengarkan. Adaptif Uji coba <i>tools</i> terkadang memunculkan masalah teknis atau kebutuhan tambahan yang tidak terduga sehingga adaptasi yang cepat dan	Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf i UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas keterbukaan merujuk pada keterlibatan <i>stakeholder</i> terkait untuk memahami penggunaan Google Data Studio sebagai <i>dashboard</i> produk kajian. SMART ASN Kegiatan ini terkait dengan konsep literasi digital berupa <i>digital culture</i> dengan mengintegrasikan penggunaan <i>dashboard</i> dalam budaya kerja kolaboratif. Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf d UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas keterpaduan merujuk pada koordinasi	Tugas dan Fungsi Pusaka Sebagaimana diatur dalam Pasal 298 <i>jo.</i> Pasal 299 huruf c Persekjen DPR RI No. 3/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI No. 6/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen DPR RI, bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Asistensi, dan Ekspose, dashboard Google Data Studio mendukung kegiatan analisis dengan menyajikan data secara interaktif dan visual. Ini memudahkan asistensi kepada AKD dengan memberikan akses cepat dan jelas ke informasi penting, serta memudahkan ekspose hasil analisis dengan cara yang lebih efektif dan mudah dipahami. Tugas dan Fungsi Analis Legislatif Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permen PANRB No. 11/2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, bahwa Dengan memanfaatkan Google Data Studio, Analis Legislatif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<i>dashboard</i> produk kajian di Komisi IV	untuk inventarisasi produk kajian di Komisi IV	efektif perlu dilakukan untuk mengatasinya. Loyal Loyalitas terhadap kualitas produk kajian yang dihasilkan berarti melakukan uji coba dengan perhatian penuh dan memastikan <i>dashboard</i> memenuhi standar tinggi dan kebutuhan AKD dan Analisis Legislatif.	antar tim dalam uji coba penggunaan Google Data Studio sehingga dapat memastikan <i>dashboard</i> terintegrasi dengan sistem <i>database</i> . SMART ASN Kegiatan ini terkait dengan kecakapan menggunakan media digital (<i>digital skills</i>). Dalam hal ini menguji keterampilan teknis dalam menggunakan Google Data Studio untuk memastikan semua fitur <i>dashboard</i> berfungsi sebagaimana diharapkan.	dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mendukung pembuatan keputusan berbasis data, dan memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif.
5.	Controlling Pelaporan evaluasi pelaksanaan kegiatan	5.1 Evaluasi penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian di Komisi IV	a. Dokumentasi kegiatan b. Hasil kuesioner survei evaluasi	Akuntabel Dalam rapat evaluasi, penting untuk menyajikan informasi dan data di Google Data Studio secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaboratif Rapat evaluasi harus dilakukan dengan suasana	Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf c UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas proporsionalitas merujuk pada sejauh mana rapat evaluasi dapat menilai penggunaan Google Data Studio sebagai <i>dashboard</i>	Tugas dan Fungsi Pusaka Sebagaimana diatur dalam Pasal 298 <i>jo.</i> Pasal 299 huruf h Persekjen DPR RI No. 3/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI No. 6/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen DPR RI, bahwa dalam hal Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi , evaluasi terhadap efektivitas penggunaan <i>dashboard</i> menjadi

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				yang mendukung diskusi terbuka dan kolaboratif.	memenuhi tujuan yang diharapkan. SMART ASN Kegiatan ini terkait dengan <i>digital ethics</i> yang mana dapat menilai sejauh mana data dalam <i>dashboard</i> disajikan dengan transparan dan akurat serta memastikan evaluasi mencakup aspek etika penggunaan <i>dashboard</i> .	tahapan yang paling penting. Evaluasi akan menilai beberapa efektif Google Data Studio dalam mendukung tugas-tugas Pusaka, termasuk dalam hal analisis, asistensi, dan ekpose. Ini mencakup penilaian terhadap akurasi data, kemudahan penggunaan, dan dampak terhadap pengambilan keputusan. Tugas dan Fungsi Analis Legislatif Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Permen PANRB No. 11/2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, bahwa pelaporan evaluasi pelaksanaan pengembangan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> akan memberikan pemahaman mendalam kepada AKD mengenai keunggulan <i>dashboard</i> dalam hal asistensi hasil kajian oleh Analis Legislatif.
		5.2 Melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi	Draf perbaikan dari hasil evaluasi	Adaptif Kemampuan secara cepat dan efektif menyesuaikan perbaikan di <i>dashboard</i> dari hasil evaluasi yang diterima selama rapat. Loyal Loyalitas terhadap kualitas produk atau layanan berarti berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa <i>dashboard</i> memenuhi standar tinggi.	Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf h UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas efektivitas dan efisiensi merujuk pada draf perbaikan hasil rapat evaluasi harus dirancang untuk memastikan perbaikan yang diterapkan dapat mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. SMART ASN	

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					Kegiatan ini terkait dengan konsep <i>digital skills</i> dalam mengkomunikasikan perubahan dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi sehingga pengembangan Google Data Studio bisa lebih optimal.	
		5.3 Penyusunan laporan akhir aktualisasi	Dokumentasi	<p>Kompeten Laporan akhir harus disusun dengan menggunakan keterampilan analisis dan penyajian data yang baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi dalam laporan akhir akurat dan didasarkan pada data yang valid.</p> <p>Loyal Menunjukkan loyalitas dengan memastikan bahwa laporan akhir aktualisasi mendukung dan selaras dengan visi dan misi organisasi khususnya unit kerja Pusaka.</p>	<p>Manajemen ASN Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf b UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas profesionalitas menekankan pada draf laporan akhir aktualisasi harus disusun dengan cermat, memperhatikan detail, dan memberikan Gambaran yang akurat dan menyeluruh tentang hasil aktualisasi.</p> <p>SMART ASN kegiatan ini terkait erat dengan <i>digital skills</i> melalui penggunaan alat dan teknik untuk analisis dan penyajian data, <i>digital</i></p>	

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN Ber-Akhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					<p><i>culture</i> melalui kolaborasi dan integrasi budaya digital, <i>digital safety</i> melalui perlindungan data dan dokumen, serta <i>digital ethics</i> melalui transparansi, akurasi, dan perlindungan privasi. Dengan memperhatikan keempat aspek literasi digital ini, laporan akhir dapat disusun secara efektif, aman, dan etis, memenuhi standar profesional dan organisasi yang diharapkan.</p>	

B. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Adapun jadwal kegiatan yang dilakukan selama proses aktualisasi sebagai berikut:

Tabel 4.2. Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Planning Persiapan, perencanaan, dan koordinasi dengan mentor dan rekan kerja Komisi IV												
	a) Koordinasi untuk menyampaikan rancangan aktualisasi kepada rekan kerja Komisi IV												
	b) Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi persiapan penyusunan <i>database</i> produk kajian												
2.	Organizing Penyusunan <i>database</i> produk kajian Komisi IV												
	a) Melakukan inventarisasi data dari produk kajian Komisi IV												
	b) Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi penyusunan <i>database</i> produk kajian												
3.	Organizing Pembuatan dan pengembangan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian Komisi IV												
	a) Melakukan integrasi <i>database</i> produk kajian dari Google Spreadsheet ke Google Data Studio												
	b) Melakukan desain <i>dashboard</i> Google Data Studio dengan visual yang interaktif dan informatif												
	c) Koordinasi dengan Mentor terkait hasil pengembangan Google Data Studio												
4.	Actuating Aktualisasi penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian kepada Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV												
	a) Diseminasi penggunaan Google Data Studio												

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	kepada Analis Legislatif Bidang Ekuinbang Komisi IV												
	b) Melakukan uji coba penggunaan Google Data Studio di Komisi IV												
5.	Controlling Pelaporan evaluasi pelaksanaan kegiatan												
	a) Evaluasi penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian di Komisi IV												
	b) Melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi												
	c) Penyusunan laporan akhir aktualisasi												

BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV)” dan telah dilaksanakan pada masa habituasi selama kurang lebih satu bulan. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini telah terlaksana sesuai dengan rancangan kegiatan awal.

Tabel 5.1. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Planning Persiapan, perencanaan, dan koordinasi dengan mentor dan rekan kerja Komisi IV												
	a) Koordinasi untuk menyampaikan rancangan aktualisasi kepada rekan kerja Komisi IV												
	b) Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi persiapan penyusunan <i>database</i> produk kajian												
2.	Organizing Penyusunan <i>database</i> produk kajian Komisi IV												
	a) Melakukan inventarisasi data dari produk kajian Komisi IV												
	b) Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi penyusunan <i>database</i> produk kajian												
3.	Organizing Pembuatan dan pengembangan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian Komisi IV												
	a) Melakukan integrasi <i>database</i> produk kajian dari Google Spreadsheet ke Google Data Studio												
	b) Melakukan desain <i>dashboard</i> Google Data Studio dengan visual												

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	yang interaktif dan informatif												
	c) Koordinasi dengan Mentor terkait hasil pengembangan Google Data Studio												
4.	Actuating Aktualisasi penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian kepada Analis Legislatif Bidang Ekuinbang Komisi IV												
	a) Diseminasi penggunaan Google Data Studio kepada Analis Legislatif Bidang Ekuinbang Komisi IV												
	b) Melakukan uji coba penggunaan Google Data Studio di Komisi IV												
5.	Controlling Pelaporan evaluasi pelaksanaan kegiatan												
	a) Evaluasi penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian di Komisi IV												
	b) Melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi												
	c) Penyusunan laporan akhir aktualisasi												

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Kegiatan aktualisasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan XII, Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Kegiatan aktualisasi dilaksanakan dalam masa habituasi atau *off campus* yang berlangsung mulai tanggal 22 Agustus – 3 Oktober 2024. Rangkaian kegiatan aktualisasi ini merupakan bentuk pemecahan isu terkait belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka. Adapun uraian kegiatan sebagai berikut:

1. *Planning* (Persiapan, perencanaan, dan koordinasi dengan mentor dan rekan)

- a. **Koordinasi untuk menyampaikan rancangan aktualisasi kepada rekan kerja Komisi IV**

1) Deskripsi Hasil Kegiatan

Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 30 Agustus 2024 di Ruang Ekkuinbang Pusaka Lantai 2 Gedung Nusantara I dengan agenda yaitu koordinasi penyampaian rancangan aktualisasi. Pada pertemuan ini, disampaikan proses inventarisasi data dan *prototype* pengembangan *interactive dashboard* menggunakan Google Data Studio. Inventarisasi data menggunakan aplikasi Google Spreadsheet terhadap produk kajian diantaranya isu sepekan, info singkat, *policy brief*, *parliamentary review*, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian dalam rentang waktu Januari – Agustus 2024. Selanjutnya, dilakukan integrasi *database* Google Spreadsheet ke Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian. *Dashboard* ini memuat 8 menu utama diantaranya 1 menu *main dashboard* yang berisi *heat table* pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD Tahun 2024 dan 7 menu produk kajian. *Dashboard* ini diharapkan menjadi media monitoring Kepala Pusat Analisis Keparlemenan terhadap penugasan oleh AKD khususnya di Bidang Ekkuinbang Komisi IV. Adapun masukan dari rekan kerja Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV yaitu pada *heat table* perlu dibuatkan legenda warna yang menunjukkan informasi bawah warna yang semakin pekat berarti kuantitas produk kajian yang terkait penugasan oleh AKD lebih banyak. Selain itu, pada menu permintaan AKD perlu dilengkapi dengan 7 (tujuh) permintaan analisis substansi atas permintaan AKD. Serta, perlu dipastikan kembali terkait grafik pelaksanaan permintaan AKD.



Gambar 5.1 Koordinasi Rancangan Aktualisasi kepada Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Berorientasi Pelayanan

Rapat dilaksanakan untuk mempresentasikan rancangan dengan jelas terkait penggunaan Google Data Studio dan mendengarkan *feedback* dari rekan kerja Komisi IV.

b) Kolaboratif

Kerja sama tim selama rapat memungkinkan terjadinya penyesuaian tujuan dan strategi.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf d UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas keterpaduan merujuk pada prinsip integritas dan koordinasi yang efektif dengan mentor dan rekan kerja Komisi IV.

b) SMART ASN

Melalui rapat koordinasi, pengenalan *tools* Google Data Studio sebagai bentuk literasi digital dapat diinternalisasikan ke dalam tim.

b. Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi persiapan penyusunan *database* produk kajian

1) Deskripsi Hasil Kegiatan

Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 2 September 2024 di *Coworking Space* Pusaka Lantai 2, Gedung Nusantara 1 dengan agenda koordinasi dengan mentor terkait evaluasi persiapan penyusunan *database* produk kajian. Adapun masukan dari Mentor yaitu inventarisasi data yang dilakukan nantinya perlu dipertimbangkan untuk memasukkan produk kajian yang diterbitkan di bulan September, sehingga pada saat presentasi final dapat disampaikan secara jelas bahwa pelaksanaan aktualisasi ini akan dilanjutkan dan diaktualisasikan di unit kerja setelah masa habituasi berakhir.



Gambar 5.2 Koordinasi dengan Mentor terkait Evaluasi Persiapan Penyusunan *Database* Produk Kajian

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Kolaboratif

Koordinasi yang baik dengan mentor dalam persiapan penyusunan *database*.

b) Adaptif

Adanya masukan dan koreksi dari mentor sehingga diperlukan pendekatan adaptif atas perubahan pada rancangan yang ada.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf b UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas profesionalitas merujuk pada koordinasi yang dilakukan harus mengikuti metodologi yang terstandar untuk memastikan bahwa *database* produk kajian disusun dengan cara sistematis dan terukur.

b) SMART ASN

Literasi digital dalam mengelola data melibatkan proses menyimpan, mengatur, dan memelihara data dengan struktur terorganisir agar mudah diakses dan dikelola (*digital skills*).

2. Organizing (Penyusunan *database* dan pengembangan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian Komisi IV)

a. Melakukan inventarisasi data dari produk kajian Komisi IV

1) Deskripsi Hasil Kegiatan

Tahapan kegiatan ini yaitu melakukan inventarisasi data menggunakan aplikasi Google Spreadsheet terhadap produk kajian diantaranya isu sepekan, info singkat, *policy brief*, *parliamentary review*, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian dalam rentang waktu Januari – September 2024. Sebagaimana hasil inventarisasi produk kajian yang dilakukan, belum terdapat produk kajian *parliamentary review*, jurnal, buku, dan laporan penelitian. Adapun hasil inventarisasi data dari produk kajian Bidang Ekuinbang Komisi IV, sebagai berikut:

PRODUK KAJIAN KOMISI IV JANUARI - SEPTEMBER 2024										
File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan										
R36										
No	Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)	Isu Sepekan	Info Singkat	Policy Brief	Parliamentary Review	Jurnal	Buku	Laporan Penelitian	Total	
1.	Urgensi Penyusunan RUU Sumber Daya Genetik	1	0	0					1	
2.	Analisis UU Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	0	0					1	
3.	Analisis UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	4	1	0					5	
4.	Tata Kelola Kebijakan PIT	1	0	0					1	
5.	Tata Kelola Perunggasan	0	0	0					0	
6.	Pengawasan Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon dan Perdagangan Karbon	2	1	0					3	
7.	Pengawasan Penanganan Limbah B3 dan Pengelolaan Sampah	0	1	1					2	

Gambar 5.3 Data Permintaan Analisis Substansi atas Permintaan AKD

PRODUK KAJIAN KOMISI IV JANUARI - SEPTEMBER 2024										
File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan										
M33										
No	Vol / Bulan	Penulis	Penulis 2	Judul	Ruang Lingkup	Substansi	Mitra	Link	Penemuan Analisis Substansi atas Permintaan AKD	
1.	Vol. II / PUBLIT - Januari 2024	Masyithah Aulia Adhien, S.Si, M.E.		Peningkatan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan di Tahun 2024	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	Analisis UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	
2.	Vol. III / PUBLIT - Januari 2024	Teddy Prasetyawan, S.T., M.T.		Memorandum Petani Misional	Pertanian	Pemulihan dan Pengembangan SDM Pertanian	Kementerian Pertanian	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
3.	Vol. IV / PUBLIT - Januari 2024	Anih Sri Suryani, S.Si, M.T.		Art Penting Spiritual Ecologis di Tengah Krisis Ulaya	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengendalian Perubahan Iklim	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
4.	Vol. I / PUBLIT - Februari 2024	Riyadi Santoso		Uyaya Pengurangan Emisi dan Insentif Karbon	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengendalian Perubahan Iklim	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	Pemawasan Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon dan Perdagangan Karbon	
5.	Vol. V / PUBLIT - Februari 2024	Sri Nuhayati Qodiyahun, S.Soc., M.Si.		Dilema Subsidi Nelayan Indonesia	Kelautan dan Perikanan	Pemulihan dan Pengembangan SDM Pertanian	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	Analisis UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	
6.	Vol. I / PUBLIT - Maret 2024	Masyithah Aulia Adhien, S.Si, M.E.		Stok Ikan Memasuki Bulan Ramadan dan Idulfitri 2024	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	Analisis UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	
7.	Vol. II / PUBLIT - Maret 2024	Teddy Prasetyawan, S.T., M.T.		Waspada Wabah Antrakis	Pertanian	Pelternakan dan Kesehatan Hewan	Kementerian Pertanian	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	Analisis UU Peternakan dan Kesehatan Hewan	
8.	Vol. III / PUBLIT - Maret 2024	Anih Sri Suryani, S.Si, M.T.		Memasukkan Pengkajian Indikator Pemantauan Global	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengendalian Perubahan Iklim	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	Pemawasan Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon dan Perdagangan Karbon	
9.	Vol. IV / PUBLIT - Maret 2024	Masyithah Aulia Adhien, S.Si, M.E.		Pertanyuan Keairan Lokal dalam Mendukung Konservasi	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Sektur dan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
10.	Vol. II / PUBLIT - Mei 2024	Sri Nuhayati Qodiyahun, S.Soc., M.Si.		Strategi Antisipasi, Mitigasi, Adaptasi Sektor Pertanian di tengah Naiknya Suhu Bumi	Pertanian	Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
11.	Vol. III / PUBLIT - Mei 2024	Masyithah Aulia Adhien, S.Si, M.E.		Urgensi Pendanaan Berkelanjutan untuk Pesisiran Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelolaan Dana LU	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
12.	Vol. IV / PUBLIT - Mei 2024	Teddy Prasetyawan, S.T., M.T.		Isu Air Untuk Pangan Pada World Water Forum 2024	Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Air	Badan Pangan Nasional	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
13.	Vol. V / PUBLIT - Mei 2024	Anih Sri Suryani, S.Si, M.T.		Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan Pupuk Berbasis Lokal	Pertanian	Subsidi Pupuk	Kementerian Pertanian	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
14.	Vol. I / PUBLIT - Juni 2024	Sri Nuhayati Qodiyahun, S.Soc., M.Si.		Kombinasi Indonesia Menghentikan Deforestasi pada Tahun 2030	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
15.	Vol. II / PUBLIT - Juni 2024	Masyithah Aulia Adhien, S.Si, M.E.		Tantangan Melindungi Asa Kesehatan Pesisir	Pertanian	Pemulihan dan Pengembangan SDM Pertanian	Kementerian Pertanian	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
16.	Vol. III / PUBLIT - Juni 2024	Teddy Prasetyawan, S.T., M.T.		PMO 2024: Solusi Masalah Penyeludupan Berbahaya Obat-obatan?	Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	Analisis UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	
17.	Vol. IV / PUBLIT - Juli 2024	Anih Sri Suryani, S.Si, M.T.		Peningkatan Sumber Daya Genetik di Indonesia	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	Urgensi Penyusunan RUU Sumber Daya Genetik	
18.	Vol. I / PUBLIT - Juli 2024	Sri Nuhayati Qodiyahun, S.Soc., M.Si.		Konservasi Mangrove: Perwujudan Inovasi dan Kolaborasi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
19.	Vol. III / PUBLIT - Agustus 2024	Masyithah Aulia Adhien, S.Si, M.E.		Anugrah Jawa Sari, S.T., M.M.	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
20.	Vol. IV / PUBLIT - Agustus 2024	Teddy Prasetyawan, S.T., M.T.		Riski Monas Sapiwa, S.Si, M.T.	Pertanian	Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
21.	Vol. V / PUBLIT - Agustus 2024	Anih Sri Suryani, S.Si, M.T.		Fiyah Nabhan, S.T., M.Si.	Pertanian	Pembayaran Pertanian	Kementerian Pertanian	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
22.	Vol. I / PUBLIT - September 2024	Masyithah Aulia Adhien, S.Si, M.E.		Rahmat Saeman, S.Kel., M.S.	Kelautan dan Perikanan	Pemulihan dan Pengembangan SDM Pertanian	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	Tata Kelola Kebijakan PIT	
23.	Vol. II / PUBLIT - September 2024	Teddy Prasetyawan, S.T., M.T.		Fauzan Lazuardi Ramadhani, S.Si, M.Si.	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	
24.	Vol. III / PUBLIT - September 2024	Anih Sri Suryani, S.Si, M.T.		Megatrikha Kandi, S.T., M.Si.	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/berkas/berkas/14420240101-11-PUBIT-11-1442024-1104.pdf	D Luar Penerimaan AKD	

Gambar 5.4 Data Isu Sepekan

No.	Vol / Bulan	Penulis 1	Penulis 2	Judul	Ruang Lingkup	Substansi	Mitra	Link	Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan AKD
1	Vol XVI / No. 1 - Januari 2024	Anih Siti Suryani, S.Si, M.T.		Potensi dan Tantangan Implementasi Carbon Capture and Storage di Indonesia	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengendalian Perubahan Iklim	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/info%20singkat%2016-1-P3D0-1-anuar-2024-235.pdf	Penyusunan Pelaksanaan Nilai Ekonomi
2	Vol XVI / No. 2 - Januari 2024	Sri Nurhayati Qodiyatun, S.Sos., M.Si		Pekerjaan Rumah Masalah Lingkungan Hidup Bagi Presiden Terpilih	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Perubahan Iklim	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/info%20singkat%2016-1-P3D0-2-janus-2024-189.pdf	Kepercayaan Pengawasan Lintas Bidang
3	Vol XVI / No. 4 - Februari 2024	Dr. Ari Mufanta Giring, S.E., M.S.E		Strategi Kebijakan Monopoli Kenaikan Harga Beras Di Indonesia	Pertanian	Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian	https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/info%20singkat%2016-1-P3D0-4-feb-2024-224.pdf	Di Luar Penugasan AKD
4	Vol XVI / No. 5 - Maret 2024	Masyitah Aulia Adhlim, S.Si, M.E.		Perubahan Iklim dan Faktor-Faktor yang Mengancam Stabilitas Produksi Pangan Nasional	Pertanian	Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian	https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/info%20singkat%2016-1-P3D0-5-mars-2024-194.pdf	Di Luar Penugasan AKD
5	Vol XVI / No. 10 - Mei 2024	Masyitah Aulia Adhlim, S.Si, M.E.		Politik Pembukaan Kembali Ekspor Benih Lobster	Kelautan dan Perikanan	Pengaturan Daya Saing Produk KP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/info%20singkat%2016-1-P3D0-10-mei-2024-194.pdf	Analisis UU Perindungan dan Pemberda
6	Vol XVI / No. 14 - Juli 2024	Masyitah Aulia Adhlim, S.Si, M.E.		Mekanisme Pendanaan Debt For Nature Swap untuk Mendukung Pelestarian Alam Indonesia	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perhutanan Sosial dan Kemitaan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/info%20singkat%2016-1-P3D0-14-juli-2024-194.pdf	Di Luar Penugasan AKD
7	Vol XVI / No. 16 - Agustus 2024	Priantje Jaya Hari, S.H., LL.M	Magetika Kandi, S.T., M.Si	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Sabwa Yang Dibeludangi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/info%20singkat%2016-1-P3D0-16-agus-2024-260.pdf	Di Luar Penugasan AKD
8	Vol XVI / No. 17 - September 2024	Denico Doly, S.H., M.Kn	Fiyat Nabihah, S.T., M.Si	Palindungan Masyarakat Hukum Adat dari Green Grabbing	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/info%20singkat%2016-1-P3D0-17-septem-2024-200.pdf	Di Luar Penugasan AKD

Gambar 5.5 Data Info Singkat

No.	Vol / Bulan	Penulis	Judul	Ruang Lingkup	Substansi	Mitra	Link	Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan AKD
1	Vol 29 / No. 1 - Maret 2024	Riyadi Santoso	Optimalisasi Kebijakan Pembangunan Kelautan (Maritim) Menuju Indonesia Emas Tahun 2045	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/policy_brief/Policy%20inf-29-1-M-2024.pdf	Di Luar Penugasan AKD
2	Vol 29 / No. 2 - Juni 2024	Anih Siti Suryani, S.Si, M.T.	Pengelolaan Sampah Plastik melalui Pendekatan Ekonomi Sirkular	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/policy_brief/Policy%20inf-29-2-J-2024.pdf	Penyusunan Pengawasan Lintas Bidang

Gambar 5.6 Data Policy Brief

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Akuntabel

Melakukan inventarisasi data dengan cara yang terstruktur dengan memastikan setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Kompeten

Pemahaman yang mendalam terkait berbagai produk kajian dan cara mengklasifikasikannya dengan benar.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf h UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas efektivitas dan efisiensi mengacu pada kemampuan melakukan

inventarisasi data berdasarkan kategorisasi sehingga mampu menyediakan informasi yang relevan.

b) SMART ASN

Budaya digital (*digital culture*) yang mendukung kolaborasi dan komunikasi melalui inventarisasi produk kajian secara digital seperti Google Spreadsheet.

b. Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi penyusunan *database* produk kajian

1) Deskripsi Hasil Kegiatan

Adapun masukan dari Mentor yaitu inventarisasi data yang dilakukan nantinya perlu dipertimbangkan untuk memasukkan produk kajian yang diterbitkan di bulan September, sehingga pada saat presentasi final dapat disampaikan secara jelas bahwa pelaksanaan aktualisasi ini akan dilanjutkan dan diaktualisasikan di unit kerja setelah masa habituasi berakhir.



Gambar 5.7 Koordinasi dengan Mentor terkait Evaluasi Penyusunan *Database* Produk Kajian

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Kolaboratif

Koordinasi yang baik dengan tim Komisi IV dalam penyusunan *database* produk kajian.

b) Adaptif

Adanya masukan dan koreksi dari mentor sehingga diperlukan pendekatan adaptif atas perubahan pada rancangan yang ada.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf b UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas profesionalitas merujuk pada koordinasi penyusunan *database* sehingga mampu menghasilkan *output* yang berkualitas.

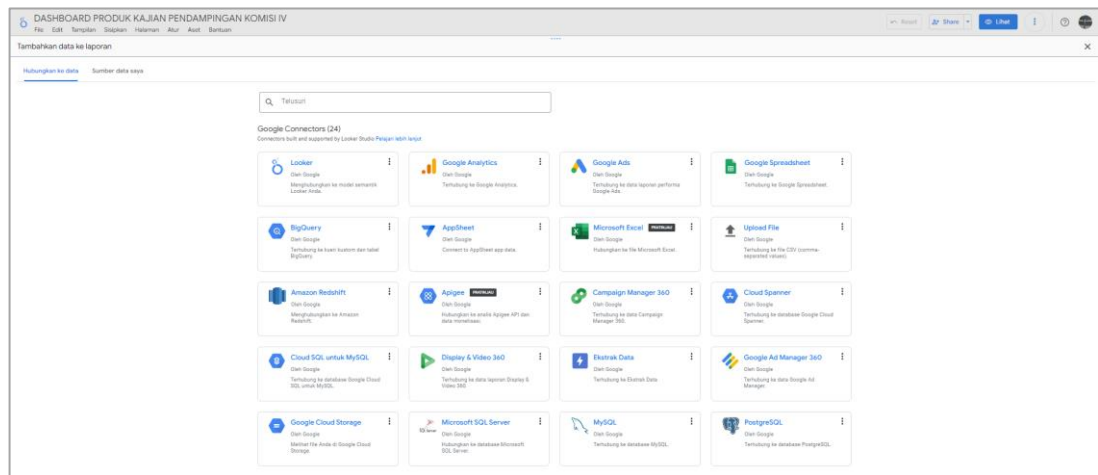
b) SMART ASN

Kegiatan koordinasi terkait dengan prinsip kolaborasi sehingga proses inventarisasi dan pengelompokan data produk kajian menjadi lebih efisien.

c. Melakukan integrasi *database* produk kajian dari Google Spreadsheet ke Google Data Studio

1) Deskripsi Hasil Kegiatan

Tujuh produk kajian yang telah diinventarisasi di Google Spreadsheet kemudian diintegrasikan ke Google Data Studio, sebagai berikut:



Gambar 5.8 Proses Integrasi Data dari Google Spreadsheet ke Google Data Studio

DASHBOARD PRODUK KAJIAN PENDAMPINGAN KOMISI IV						
Sumber data						
Nama	Jenis Konektor	Jenis	Digunakan dalam laporan	Status	Tindakan	Alias
PRODUK KAJIAN KOMISI IV JANUARI - AGUSTUS 20...	Google Spreadsheet	Terseleksi	6 diagram	Bekerja	EDIT DUPLIKASIKAN HAPUS IZINKAN PENGGUNAAN KEMBALI	ds29
PRODUK KAJIAN KOMISI IV JANUARI - AGUSTUS 20...	Google Spreadsheet	Terseleksi	1 diagram	Bekerja	EDIT DUPLIKASIKAN HAPUS IZINKAN PENGGUNAAN KEMBALI	ds22
PRODUK KAJIAN KOMISI IV JANUARI - AGUSTUS 20...	Google Spreadsheet	Terseleksi	6 diagram	Bekerja	EDIT DUPLIKASIKAN HAPUS IZINKAN PENGGUNAAN KEMBALI	ds43
PRODUK KAJIAN KOMISI IV JANUARI - AGUSTUS 20...	Google Spreadsheet	Terseleksi	1 diagram	Bekerja	EDIT DUPLIKASIKAN HAPUS IZINKAN PENGGUNAAN KEMBALI	ds108
PRODUK KAJIAN KOMISI IV JANUARI - AGUSTUS 20...	Google Spreadsheet	Terseleksi	6 diagram	Bekerja	EDIT DUPLIKASIKAN HAPUS IZINKAN PENGGUNAAN KEMBALI	ds24
PRODUK KAJIAN KOMISI IV JANUARI - AGUSTUS 20...	Google Spreadsheet	Terseleksi	1 diagram	Bekerja	EDIT DUPLIKASIKAN HAPUS IZINKAN PENGGUNAAN KEMBALI	ds109

Gambar 5.9 Sumber Data Inventarisasi

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Kompeten

Proses integrasi memerlukan pemahaman mendalam tentang Google Spreadsheet dan Google Data Studio.

b) Adaptif

Integrasi data memerlukan penyesuaian cara data disiapkan atau ditampilkan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pengaturan dan format data sesuai dengan kebutuhan visualisasi.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf g UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas akuntabilitas merujuk pada integrasi data secara transparan dengan menyediakan informasi yang jelas dan terstruktur.

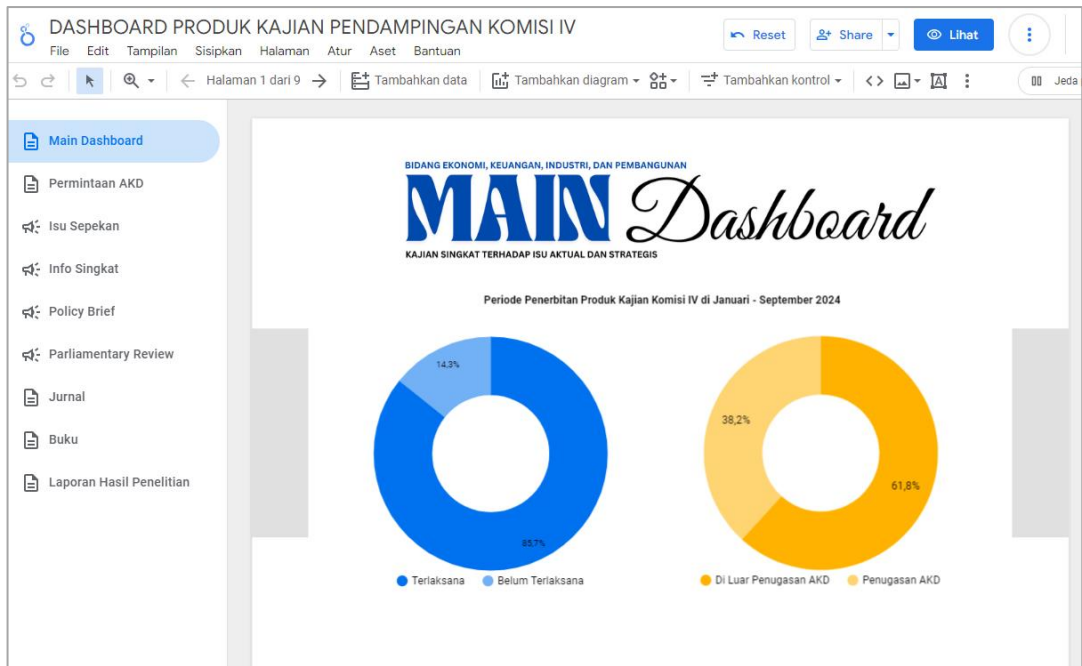
b) SMART ASN

Kegiatan ini terkait dengan kompetensi digital siklus yang merujuk pada penyusunan *database* melalui Google Spreadsheet dan mampu mengintegrasikan data tersebut untuk divisualisasikan.

d. Melakukan desain *dashboard* Google Data Studio dengan visual yang interaktif dan informatif

1) Deskripsi Hasil Kegiatan

Setelah proses integrasi data, dilakukan pengembangan dan desain *dashboard* Google Data Studio terhadap produk kajian diantaranya isu sepekan, info singkat, *policy brief*, *parliamentary review*, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian dalam rentang waktu Januari – September 2024. *Dashboard* ini memuat 9 menu utama diantaranya 1 menu *main dashboard*, 1 menu permintaan AKD, dan 7 menu produk kajian. *Dashboard* ini diharapkan menjadi media monitoring Kepala Pusat Analisis Keparlemenan terhadap penugasan oleh AKD khususnya di Bidang Ekuinbang Komisi IV.



Gambar 5.10 *Main Dashboard* Produk Kajian

DASHBOARD PRODUK KAJIAN PENDAMPINGAN KOMISI IV

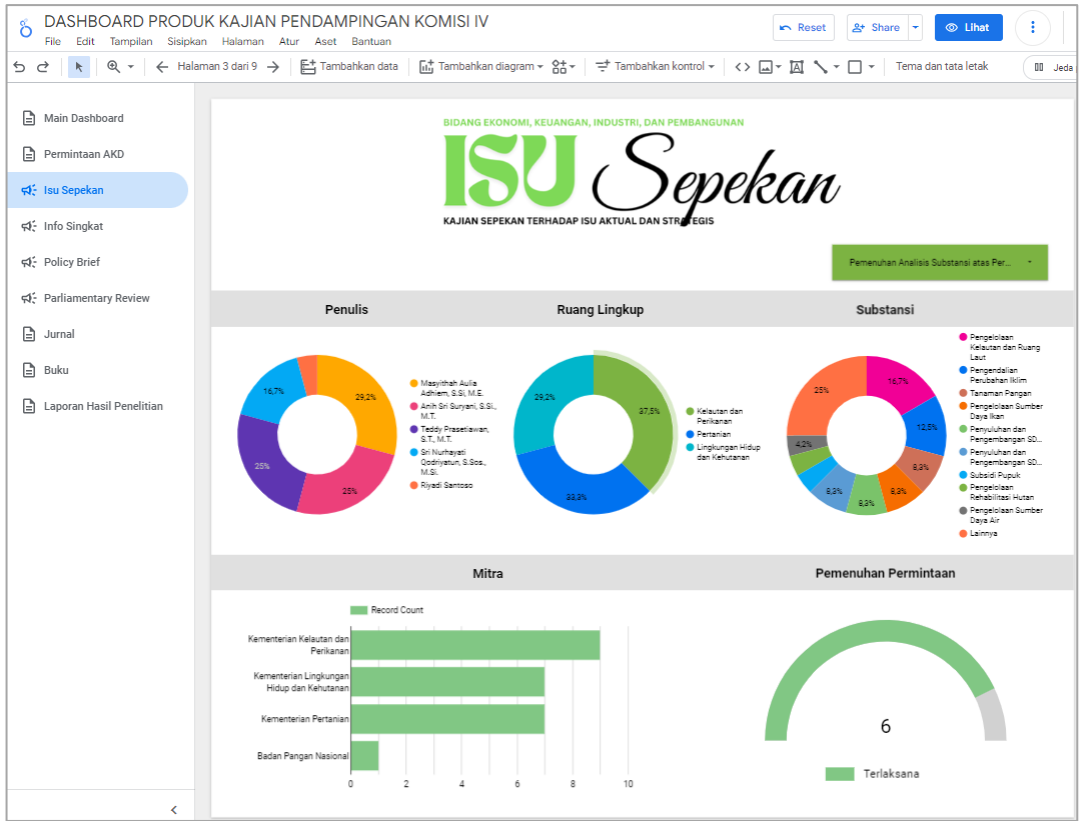
HEAT TABLE
 PEMENUHAN ANALISIS SUBSTANSI ATAS PERMINTAAN AKD TAHUN 2024

Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)	Isu Sepekan	Info Singkat	Policy Brief	Parliamentary Review	Jurnal	Buku	Laporan Penelitian	Total
1. Urgensi Penyusunan RUU Sumber Daya Genetik	1	0	0	0	0	0	0	1
2. Tata Kelola Perunggasan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tata Kelola Kebijakan PIT	1	0	0	0	0	0	0	1
4. Pengawasan Penanganan Limbah B3 dan Pengelolaan Sampah	0	1	1	0	0	0	0	2
5. Pengawasan Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon dan Perdagangan Karbon	2	1	0	0	0	0	0	3
6. Analisa UU Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	0	0	0	0	0	0	1
7. Analisa UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	4	1	0	0	0	0	0	5

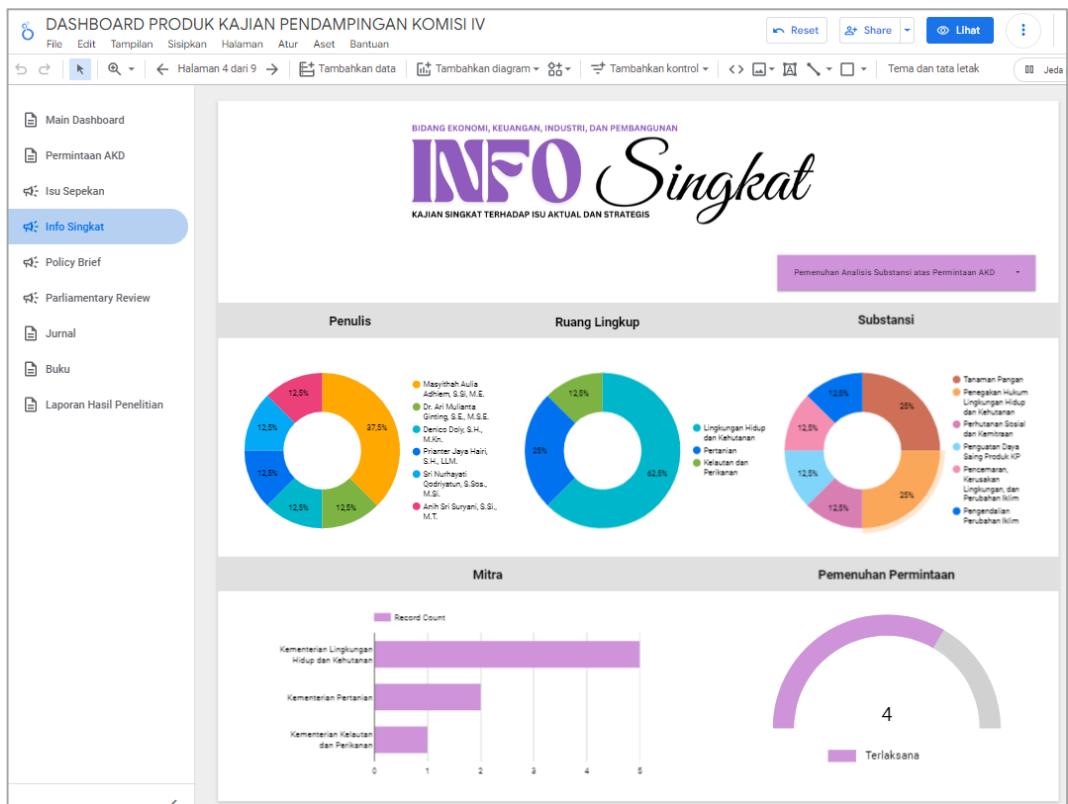
*) Kontur warna menunjukkan kuantitas produk kajian

Data Terakhir Diperbarui: 2/10/2024 13:48:38

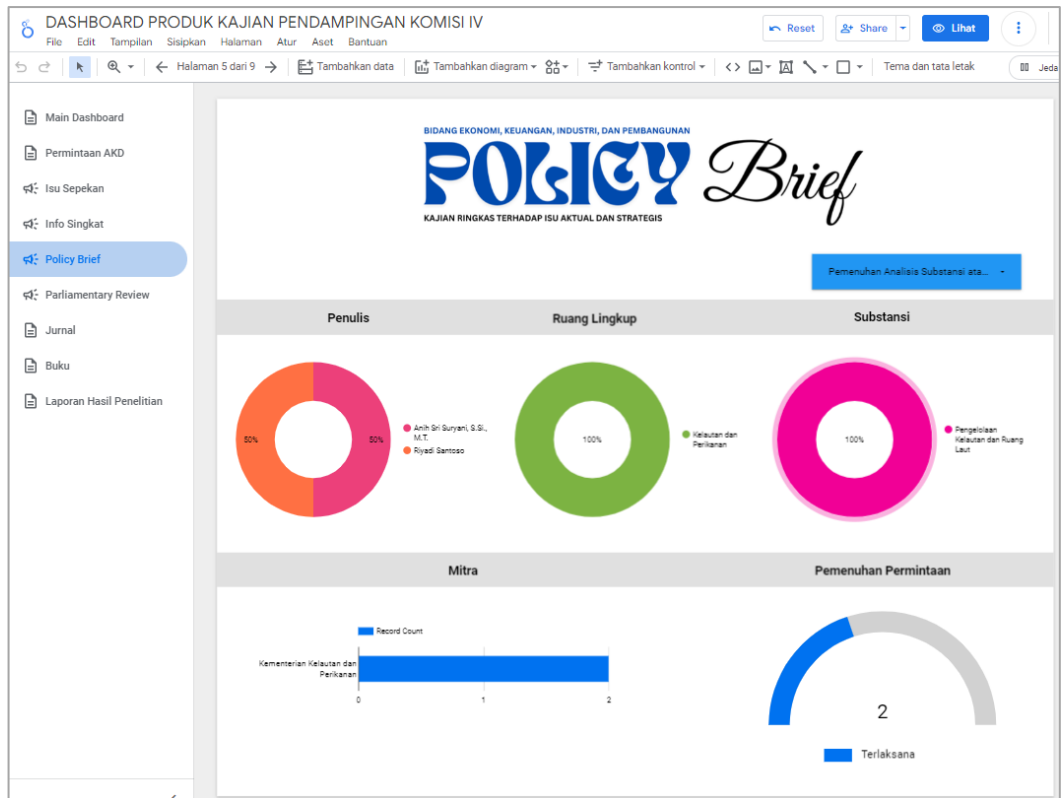
Gambar 5.11 *Heat Table* Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan AKD



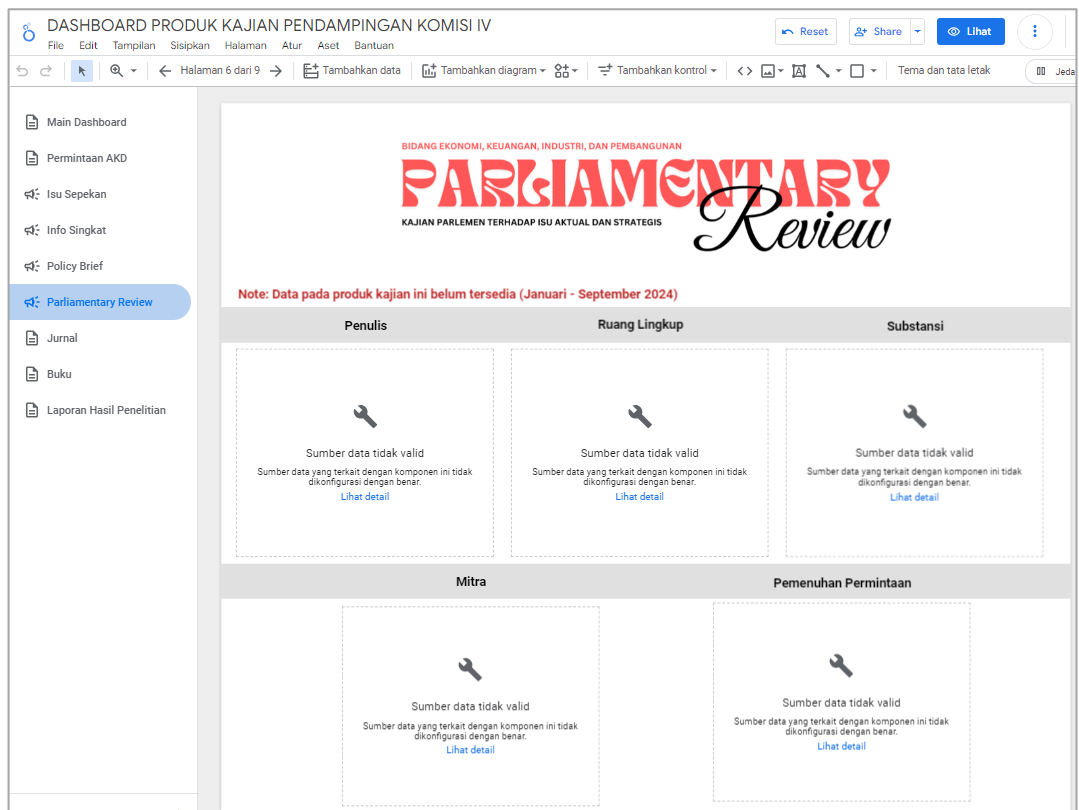
Gambar 5.12 Dashboard Isu Sepekan



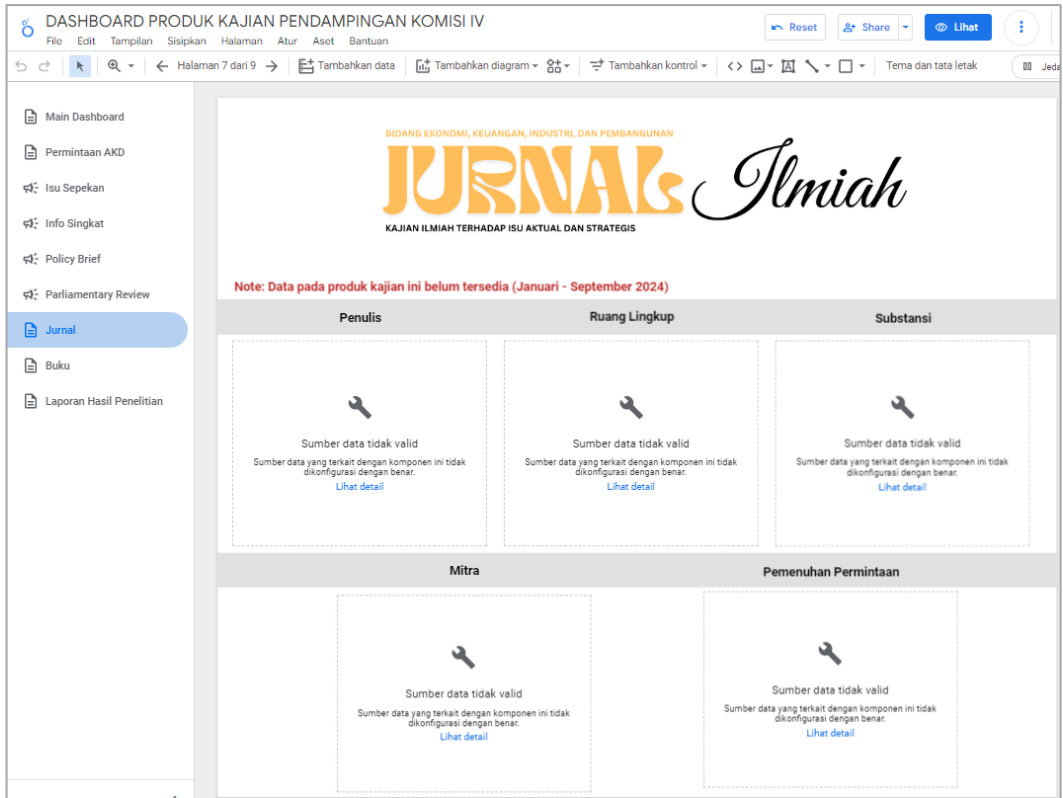
Gambar 5.13 Dashboard Info Singkat



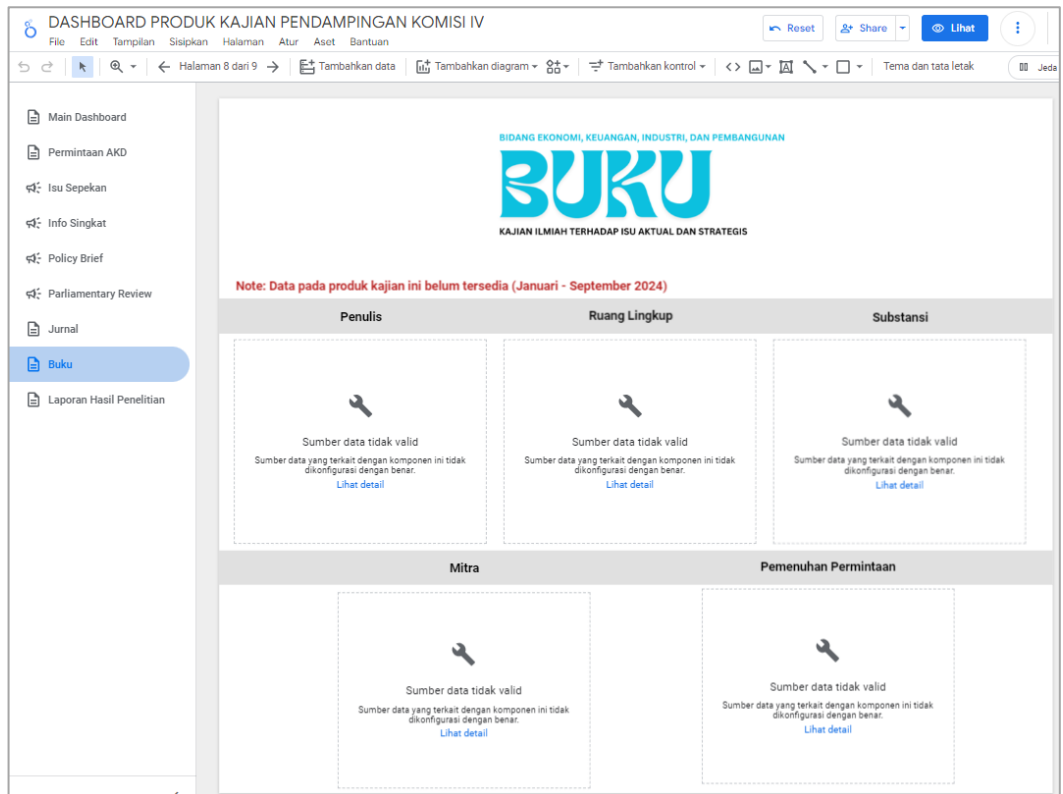
Gambar 5.14 *Dashboard Policy Brief*



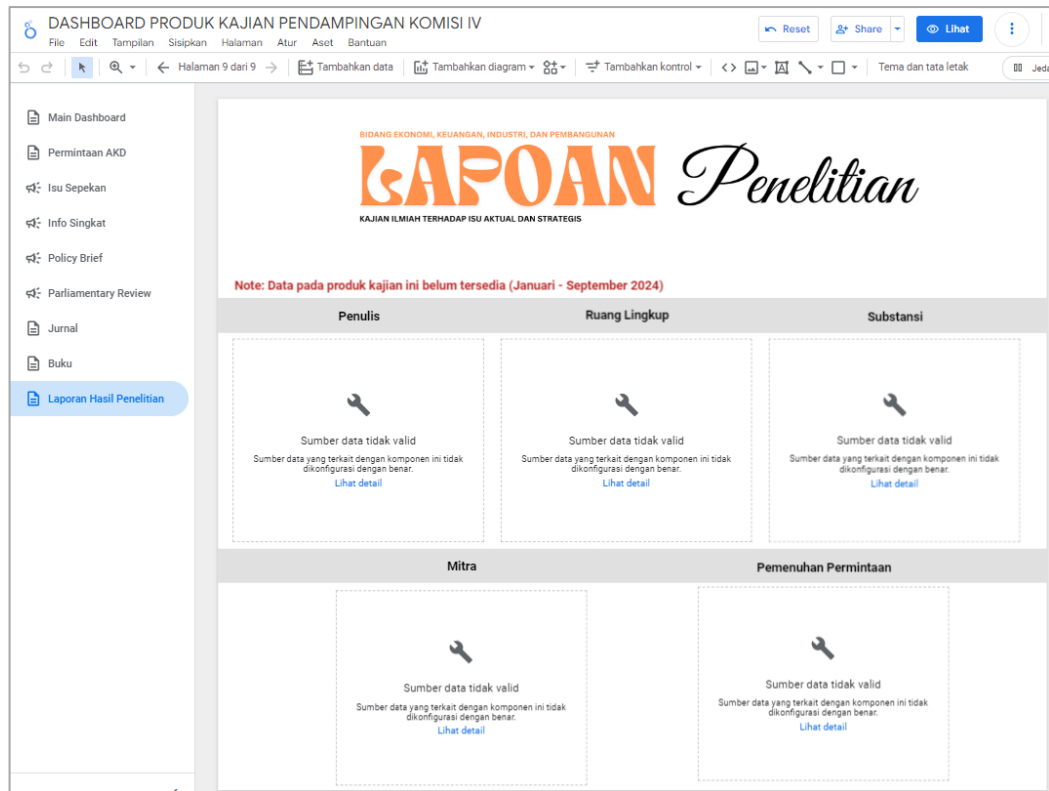
Gambar 5.15 *Dashboard Parliamentary Review*



Gambar 5.16 Dashboard Jurnal Ilmiah



Gambar 5.17 Dashboard Buku



Gambar 5.18 *Dashboard* Laporan Hasil Penelitian

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Akuntabel

Desain *dashboard* yang akuntabel juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan informasi yang *reliable* sehingga AKD mampu memahami dan menilai keandalan dan kredibilitas informasi yang disajikan.

b) Kompeten

Kemampuan dalam desain grafis dan prinsip-prinsip visualisasi data menjadi hal esensial sehingga *dashboard* produk kajian lebih informatif dan interaktif.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf h UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas efektivitas dan efisiensi merujuk pada desain *dashboard* yang interaktif dan informatif sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan Google Data Studio untuk mendesain *dashboard*, proses visualisasi data menjadi lebih efisien.

b) SMART ASN

Kegiatan ini terkait dengan konsep *digital skills* yang merujuk pada keterampilan untuk mendesain elemen visual dan interaktif yang mempermudah interpretasi data.

e. Koordinasi dengan Mentor terkait hasil pengembangan Google Data Studio

1) Deskripsi Hasil Kegiatan

Adapun masukan dari Mentor yaitu pada *heat table* perlu diberikan keterangan yang menyebutkan bawah perbedaan kontur warna menunjukkan frekuensi produk kajian. Selanjutnya, angka “0” pada *heat table* sebaiknya dihilangkan. Serta, perlu dilakukan *cross check* data kembali untuk memastikan tidak ada data produk kajian yang salah.

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Kolaboratif

Kerja sama dengan mentor dan rekan kerja Komisi IV terkait hasil pengembangan Google Data Studio.

b) Adaptif

Adanya masukan dan koreksi dari mentor sehingga diperlukan pendekatan adaptif atas perubahan pada rancangan yang ada.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf i UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas keterbukaan merujuk pada koordinasi pengembangan *dashboard* untuk memastikan bahwa data disajikan dalam format yang transparan dan mudah dipahami.

b) SMART ASN

Kegiatan ini terkait dengan *digital culture* yang merujuk pada penerapan budaya kolaborasi dan komunikasi efektif dalam menggunakan Google Data Studio.

3. Actuating (Aktualisasi penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian kepada Analis Legislatif)

a. Diseminasi penggunaan Google Data Studio dan Uji Coba Penggunaan Google Data Studio

1) Deskripsi Hasil Kegiatan

Diseminasi/sosialisasi hasil aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Analis Legislatif Pusaka Angkatan XII dilaksanakan dengan sistem presentasi paralel pada Selasa, 24 September 2024 di Ruang Rapat Pusaka Lantai 2, Gedung Nusantara I. Pada sosialisasi yang dilakukan, penulis memaparkan prosedur inventarisasi data terhadap produk kajian diantaranya isu sepekan, info singkat, *policy brief*, *parliamentary review*, jurnal, buku, dan laporan hasil penelitian. Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan pengembangan *interactive dashboard* menggunakan Google Data Studio. Adapun masukan dari Analis Legislatif terhadap aktualisasi penulis diantaranya:

- a) Perlu ditampilkan grafik/diagram terkait total pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD.
- b) Untuk setiap penugasan atas permintaan AKD sebaiknya dibuat kategorisasi pemenuhan analisis substansi yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi.
- c) Untuk setiap penugasan atas permintaan AKD juga diperlukan untuk menjawab bahwa penugasan tersebut dipenuhi dengan produk kajian apa saja, mengingat bahwa pemenuhan penugasan oleh AKD tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi setidaknya minimal 1 (satu) produk kajian.
- d) Produk kajian yang diinventarisasi tidak hanya bersumber dari *website* Pusaka tetapi juga perlu dilengkapi dengan kajian yang telah dilakukan meskipun belum tersedia di *website*.



Gambar 5.19 Diseminasi Penggunaan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian



bit.ly/DashboardKomisi4

Gambar 5.20 *Barcode* dan Tautan Akses ke Dashboard Produk Kajian Komisi IV

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Berorientasi Pelayanan

Selama diseminasi, penting untuk memastikan bahwa *interactive* dashboard dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna seperti AKD dan Analisis Legislatif.

b) Harmonis

Selama proses diseminasi, penting untuk membangun hubungan positif dengan pengguna dan memastikan semua pihak merasa dihargai dan didengarkan.

c) Adaptif

Uji coba *tools* terkadang memunculkan masalah teknis atau kebutuhan tambahan yang tidak terduga sehingga adaptasi yang cepat dan efektif perlu dilakukan untuk mengatasinya.

d) Loyal

Loyalitas terhadap kualitas produk kajian yang dihasilkan berarti melakukan uji coba dengan perhatian penuh dan memastikan *dashboard* memenuhi standar tinggi dan kebutuhan AKD dan Analisis Legislatif.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf i UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas keterbukaan merujuk pada keterlibatan *stakeholder* terkait

untuk memahami penggunaan Google Data Studio sebagai *dashboard* produk kajian.

b) SMART ASN

Kegiatan ini terkait dengan konsep literasi digital berupa *digital culture* dengan mengintegrasikan penggunaan *dashboard* dalam budaya kerja kolaboratif.

b. Melakukan uji coba penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian di Komisi IV

1) Deskripsi Hasil Analisis

Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* dapat berfungsi dengan baik untuk inventarisasi produk kajian di Komisi IV

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Adaptif

Uji coba *tools* terkadang memunculkan masalah teknis atau kebutuhan tambahan yang tidak terduga sehingga adaptasi yang cepat dan efektif perlu dilakukan untuk mengatasinya.

b) Loyal

Loyalitas terhadap kualitas produk kajian yang dihasilkan berarti melakukan uji coba dengan perhatian penuh dan memastikan dashboard memenuhi standar tinggi dan kebutuhan AKD dan Analisis Legislatif.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf d UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas keterpaduan merujuk pada koordinasi antar tim dalam uji coba penggunaan Google Data Studio sehingga dapat memastikan *dashboard* terintegrasi dengan sistem *database*.

b) SMART ASN

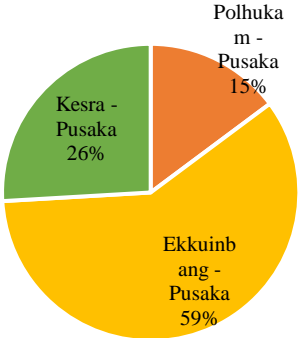
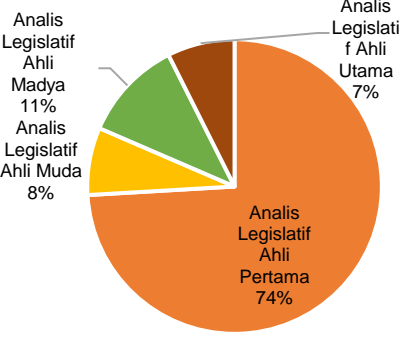
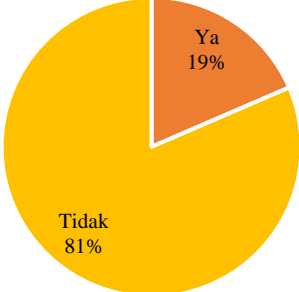
Kegiatan ini terkait dengan kecakapan menggunakan media digital (*digital skills*). Dalam hal ini menguji keterampilan teknis dalam menggunakan Google Data Studio untuk memastikan semua fitur *dashboard* berfungsi sebagaimana diharapkan.

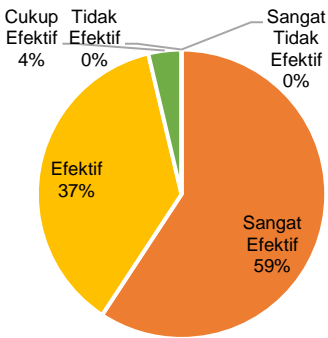
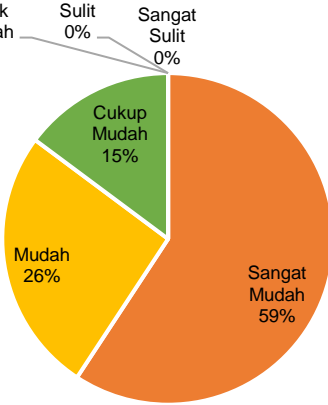
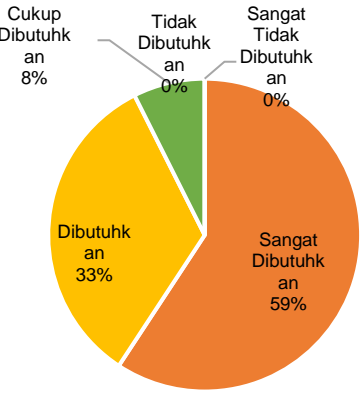
4. **Controlling** (Pelaporan evaluasi pelaksanaan kegiatan)

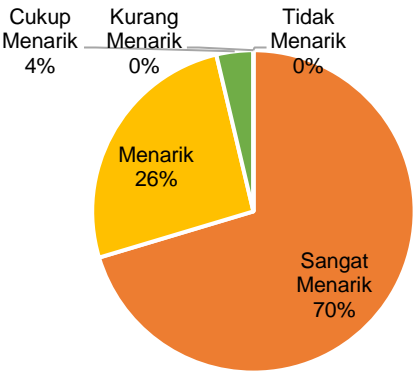
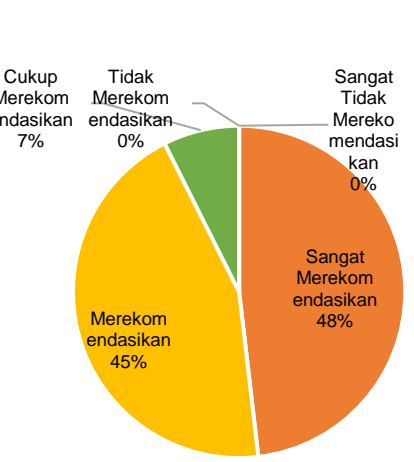
a. **Evaluasi penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian di Komisi IV**

1) **Deskripsi Hasil Kegiatan**

Tabel 5.2. Hasil Evaluasi Penggunaan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* produk kajian di Komisi IV

No.	Hasil	Deskripsi
1.	Bidang – Unit Kerja	
	 <p>Polhukam - Pusaka 15%</p> <p>Kesra - Pusaka 26%</p> <p>Ekkuinbang - Pusaka 59%</p>	<p>Sebanyak 27 responden yang menjadi subjek survei evaluasi kegiatan aktualisasi ini. Persentase terbesar yaitu dari bidang Ekkuinbang 59% (16 responden), bidang Kesra 26% (7 responden), dan bidang Polhukam (4 responden).</p>
2.	Jabatan	
	 <p>Analisis Legislatif Ahli Utama 7%</p> <p>Analisis Legislatif Ahli Pertama 74%</p> <p>Analisis Legislatif Ahli Madya 11%</p> <p>Analisis Legislatif Ahli Muda 8%</p>	<p>Adapun proporsi responden yang tertinggi dari Analisis Legislatif Ahli Pertama sebesar 74% (20 responden), Analisis Legislatif Ahli Madya sebesar 11% (3 responden), dan yang terendah dari Analisis Legislatif Ahli Muda dan Utama masing-masing sebesar 7% (2 responden).</p>
3.	Apakah sebelumnya Anda mengetahui adanya media/tools monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD?	
	 <p>Ya 19%</p> <p>Tidak 81%</p>	<p>Mayoritas responden sebelumnya belum mengetahui adanya media/<i>tools</i> monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD yaitu sebesar 81% (22 responden) dan hanya sebagian kecil diantaranya yang sebelumnya mengetahui yaitu sebesar 19% (5 responden).</p>
4.	Setelah mengakses <i>prototype Interactive Dashboard</i> , apakah Google Data Studio efektif digunakan sebagai media monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD?	

	 <p>A pie chart illustrating the effectiveness of the interactive dashboard. The largest segment is 'Sangat Efektif' at 59%, followed by 'Efektif' at 37%. 'Cukup Efektif' accounts for 4%, while 'Tidak Efektif' and 'Sangat Tidak Efektif' both represent 0%.</p>	<p>Setelah mengakses <i>prototype</i> dimaksud, sebanyak 59% (16 responden) menyatakan <i>interactive dashboard</i> sangat efektif digunakan dan sebanyak 37% (10 responden) menyatakan efektif. Sedangkan, responden lainnya menyatakan cukup efektif sebesar 4% (1 responden). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Google Data Studio sebagai <i>Interactive Dashboard</i> sangat efektif (>80%) digunakan sebagai media monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD.</p>
<p>5. Bagaimana penilaian Anda terhadap kemudahan memahami informasi data produk kajian yang disajikan di Google Data Studio?</p>	 <p>A pie chart showing the ease of understanding data. The majority, 59% (16 respondents), found it 'Sangat Mudah'. Other categories include 'Mudah' at 26%, 'Cukup Mudah' at 15%, and 'Tidak Mudah', 'Sulit', and 'Sangat Sulit' all at 0%.</p>	<p>Terkait kemudahan memahami informasi data di <i>interactive dashboard</i>, mayoritas 59% (16 responden) menyatakan sangat mudah memahami, sebanyak 26% (7 responden) menyatakan mudah memahami, dan paling sedikit 15% (4 responden) menyatakan cukup mudah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (>80%) mudah memahami informasi data dimaksud.</p>
<p>6. Apakah informasi terkait ruang lingkup bidang dan substansi di setiap produk kajian sangat dibutuhkan oleh Analisis Legislatif untuk melakukan analisis substansi?</p>	 <p>A pie chart indicating the need for information. 59% (16 respondents) stated it was 'Sangat Dibutuhkan', 33% (9 respondents) stated it was 'Dibutuhkan', and 8% (2 respondents) stated it was 'Cukup Dibutuhkan'. 'Tidak Dibutuhkan' and 'Sangat Tidak Dibutuhkan' both represent 0%.</p>	<p>Terkait kebutuhan akan informasi ruang lingkup bidang dan substansi di setiap produk kajian, mayoritas 59% (16 responden) menyatakan sangat dibutuhkan, sebanyak 33% (9 responden) menyatakan dibutuhkan, dan yang menjawab cukup dibutuhkan hanya sebagian kecil yaitu 8% (2 responden). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (>80%) membutuhkan informasi terkait ruang lingkup bidang dan substansi di setiap produk kajian.</p>
<p>7. Bagaimana penilaian Anda terhadap visualisasi infografis pada <i>dashboard</i> tersebut?</p>		

	 <p>Cukup Menarik 4% Kurang Menarik 0% Menarik 26% Sangat Menarik 70% Tidak Menarik 0%</p>	<p>Terkait visualisasi infografis pada <i>dashboard</i>, mayoritas responden 70% (19 responden) menyatakan sangat menarik, sebanyak 26% (7 responden) menyatakan menarik, dan paling sedikit 4% (1 responden) menyatakan cukup menarik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (>80%) menyatakan visualisasi infografis pada <i>dashboard</i> menarik.</p>
8.	Apakah Anda merekomendasikan media monitoring ini untuk diterapkan di seluruh lingkup bidang di Pusaka?	
	 <p>Cukup Merekomendasikan 7% Tidak Merekomendasikan 0% Sangat Merekomendasikan 48% Merekomendasikan 45% Sangat Tidak Merekomendasikan 0%</p>	<p>Terkait rekomendasi penerapan media monitoring di seluruh lingkup bidang di Pusaka, mayoritas 48% (13 responden) sangat merekomendasikan media monitoring ini, sebanyak 45% (12 responden) menjawab merekomendasikan, dan paling sedikit menjawab cukup merekomendasikan yaitu 7% (2 responden). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (>80%) merekomendasikan media monitoring ini untuk diterapkan di seluruh lingkup bidang di Pusaka.</p>
9.	Berikan saran mengenai <i>prototype</i> Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan AKD?	
	<p>Adapun saran responden dari hasil kuesioner terhadap <i>prototype</i> Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan AKD, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu adanya panduan penggunaan Google Data Studio sebagai <i>Interactive Dashboard</i> Produk Kajian. Diharapkan ada penjelasan pada tab <i>Main Dashboard</i> bahwa data tersebut adalah produk kajian yang diterbitkan di tahun 2024. Sisanya sudah sangat baik dan perlu diimplementasikan di komisi lainnya untuk monitoring baik untuk Analisis Legislatif dan AKD. Perlu penunjukan <i>dashboard tracking</i> dalam bentuk isu yang belum terpenuhi dari yang telah di kreditkan di awal tahun dan perlu adanya integrasi dengan data Microsoft yang disediakan oleh DPR seperti akun portal dan Simfoni. <i>Dashboard</i> serupa dapat dibuat menggunakan Microsoft Power BI. Mungkin lebih baik memanfaatkan aplikasi Microsoft agar penggunaan aplikasi ini dapat dioptimalkan, dibandingkan dengan menggunakan <i>platform</i> Google. Perlu adanya pengembangan <i>dashboard</i> di Bidang Kesra dan Polhukam. 	

	<p>f. <i>Follow up</i> terkait kegunaan lanjutan tentang monitoring pengelompokan isu-isu dan produk-produk Pusaka. Pertanyaan "<i>What's next</i>" menjadi hal yang bisa dijadikan rekomendasi untuk utilisasi monitoring ini.</p> <p>g. Perlu perbaikan pada penulisan judul <i>dashboard</i> produk kajian dari “Lapoaan Penelitian” menjadi “Laporan Penelitian”.</p> <p>h. Perlu dilengkapi lagi datanya, misalnya untuk <i>Parliamentary Review</i> dari Januari s.d. September sudah terbit sebanyak tiga kali.</p> <p>i. Sumber data kajian analisis atas permintaan AKD perlu ditambahkan kajian yang tidak diterbitkan, seperti laporan penguatan analisis atas permintaan AKD, laporan penguatan analisis terhadap RUU dalam daftar Prolegnas, kajian atas permintaan AKD. Selain itu, juga dapat ditambahkan kajian yang diterbitkan di jurnal yang ada di Pusat Analisis Keparlemenan.</p> <p>j. Sebaiknya setelah berjalan sekian waktu, perlu evaluasi dan tanggapan dari AKD/anggota DPR terkait manfaat aplikasi tersebut dalam mendukung tugas dan fungsinya.</p>
--	---

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Akuntabel

Dalam rapat evaluasi, penting untuk menyajikan informasi dan data di Google Data Studio secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Kolaboratif

Rapat evaluasi harus dilakukan dengan suasana yang mendukung diskusi terbuka dan kolaboratif.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf c UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas proporsionalitas merujuk pada sejauh mana rapat evaluasi dapat menilai penggunaan Google Data Studio sebagai *dashboard* memenuhi tujuan yang diharapkan.

b) SMART ASN

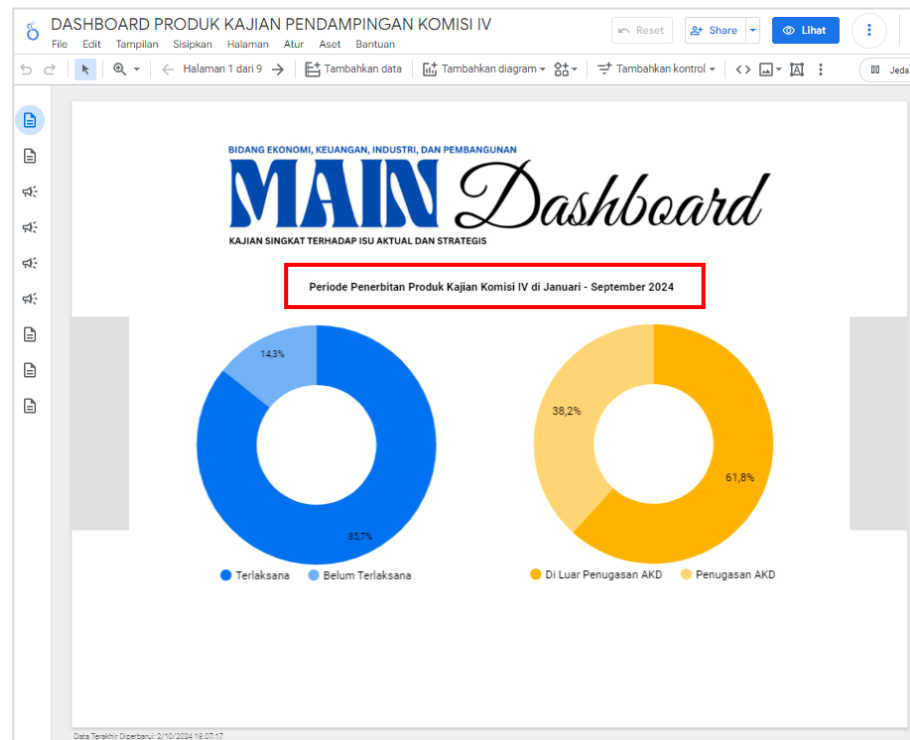
Kegiatan ini terkait dengan *digital ethics* yang mana dapat menilai sejauh mana data dalam *dashboard* disajikan dengan transparan dan akurat serta memastikan evaluasi mencakup aspek etika penggunaan *dashboard*.

b. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi

1) Deskripsi Hasil Kegiatan

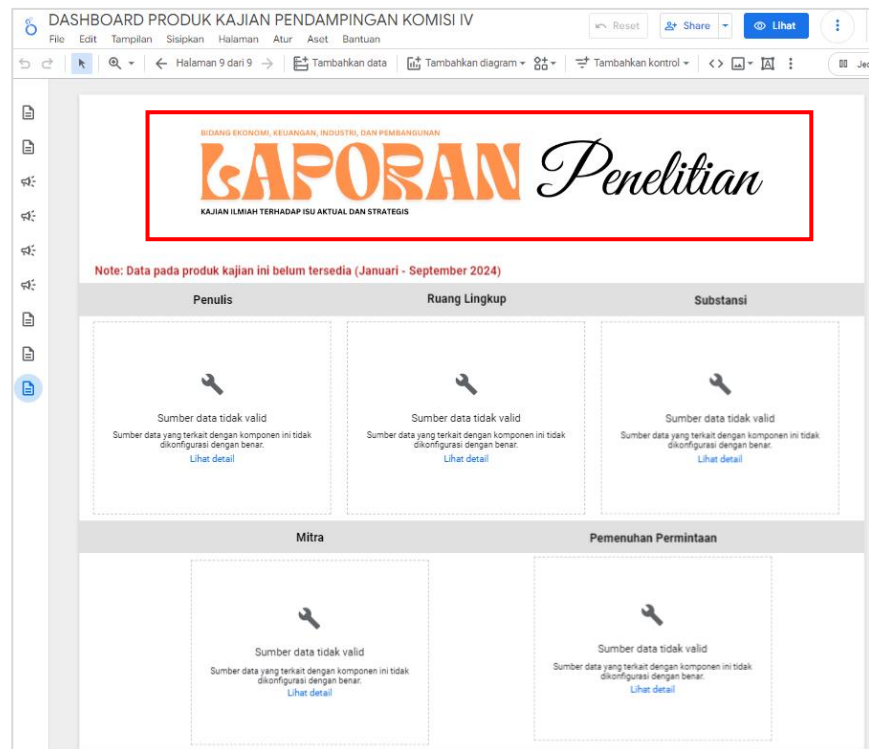
Adapun perbaikan secara teknis dari hasil evaluasi yang dapat dilakukan, antara lain:

- a) Penambahan penjelasan pada tab *Main Dashboard* terkait periode penerbitan produk kajian Komisi IV di Januari – September 2024.



Gambar 5.21 Penambahan Menu *Main Dashboard* Produk Kajian Komisi IV

- b) Perbaiki kesalahan penulisan (*typo*) dari “Lapoan Penelitian” menjadi “Laporan Penelitian”.



Gambar 5.22 Perbaikan kesalahan penulisan (*typo*)

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Adaptif

Kemampuan secara cepat dan efektif menyesuaikan perbaikan di *dashboard* dari hasil evaluasi yang diterima selama rapat.

b) Loyal

Loyalitas terhadap kualitas produk atau layanan berarti berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa *dashboard* memenuhi standar tinggi.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf h UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas efektivitas dan efisiensi merujuk pada draf perbaikan hasil rapat evaluasi harus dirancang untuk memastikan perbaikan yang diterapkan dapat mencapai hasil yang diinginkan secara efektif.

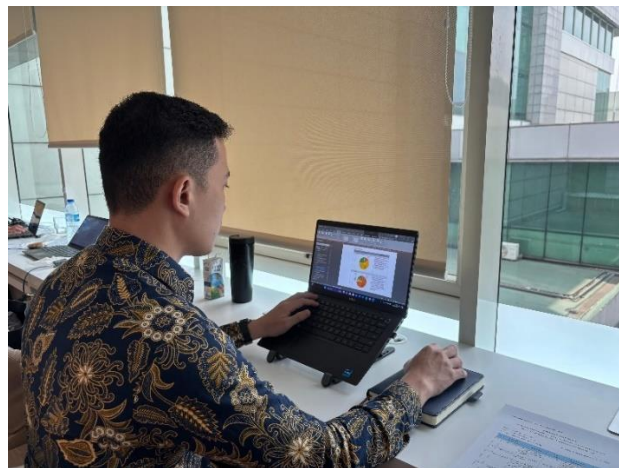
b) SMART ASN

Kegiatan ini terkait dengan konsep *digital skills* dalam mengkomunikasikan perubahan dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi sehingga pengembangan Google Data Studio bisa lebih optimal.

c. Penyusunan laporan akhir aktualisasi

1) Deskripsi Hasil Kegiatan

Pada tahapan kegiatan ini, Penulis melakukan penyempurnaan laporan akhir aktualisasi terutama dalam hal kegiatan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*).



Gambar 5.23 Dokumentasi Pengerjaan Finalisasi Laporan Hasil

2) Keterkaitan dengan Nilai ASN BerAKHLAK

a) Kompeten

Laporan akhir harus disusun dengan menggunakan keterampilan analisis dan penyajian data yang baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi dalam laporan akhir akurat dan didasarkan pada data yang valid.

b) Loyal

Menunjukkan loyalitas dengan memastikan bahwa laporan akhir aktualisasi mendukung dan selaras dengan visi dan misi organisasi khususnya unit kerja Pusaka.

3) Keterkaitan dengan Manajemen dan SMART ASN

a) Manajemen ASN

Kegiatan ini terkait dengan Pasal 2 huruf b UU No. 20/2023 tentang ASN, bahwa asas profesionalitas menekankan pada draf laporan akhir aktualisasi harus disusun dengan cermat, memperhatikan detail, dan memberikan Gambaran yang akurat dan menyeluruh tentang hasil aktualisasi.

b) SMART ASN

Kegiatan ini terkait erat dengan *digital skills* melalui penggunaan alat dan teknik untuk analisis dan penyajian data, *digital culture* melalui kolaborasi dan integrasi budaya digital, *digital safety* melalui perlindungan data dan dokumen, serta *digital ethics* melalui transparansi, akurasi, dan perlindungan privasi. Dengan memperhatikan keempat aspek literasi digital ini, laporan akhir dapat disusun secara efektif, aman, dan etis, memenuhi standar profesional dan organisasi yang diharapkan.

C. Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tugas/Fungsi/Tujuan Organisasi

1. *Planning* (Perencanaan)

Kegiatan perencanaan dalam pengembangan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusaka sebagaimana diatur dalam Pasal 298 jo. Pasal 299 huruf a Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen DPR RI, bahwa persiapan yang matang memastikan data yang relevan tersedia

untuk mendukung pelaksanaan tugas Pusaka dalam proses analisis, asistensi, dan ekspose produk kajian dengan ketersediaan *database*.

Kegiatan ini sangat relevan dalam mendukung tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permen PANRB No. 11/2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif. Tahap persiapan dapat memastikan ketersediaan data yang relevan untuk analisis, perencanaan menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas *database*, dan koordinasi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berfungsi dengan baik dan mendukung tujuan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis. Dengan demikian, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja Analis Legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara optimal.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 298 jo. Pasal 299 huruf b Persekjen DPR RI No. 3/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI No. 6/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Seten DPR RI, bahwa kegiatan penyusunan *database* produk kajian yang lengkap dan terintegrasi membantu dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dengan memberikan informasi yang relevan dan *up-to-date*, yang penting untuk proses pembuatan kebijakan berbasis data. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 jo. Pasal 299 huruf e Persekjen DPR RI No. 3/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI No. 6/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen DPR RI, bahwa *dashboard* dapat memberikan dukungan evaluasi hasil analisis dengan menyajikan data yang terintegrasi dan visualisasi yang mendukung penugasan AKD kepada Pusaka.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Permen PANRB No. 11/2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, bahwa penyusunan *database* yang terstruktur dan komprehensif mendukung Analis Legislatif dalam melakukan analisis substansi dengan menyediakan akses mudah ke data yang relevan dan historis, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan efektif. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Permen PANRB No. 11/2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, bahwa dengan Google Data Studio, dapat mendukung Analisis Substansi yang mana Analis Legislatif dapat mengakses dan menganalisis data produk kajian secara dinamis. *Dashboard* yang interaktif memungkinkan pemantauan tren, identifikasi substansi/ruang lingkup bidang, dan evaluasi kebijakan secara *real-time*. Selain itu, pada Pasal 7 huruf c, dengan Google Data Studio, dukungan Ekspose hasil analisis oleh Analis Legislatif dapat disajikan dalam format visual yang interaktif dan menarik.

Dashboard menyajikan data secara *real-time*, sehingga memudahkan AKD menginterpretasikan tindak lanjut penugasan yang diberikan.

3. Actuating (Pengaktualisasian)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 298 jo. Pasal 299 huruf c Persekjen DPR RI No. 3/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI No. 6/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen DPR RI, bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Asistensi, dan Ekspose, *dashboard* Google Data Studio mendukung kegiatan analisis dengan menyajikan data secara interaktif dan visual. Ini memudahkan asistensi kepada AKD dengan memberikan akses cepat dan jelas ke informasi penting, serta memudahkan ekspose hasil analisis dengan cara yang lebih efektif dan mudah dipahami.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permen PANRB No. 11/2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, bahwa dengan memanfaatkan Google Data Studio, Analis Legislatif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mendukung pembuatan keputusan berbasis data, dan memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif.

4. Controlling (Pengendalian)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 298 jo. Pasal 299 huruf h Persekjen DPR RI No. 3/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI No. 6/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen DPR RI, bahwa dalam hal Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, evaluasi terhadap efektivitas penggunaan *dashboard* menjadi tahapan yang paling penting. Evaluasi akan menilai *beberapa* efektif Google Data Studio dalam mendukung tugas-tugas Pusaka, termasuk dalam hal analisis, asistensi, dan ekspose. Ini mencakup penilaian terhadap akurasi data, kemudahan penggunaan, dan dampak terhadap pengambilan keputusan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Permen PANRB No. 11/2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, bahwa pelaporan evaluasi pelaksanaan pengembangan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* akan memberikan pemahaman mendalam kepada AKD mengenai keunggulan *dashboard* dalam hal asistensi hasil kajian oleh Analis Legislatif.

D. Stakeholders

Dalam rancangan aktualisasi yang sebelumnya telah disusun, kegiatan yang direncanakan akan melibatkan rekan kerja Analis Legislatif di Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan (Ekkuinbang) Komisi IV, unit kerja Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka). Selain itu, kegiatan aktualisasi ini melibatkan mentor dari Analis Legislatif dan *coach* dari

Widyaiswara untuk memberikan masukan secara teknis dan substansi selama pelaksanaan kegiatan. Dalam masa habituasi, terdapat penambahan *stakeholder* dalam lingkup yang lebih luas yaitu Analisis Legislatif di Pusaka, yang mana tidak hanya terbatas pada satu lingkup bidang Ekuinbang saja tetapi juga melibatkan bidang Kesra dan Polhukam. Penyesuaian ini dilakukan dengan tujuan agar *dashboard* yang dikembangkan bisa diimplementasikan secara masif di seluruh lingkup bidang di Pusaka.

E. Capaian Kegiatan Aktualisasi

Tahap kegiatan disusun berdasarkan *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC). Tahap kegiatan dimaksud dilakukan dalam pengembangan sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD menggunakan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian. Capaian kegiatan aktualisasi ini, sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan)

Pada kegiatan *Planning*, tahap kegiatan yang dilakukan yaitu koordinasi dengan mentor dan rekan kerja mengenai perencanaan dan persiapan pengembangan *dashboard* produk kajian di Komisi IV. **Keterukuran** dari kegiatan ini yaitu frekuensi sesi konsultasi dengan mentor dan rekan kerja yang dilakukan minimal 1 kali pertemuan di setiap tahap kegiatan, serta penjelasan terkait gagasan penyelesaian isu kurangnya monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD menggunakan Google Data Studio. Selanjutnya, **keterujian** dari kegiatan ini yaitu terlaksananya 1 kali pertemuan dengan mentor dan 1 kali pertemuan dengan rekan kerja komisi IV untuk membahas terkait persiapan dan perencanaan pengembangan *dashboard* produk kajian.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pada kegiatan ini dilaksanakan inventarisasi data produk kajian Bidang Ekuinbang Komisi IV pada periode penerbitan dari Januari – September 2024 dan juga dilakukan pengembangan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian. **Keterukuran** dari kegiatan ini yaitu kuantitas produk kajian yang diinventarisasi sebanyak 29 produk kajian dan *dashboard* pada Google Data Studio sebanyak 8 menu. **Keterujian** dari kegiatan ini yaitu telah diinventarisasikannya produk kajian sebanyak 34 produk dan pengembangan *dashboard* sebanyak 9 menu. Adapun menu yaitu terkait dengan *main dashboard* yang menampilkan persentase pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD.

3. *Actuating* (Pengaktualisasian)

Pada kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi/diseminasi penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian. **Keterukuran** dari kegiatan ini yaitu terlaksananya diseminasi kepada 9 Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV. **Keterujian** dari kegiatan ini yaitu telah terlaksananya diseminasi kepada 9 Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV dan juga penambahan *stakeholder* lainnya yaitu Analis Legislatif di lingkup bidang Pusaka dengan total peserta sosialisasi sebanyak 39 orang.

4. *Controlling* (Pengendalian)


Pada kegiatan ini dilaksanakan evaluasi penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian. Evaluasi dimaksud dengan tujuan untuk memberikan masukan dan koreksi terkait pengembangan *dashboard* agar kedepannya dapat lebih bermanfaat bagi unit kerja Pusaka. **Keterukuran** dari kegiatan ini yaitu diukur dari hasil kuesioner dengan tingkat efektivitas, kemudahan, dan kebutuhan penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian > 80% (skor 5 dan 4). **Keterujian** dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan evaluasi menggunakan kuesioner yang berisi 9 pertanyaan dengan total 27 responden. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat efektivitas, kemudahan, dan kebutuhan penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian > 80%, yang artinya gagasan penyelesaian terhadap isu kurangnya monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD menggunakan Google Data Studio adalah sangat sesuai untuk diimplementasikan di unit kerja.



F. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Selama masa habituasi pelaksanaan aktualisasi tentunya tidak terlepas dengan adanya kendala. Dengan perencanaan yang matang dengan menyusun beberapa strategi menghadapi kendala, dapat menjadi sebuah bentuk mitigasi yang dapat meminimalisir terhambatnya pelaksanaan aktualisasi. Selama masa habituasi ini, terdapat beberapa kendala baru yang ditemukan yang kemudian dilakukan perumusan strategi menghadapi kendala.

No.	Kendala	Strategi Menghadapi Kendala	Pelaksanaan
1.	Masalah teknis pada sarana yang akan digunakan selama kegiatan rapat dan diseminasi. 	Melakukan persiapan dengan memastikan peralatan teknis berfungsi dengan baik dan menyiapkan <i>backup equipment</i> (peralatan cadangan).	Terlaksana

No.	Kendala	Strategi Menghadapi Kendala	Pelaksanaan
2.	<p>Kurangnya keterampilan atau pengetahuan terkait penggunaan Google Data Studio di lingkup Analis Legislatif Ekkuinbang Komisi IV.</p>	<p>a. Mengkomunikasikan tujuan dan manfaat penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian di Pusaka.</p> <p>b. Menyelenggarakan pelatihan mengenai litegasi digital dan mekanisme penyusunan <i>database</i> di Google Spreadsheet serta proses integrasi data ke Google Data Studio.</p> <p>c. Strategi jangka panjang, diperlukan rekrutmen ahli IT dan spesialis data yang dapat membantu untuk pengembangan <i>tools</i> yang lebih andal.</p>	<p>Poin a dan b terlaksana dengan baik melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi yang dilakukan.</p> <p>Selanjutnya, poin c saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat masih dalam tahap habituasi dan tentunya harapan jangka panjangnya dapat direalisasikan.</p>
3.	<p>Tantangan teknis dalam penyusunan <i>database</i> dari 7 (tujuh) produk kajian di Pusaka.</p>	<p>a. Menyusun rencana kerja dan <i>schedule</i> dalam proses inventarisasi dan identifikasi substansi/ruang lingkup bidang di setiap produk kajian yang telah terbit pada periode Januari – Agustus 2024.</p> <p>b. Menginventarisasi dokumen produk kajian dalam <i>One Drive</i> Microsoft 365.</p>	<p>Terdapat penambahan periode inventarisasi data produk kajian yaitu Januari – September 2024. Penambahan ini merupakan masukan dari mentor agar produk kajian yang diintegrasikan ke <i>interactive dashboard</i> dapat dihabituisasikan dan kedepannya terus berjalan.</p>

No.	Kendala	Strategi Menghadapi Kendala	Pelaksanaan
4.	Ketidaksesuaian waktu untuk mengadakan sosialisasi dengan beberapa senior Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV. 	Mengingat <i>prototype</i> ini dikhususkan produk kajian Komisi IV, maka peran dan keterlibatan senior Analis Legislatif di komisi tersebut sangatlah penting. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan diseminasi/sosialisasi melalui <i>WhatsApp</i> dengan mengirimkan tautan berisikan <i>dashboard</i> produk kajian Komisi IV yang telah dikembangkan.	Terlaksana

*) Keterangan:  (kendala sebelum pelaksanaan) dan  (kendala selama pelaksanaan)

G. Analisis Dampak Kegiatan Aktualisasi

Adapun analisis dampak dari gagasan penyelesaian isu terkait “Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV” diuraikan dalam jangka waktu (pendek, menengah, dan panjang), sebagai berikut:

1. Dampak Jangka Pendek

a. Peningkatan Dukungan kepada AKD

Melalui integrasi digital yang baik, penggunaan Google Data Studio memudahkan Kepala Pusaka dalam monitoring pemenuhan analisis substansi terkait penyusunan tema isu aktual/strategis atas permintaan AKD kepada Analis Legislatif di Komisi IV dan memudahkan Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan kepada AKD secara *real-time*.

b. Peningkatan Efisiensi Akses Informasi

Dengan diimplementasikannya Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian, diharapkan Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV dapat menyusun *database* lebih efisien sehingga pencarian substansi/ruang lingkup

dari produk yang sebelumnya belum tersedia dapat dioptimalkan sebagai suatu bentuk kemudahan dalam penulisan isu aktual/strategis berikutnya.

c. Kemudahan dalam Visualisasi Data

Penggunaan *interactive dashboard* akan memudahkan Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV dalam menyajikan data dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami.

d. Penyesuaian Teknologi

Dalam jangka pendek, Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV akan mengalami proses internalisasi adaptif atau penyesuaian terhadap penggunaan *digital platform* baru ini. Diseminasi tentunya diperlukan untuk memastikan semua pengguna memahami fitur-fitur di Google Data Studio dengan optimal.

2. Dampak Jangka Menengah

a. Pengembangan Kompetensi Digital

Penggunaan Google Data Studio secara berkelanjutan akan meningkatkan literasi digital tidak hanya Analis Legislatif di Bidang Ekkuinbang Komisi IV tetapi juga lebih luas di lingkup Bidang Kesra dan Bidang Polhukam, sehingga pengembangan kompetensi digital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Legislatif dapat berjalan optimal.

b. Integrasi Data yang Lebih Optimal

Dalam jangka menengah, diharapkan bahwa semua produk kajian di semua bidang Pusaka dapat diintegrasikan ke dalam *database* dan *dashboard* secara komprehensif. Hal ini akan memudahkan dalam pencarian substansi/ruang lingkup isu pada lintas bidang di Pusaka dan dapat memfasilitasi penyusunan laporan unit kerja berbasis data.

c. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan tersedianya data yang lebih terstruktur dan dapat diakses dengan mudah, transparansi dalam pengelolaan data dan hasil kajian akan meningkat. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas Pusaka dalam mendukung fungsi dan tugas AKD, terutama dalam hal pelaksanaan dukungan evaluasi hasil analisis keparlemen (Pasal 299 huruf e Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Persekjen DPR RI No. 6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI).

3. Dampak Jangka Panjang

a. Transformasi Digital di Pusaka

Implementasi *interactive dashboard* akan menjadi bagian dari transformasi digital yang lebih luas di Pusaka yang memudahkan dalam monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tidak hanya penugasan tahunan tetapi juga permintaan secara insidental.

b. Pengembangan Sistem yang Lebih Terintegrasi

Penggunaan Google Data Studio dapat menjadi langkah awal menuju pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi di Pusaka. Dalam jangka panjang, unit kerja Pusaka dapat mengembangkan *digital platform* yang lebih canggih yang mengintegrasikan berbagai data dan fungsi analitis untuk mendukung tugas dan fungsi legislatif.

c. Kebijakan Publik yang Lebih Berkualitas

Dengan ketersediaan data yang lebih baik dan analisis yang lebih mendalam, produk-produk kajian yang dihasilkan oleh Pusaka akan semakin berkualitas. Hal tersebut akan berdampak positif pada kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh DPR RI, yang lebih responsif terhadap isu-isu strategis dan aktual.

PENUTUP

A. Simpulan

Melalui penyusunan aktualisasi ini, Penulis akan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Jabatan Fungsional Analis Legislatif. Nilai-nilai tersebut, seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, akan diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan kegiatan aktualisasi. Selain itu, Penulis juga akan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen ASN dan nilai SMART ASN yang menuntun pada kinerja yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Dalam upaya mengaktualisasikan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, Penulis telah melakukan identifikasi isu-isu yang terjadi di unit kerja Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) dan memilih isu prioritas yaitu belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar penyebab terjadinya isu ini yaitu tidak adanya sistem *database* yang terintegrasi untuk produk kajian diantaranya isu sepekan, info singkat, *policy brief*, *parliamentary review*, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian. Oleh karena itu, gagasan kreatif penyelesaian isu yaitu *Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai Interactive Dashboard Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV)*. Urgensi dari gagasan kreatif ini yaitu memudahkan dalam monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD. Selain itu, gagasan kreatif ini akan memudahkan penulis (Analis Legislatif) dalam mencari produk kajian berdasarkan kategori substansi/ruang lingkup kajian yang sebelumnya telah terbit untuk kemudian dijadikan sebagai referensi penulisan isu aktual/strategis berikutnya. Hasil survei penggunaan dan pengembangan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* menunjukkan tingkat efektivitas, kemudahan, dan kebutuhan penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian > 80%, yang artinya gagasan penyelesaian terhadap isu terkait kurangnya monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD menggunakan Google Data Studio adalah sangat sesuai untuk diimplementasikan di Bidang Ekkuinbang Komisi IV secara khusus dan unit kerja Pusat Analisis Keparlemenan secara umum.

B. Saran

Melalui proses aktualisasi monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD menggunakan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard*, terdapat beberapa saran untuk mengoptimalkan implementasi gagasan tersebut, antara lain perlu adanya panduan penggunaan, pengembangan di seluruh bidang di unit kerja Pusaka, dan integrasi dengan data Microsoft yang disediakan oleh DPR seperti akun portal dan aplikasi Simfoni, serta setelah berjalan sekian waktu, perlu evaluasi dan tanggapan dari AKD/anggota DPR terkait urgensi *dashboard* tersebut dalam mendukung tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Fernando, D. (2018). Visualisasi Data Menggunakan Google Data Studio. *Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Teknologi Informasi (SNARTISI)*, 1, 71–77.
- Holifahtus Sakdiyah, S., Eltivia, N., & Afandi, A. (2022). Root Cause Analysis Using Fishbone Diagram: Company Management Decision Making. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 566–576. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.103>
- Lembaga Administrasi Negara RI. (2008). *Isu Aktual Sesuai Tema: Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III* (Vol. 62, Issue 21).
- Salem, R., Sompah, A. T., & Muharram, S. (2021). Urgency Analysis and Identification of Weaknesses in Implementation of Accountability System Performance of Government Institutions (Sakip) Tanah Bumbu Regency 2015-2021. In *International Journal of Politic, Public Policy and Environment Issues* (Vol. 1, Issue 1).
- Wahjono, S. I., Mulya, M. A. P., & Si, M. (2024). *Implementasi POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) di Perusahaan PT Gudang Garam TBK*.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023> (diakses 5 Agustus 2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5831/pp-no-11-tahun-2017> (diakses pada 7 Agustus 2024).
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/132019/perpres-no-26-tahun-2020> (diakses pada 7 Agustus 2024).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Legislatif. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216627/permen-pan-rb-no-11-tahun-2022> (diakses pada (8 Agustus 2024).
- Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Tersedia pada: https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_sekjen/2020persekjendpr010.pdf (diakses pada 15 Agustus 2024).
- Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik


Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen DPR RI.
Tersedia pada: https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_sekjen/2023persekjendpr003.pdf (diakses pada 14 Agustus 2024).

LAMPIRAN

LAMPIRAN
LAPORAN MINGGU KE 1- 4

LAPORAN AKTUALISASI MINGGU KE - 1

Nama : Rahmat Sawalman
 NIP : 199702242024041001
 Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka)
 Isu : Belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka
 Gagasan : Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV)

No.	Kegiatan	<i>Evidence</i>
1.	<p><i>Planning (Perencanaan)</i> Persiapan, perencanaan, dan koordinasi dengan mentor dan rekan kerja Komisi IV</p> <p>a. Koordinasi untuk menyampaikan rancangan aktualisasi</p>	<p>Daftar Hadir (Terlampir)</p> <p>Draft Notulensi (Terlampir)</p> <p>Dokumentasi</p> 

	
<p>b. Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi persiapan penyusunan <i>database</i> produk kajian.</p>	<p>Draft Notulensi (Terlampir)</p> <p>Dokumentasi</p> 

Jakarta, 4 September 2024

Mengetahui,

Mentor

Coach



Emi Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 199403222020122001



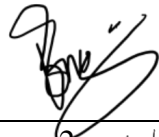






Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
NIP. 198003252009121001

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2024

Tempat : Ruang Ekkuinbang Pusaka Lt. 2, Gedung Nusantara I

Agenda : Koordinasi Penyampaian Rancangan Aktualisasi

NO.	NAMA	NIP	TTD
1.	Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.	198003252009121001	1. 
2.	Anugrah Juwita Sari, S.T., M.M.	199007112024042001	2. 
3.	Megatrikania Kendali, S.T., M.Si.	199312192024042001	3. 
4.	Rizki Mona Syawlia, S.Si., M.T.	199503252024042001	4. 
5.	Fauzan Lazuardi Ramadhan, S.Si., M.Si.	199701132024041001	5. 
6.	Rahmat Sawalman, S.Kel., M.Si.	199702242024041001	6. 
7.	Firyal Nabihah, S.T., M.Si	200001212024042002	7. 

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2024
Tempat : Ruang Ekkuinbang Pusaka Lt. 2, Gedung Nusantara I
Agenda : Koordinasi Penyampaian Rancangan Aktualisasi

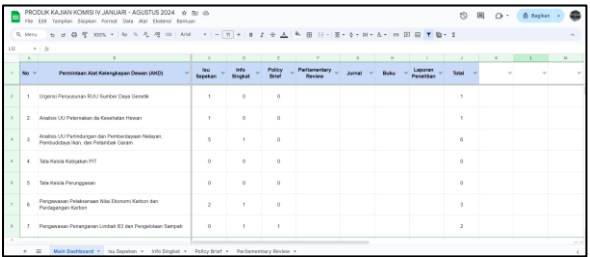
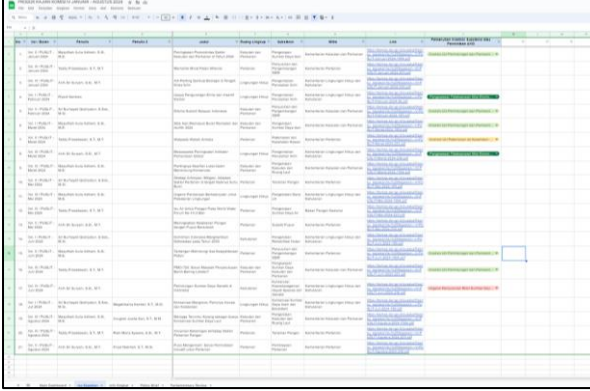
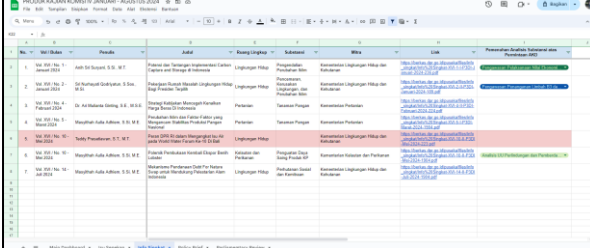
Adapun pokok-pokok pembahasan pada agenda ini sebagai berikut:

- a. Adapun isu unit kerja Pusaka yang diangkat pada kegiatan habituasi rancangan aktualisasi yaitu terkait belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka. Berdasarkan akar penyebab dari isu tersebut maka gagasan kreatif penyelesaian isu yaitu monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV).
1. Pada pertemuan ini, disampaikan proses inventarisasi data dan *prototype* pengembangan *interactive dashboard* menggunakan Google Data Studio. Inventarisasi data menggunakan aplikasi Google Spreadsheet terhadap produk kajian diantaranya isu sepekan, info singkat, *policy brief*, *parliamentary review*, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian dalam rentang waktu Januari – Agustus 2024. Selanjutnya, dilakukan integrasi *database* Google Spreadsheet ke Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian. *Dashboard* ini memuat 8 menu utama diantaranya 1 menu *main dashboard* yang berisi *heat table* pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD Tahun 2024 dan 7 menu produk kajian. *Dashboard* ini diharapkan menjadi media monitoring Kepala Pusat Analisis Keparlemenan terhadap penugasan oleh AKD khususnya di Bidang Ekkuinbang Komisi IV.
2. Adapun masukan dari rekan kerja Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV yaitu pada *heat table* perlu dibuatkan legenda warna yang menunjukkan informasi bawah warna yang semakin pekat berarti kuantitas produk kajian yang terkait penugasan oleh AKD lebih banyak. Selain itu, pada menu permintaan AKD perlu dilengkapi dengan 7 (tujuh) permintaan analisis substansi atas permintaan AKD. Serta, perlu dipastikan kembali terkait grafik pelaksanaan permintaan AKD.
3. Adapun masukan dari Mentor yaitu inventarisasi data yang dilakukan nantinya perlu dipertimbangkan untuk memasukkan produk kajian yang diterbitkan di bulan September,

sehingga pada saat presentasi final dapat disampaikan secara jelas bahwa pelaksanaan aktualisasi ini akan dilanjutkan dan diaktualisasikan di unit kerja setelah masa habituasi berakhir.

LAPORAN AKTUALISASI MINGGU KE - 2

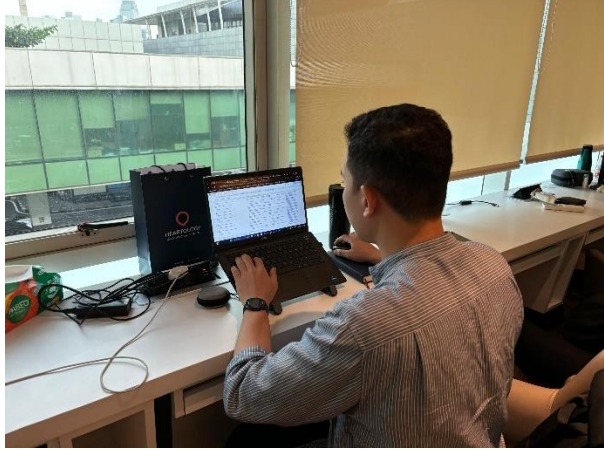
Nama : Rahmat Sawalman
 NIP : 199702242024041001
 Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka)
 Isu : Belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka
 Gagasan : Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV)

No.	Kegiatan	Evidence
1.	Organizing (Pengorganisasian) Penyusunan <i>database</i> produk kajian Komisi IV	Database
	a. Melakukan inventarisasi data dari produk kajian Komisi IV	  

No.	Meliputi	Penulis	Judul	Kategori	Sub-kategori	Media	Link	Periode Aktifitas (3 bulan atau lebih)
1	2023/24-1	Rival Simanungkalit	Ulasan Kebijakan Perumahan dan Ketersediaan Ruang Publik Kota	Kategori dan Sub-kategori	Pengalaman Kajian dan Survei	Kontribusi Kajian dan Perbaikan	https://doi.org/10.24090/ajp.v1i1.12345	Periode Aktifitas
2	2023/24-2	Andi Sri-Sugan, S.Si, MT	Pengembangan Konsep Perumahan dan Ketersediaan Ruang Publik Kota	Kategori dan Sub-kategori	Pengalaman Kajian dan Survei	Kontribusi Kajian dan Perbaikan	https://doi.org/10.24090/ajp.v1i1.12346	Periode Aktifitas

Catatan: Belum terdapat produk kajian *parliamentary review*, jurnal, buku, dan laporan penelitian untuk periode Januari – Agustus 2024.

Dokumentasi


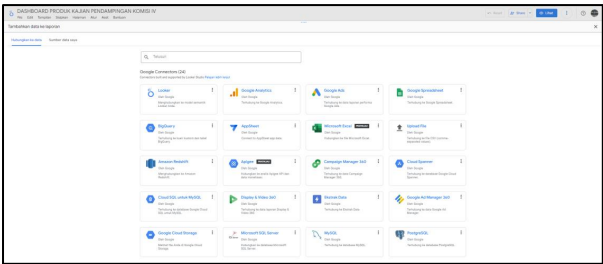


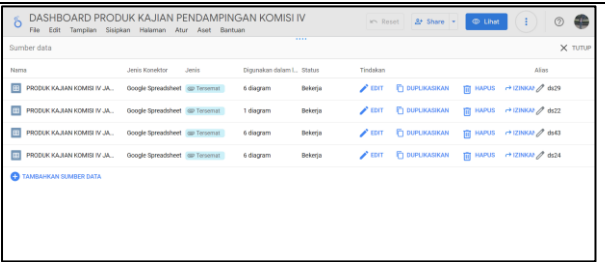
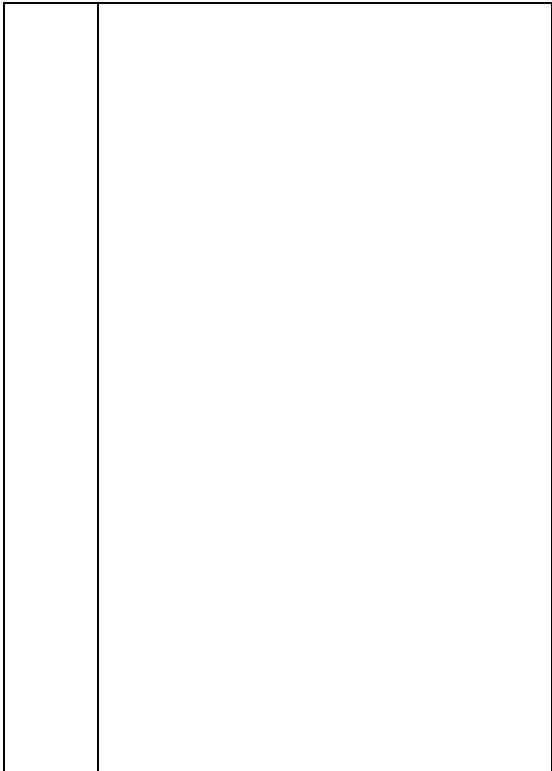
b. Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi penyusunan *database* produk kajian

Draft Notulensi
 Hari/Tanggal : Senin, 9 September 2024
 Tempat : *Co-working Space* Pusaka Lt. 2, Gedung Nusantara I
 Agenda : Koordinasi dengan mentor terkait evaluasi penyusunan *database* produk kajian

Adapun pokok-pokok pembahasan pada agenda ini sebagai berikut:

1. Pada pertemuan ini, disampaikan proses inventarisasi data menggunakan aplikasi Google Spreadsheet terhadap produk kajian diantaranya isu sepekan, info singkat, *policy brief*, *parliamentary*

		<p><i>review</i>, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian dalam rentang waktu Januari – Agustus 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam tahapan kegiatan inventarisasi data yang dilakukan terdapat catatan yang perlu penulis sampaikan yaitu produk kajian <i>parliamentary review</i>, jurnal, buku, dan laporan penelitian belum dapat dilakukan mengingat kajian belum tersedia. 3. Adapun masukan dari Mentor yaitu inventarisasi data yang dilakukan terhadap produk kajian Komisi IV sebaiknya dilakukan hingga bulan September, sehingga produk kajian yang belum tersedia bisa dilengkapi. <p>Dokumentasi</p> 
2.	<p><i>Organizing (Pengorganisasian)</i> Pembuatan dan pengembangan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian Komisi IV</p>	
	<p>a. Melakukan integrasi <i>database</i> produk kajian dari Google Spreadsheets ke Google Data Studio</p>	<p>Integrasi Database</p> 

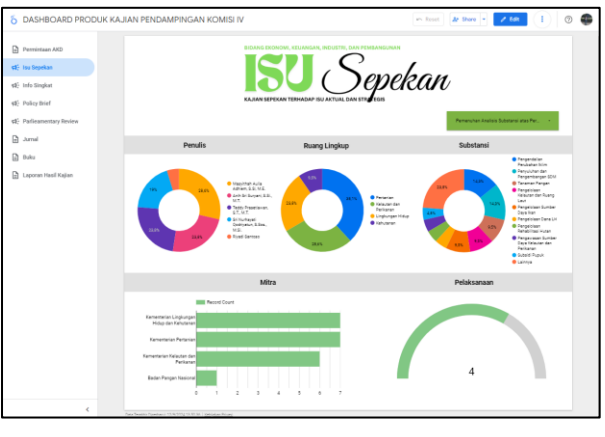
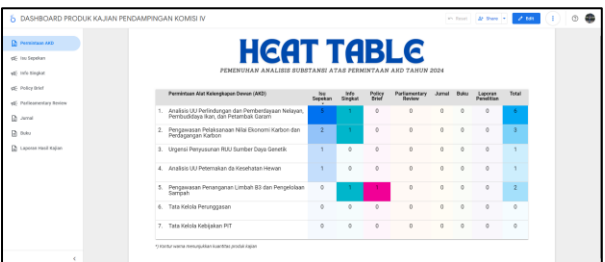


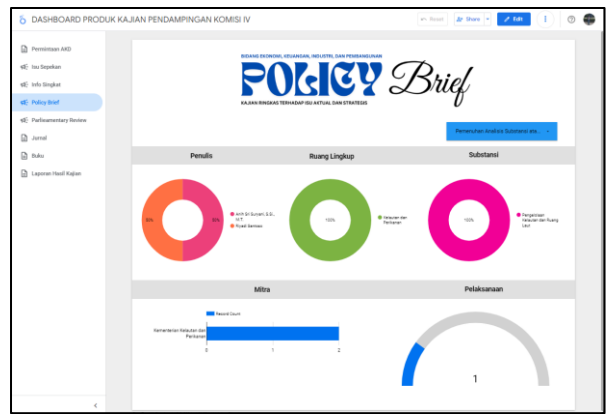
Dokumentasi



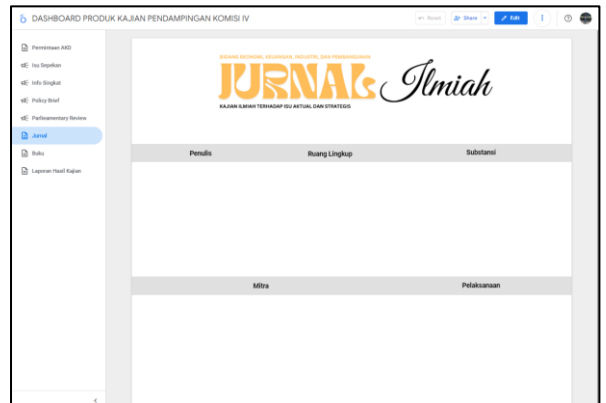
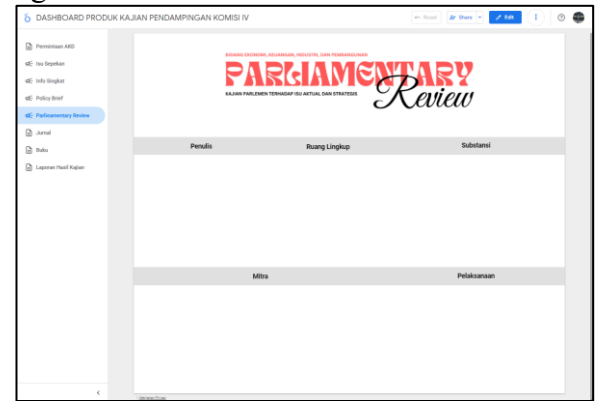
b. Melakukan desain *dashboard* Google Data Studio dengan visual yang interaktif dan informatif

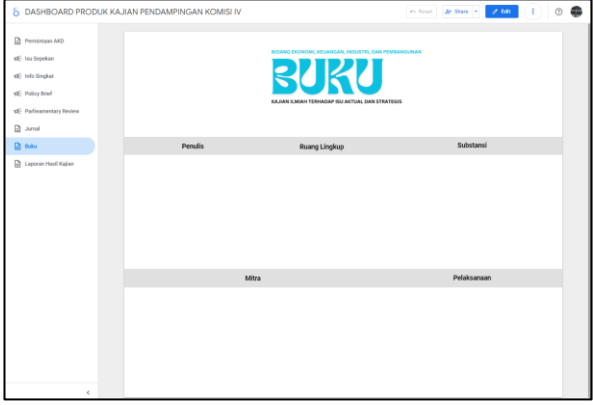
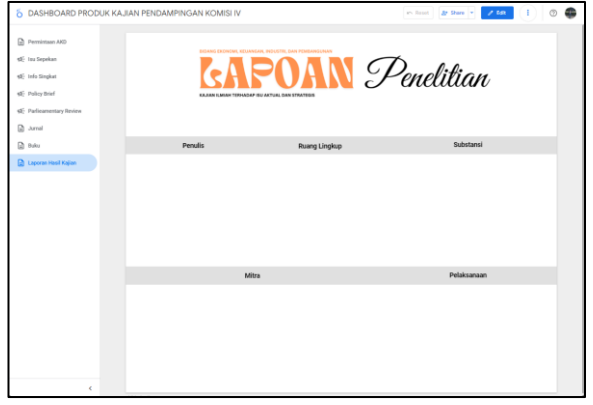
Prototype Interactive Dashboard



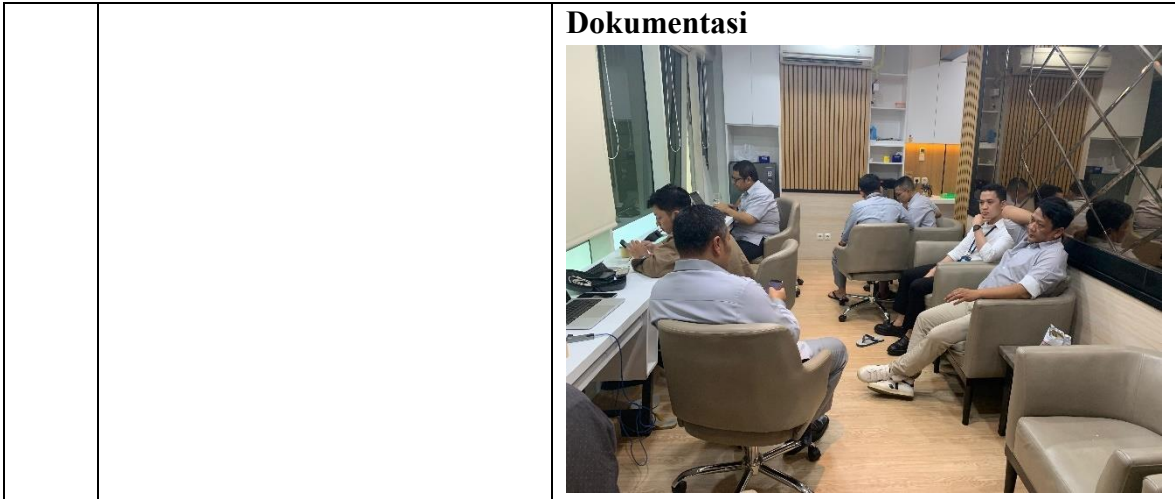


Catatan: Belum terdapat produk kajian *parliamentary review*, jurnal, buku, dan laporan penelitian untuk periode Januari – Agustus 2024.



		 
	<p>c. Koordinasi dengan Mentor terkait hasil pengembangan Google Data Studio</p>	<p>Draft Notulensi Hari/Tanggal : Kamis, 12 September 2024 Tempat : <i>Co-working Space</i> Pusaka Lt. 2, Gedung Nusantara I Agenda : Koordinasi dengan Mentor terkait hasil pengembangan Google Data Studio</p> <p>Adapun pokok-pokok pembahasan pada agenda ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pertemuan ini, disampaikan <i>prototype</i> pengembangan <i>interactive dashboard</i> menggunakan Google Data Studio terhadap produk kajian diantaranya isu sepekan, info singkat, <i>policy brief</i>, <i>parliamentary review</i>, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian dalam rentang waktu Januari – Agustus 2024. <i>Dashboard</i> ini memuat 8 menu utama diantaranya 1

		<p>menu <i>main dashboard</i> yang berisi <i>heat table</i> pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD Tahun 2024 dan 7 menu produk kajian. <i>Dashboard</i> ini diharapkan menjadi media monitoring Kepala Pusat Analisis Keparlemenan terhadap penugasan oleh AKD khususnya di Bidang Ekuinbang Komisi IV.</p> <p>2. Adapun masukan dari rekan kerja Analisis Legislatif Bidang Ekuinbang Komisi IV yaitu pada <i>heat table</i> perlu dibuatkan legenda warna yang menunjukkan informasi bahwa warna yang semakin pekat berarti kuantitas produk kajian yang terkait penugasan oleh AKD lebih banyak. Selain itu, pada menu permintaan AKD perlu dilengkapi dengan 7 (tujuh) permintaan analisis substansi atas permintaan AKD. Serta, perlu dipastikan kembali terkait grafik pelaksanaan permintaan AKD.</p> <p>3. Adapun masukan dari Mentor yaitu pada <i>heat table</i> perlu diberikan keterangan yang menyebutkan bawah perbedaan kontur warna menunjukkan frekuensi produk kajian. Selanjutnya, angka “0” pada <i>heat table</i> sebaiknya dihilangkan. Serta, perlu dilakukan <i>cross check</i> data kembali untuk memastikan tidak ada data produk kajian yang salah.</p>
--	--	---



Jakarta, 13 September 2024

Mengetahui,

Mentor



Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
NIP. 198003252009121001

Coach



Emi Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 199403222020122001

LAPORAN AKTUALISASI MINGGU KE - 3

Nama : Rahmat Sawalman
 NIP : 199702242024041001
 Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka)
 Isu : Belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka
 Gagasan : Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV)

No.	Kegiatan	<i>Evidence</i>
1.	Actuating (Aktualisasi) Aktualisasi penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian kepada Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV	
	a. Diseminasi penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian kepada Analis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV	<p>Daftar Hadir (Terlampir)</p> <p>Draf Notulensi Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024 Tempat : Ruang Rapat Pusaka Lt. 2, Gedung Nusantara I Agenda : Sosialisasi Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Analis Legislatif Pusaka Angkatan XII Tahun 2024</p> <p>Adapun pokok-pokok pembahasan pada agenda ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada sosialisasi yang dilakukan, penulis memaparkan prosedur inventarisasi data terhadap produk kajian diantaranya isu sepekan, info singkat, <i>policy brief</i>, <i>parliamentary review</i>, jurnal, buku, dan laporan hasil penelitian. Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan pengembangan <i>interactive dashboard</i> menggunakan Google Data Studio. 2. Adapun masukan dari Analis Legislatif terhadap aktualisasi penulis diantaranya:

- a. Perlu ditampilkan grafik/diagram terkait total pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD;
- b. Untuk setiap penugasan atas permintaan AKD sebaiknya dibuat kategorisasi pemenuhan analisis substansi yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi.
- c. Untuk setiap penugasan atas permintaan AKD juga diperlukan untuk menjawab bahwa penugasan tersebut dipenuhi dengan produk kajian apa saja, mengingat bahwa pemenuhan penugasan oleh AKD tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi setidaknya minimal 1 (satu) produk kajian.
- d. Produk kajian yang diinventarisasi tidak hanya bersumber dari *website* Pusaka tetapi juga perlu dilengkapi dengan kajian yang telah dilakukan meskipun belum tersedia di *website*.

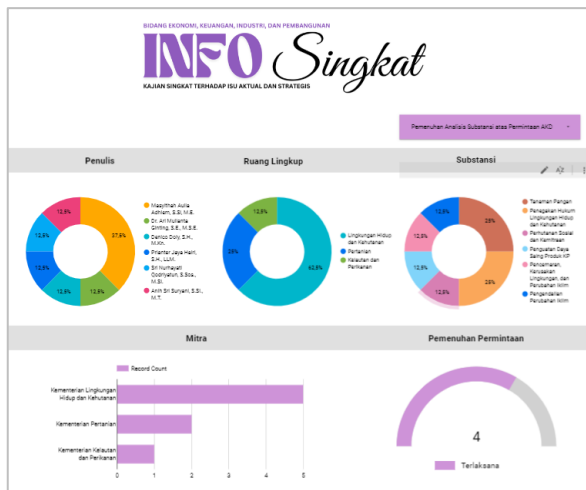
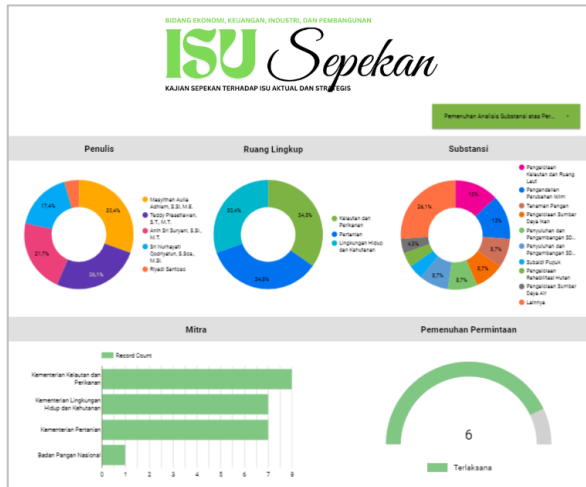
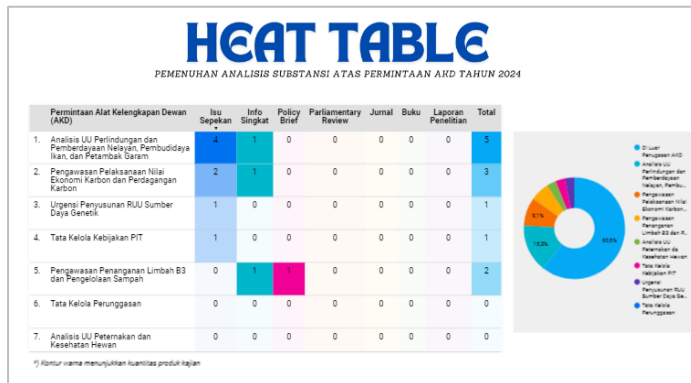
Dokumentasi





b. Melakukan uji coba penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian di Komisi IV

Prototype Google Data Studio



The screenshot displays a dashboard titled "POLICY Brief" under the heading "SIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN". The subtitle is "KAJIAN RINGKAS TERHADAP DU AKTUAL DAN STRATEGIS". A blue button at the top right says "Pemenuhan Analisis Substansi etc...".

The dashboard is divided into several sections:

- Penulis:** A donut chart showing 50% for "Aji Sri Suryani, S.Si., M.T." and 50% for "Rizki Samsia".
- Ruang Lingkup:** A donut chart showing 100% for "Kawasan dan Pohonan".
- Substansi:** A donut chart showing 100% for "Pengisian Kuota dan Ruang Laut".
- Mitra:** A horizontal bar chart for "Kementerian Kelautan dan Perikanan" with a "Record Count" of 2.
- Pemenuhan Permintaan:** A gauge chart showing a value of 2, with a legend for "Terlaksana".

At the bottom, there is a QR code and a link: bit.ly/DashboardKomisi4.

Jakarta, 25 September 2024

Mengetahui,

Mentor

Coach

Emi Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 199403222020122001

Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
NIP. 198003252009121001



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/981/KP.03.02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Jakarta, 23 September 2024

Yth.

**Analisis Legislatif dan Analis Kebijakan
Pusat Analisis Keparlemenan**

Di Tempat


Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI bermaksud mengadakan “**Sosialisasi Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Analis Legislatif Pusaka Angkatan XII Tahun 2024**”, yang akan dilaksanakan secara *hybrid* pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 September 2024
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Analisis Keparlemenan
Meeting ID : 918 5106 0656
Password : PUSAKA

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk dapat hadir dalam acara tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Analisis Keparlemenan
Acara : Sosialisasi Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Analis Legislatif Pusaka angkatan XII Tahun 2024

NO.	NAMA	INSTANSI/BIDANG	PARAF
1.	Sri Oodriyatun	Ekkuinbang	✓
2.	Edmira Rivani	Ekkuinbang	<i>Edmira</i>
3.	<i>Duhartu</i>	<i>Ekkuinbang</i>	<i>[Signature]</i>
4.	Teddy Prasetiawan	Ekkuinbang	<i>[Signature]</i>
5.	T. Ade Surya	Ekkuinbang	<i>[Signature]</i>
6.	Yosua P Samuel	Ekkuinbang	<i>[Signature]</i>
7.	Putu Ayu Dhana Reswari	Kesra	<i>[Signature]</i>
8.	Chika Agistintya	Kesra	<i>[Signature]</i>
9.	Yiyis Aidi Mebra	Ekkuinbang	<i>[Signature]</i>
10.	Uly Ngastri Pratow	Polhukam	<i>[Signature]</i>
11.	Yustina Sari	Polhukam	<i>[Signature]</i>
12.	Desty Bulondari	Polhukam	<i>[Signature]</i>
13.	Duwarti Simanguntak	Kesra	<i>[Signature]</i>
14.	Fauzan L.R	Ekkuinbang	<i>[Signature]</i>
15.	Adib Hermawan	Kesra	<i>[Signature]</i>
16.	Eva Musti G.	Kesra	<i>[Signature]</i>
17.	M. Zulfhar Emir Zanggi	Ekkuinbang	<i>[Signature]</i>
18.	Rizky Allan N.	Ekkuinbang	<i>[Signature]</i>




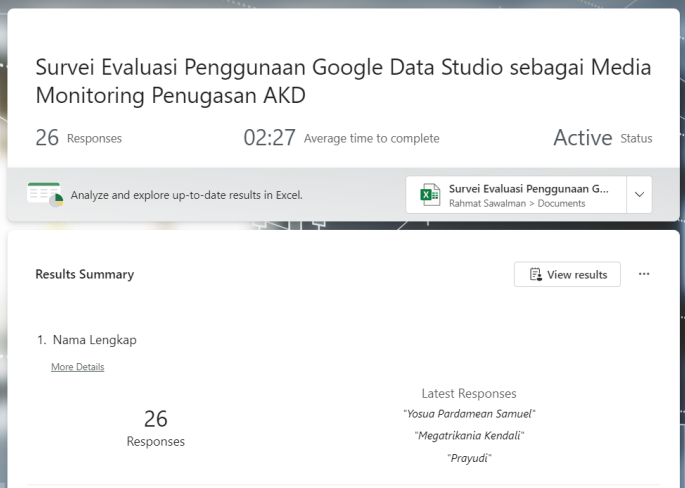
**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NO.	NAMA	INSTANSI/BIDANG	PARAF
19.	Rahmat Sawalman	Ekkuinbang	
20.	Fitria Melinda	Ekkuinbang	
21.	Ulayya Sarpina	Ekkuinbang	
22.	Denza Muia Nita	Ekkuinbang	
23.	Riza Asyari Yamin	Kesra	
24.	Nadhrah Nurul SJ	Ekkuinbang	
25.	Audry A.s	Ekkuinbang	
26.	Rezki Mona Syawlia	Ekkuinbang	
27.	Brigita Diaz P	Ekkuinbang	
28.	Megatrikania kendali	Ekkuinbang	
29.	Adhys Eka P.	Ekkuinbang	
30.	Muhammad Inson Firdaus	Ekkuinbang	
31.	M. Latik A	Ekkuinbang	
32.	Devindra Oktaviano	Poltekhan	
33.	Firyal Nabihah	Ekkuinbang	
34.	ANMERAH JUWITA GARI	EKKUINBANG	
35.	Aris Yan J. Mendrofe	EKKUINBANG	
36.	FARHAN AZZANOI	KESRA	
37.	Rahmat Sawalman	Ekkuinbang	
38.	Timothy Joseph Shekinah	KESRA	
39.	JEFFLET IVAN VINCENTI	EKKUINBANG	
40.			

LAPORAN AKTUALISASI MINGGU KE - 4

Nama : Rahmat Sawalman
 NIP : 199702242024041001
 Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka)
 Isu : Belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka
 Gagasan : Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV)

No.	Kegiatan	Evidence
1.	<p>Controlling (Pengendalian) Pelaporan evaluasi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>c. Evaluasi penggunaan Google Data Studio sebagai <i>interactive dashboard</i> produk kajian di Komisi IV</p>	<p>Dokumentasi Kegiatan (Koordinasi dengan Koordinator Pendampingan Komisi IV Bidang Ekkuinbang)</p>  <p>Hasil Kuesioner Survei Evaluasi</p> 

2. Bidang - Unit Kerja

[More Details](#) [Insights](#)

Polhukam - Pusaka	4
Ekkuinbang - Pusaka	16
Kesra - Pusaka	6



3. Jabatan

[More Details](#) [Insights](#)

Analisis Legislatif Ahli Pertama	20
Analisis Legislatif Ahli Muda	2
Analisis Legislatif Ahli Madya	2
Analisis Legislatif Ahli Utama	2



4. Apakah sebelumnya Anda mengetahui adanya media/tools monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD?

[More Details](#)

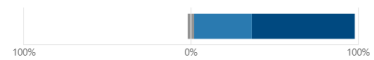
Ya	4
Tidak	22



5. Setelah mengakses prototype Interactive Dashboard, apakah Google Data Studio efektif digunakan sebagai media monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD?

[More Details](#)

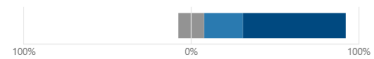
■ Tidak Efektif ■ Kurang Efektif ■ Cukup Efektif ■ Efektif ■ Sangat Efektif



6. Bagaimana penilaian Anda terhadap kemudahan memahami informasi data produk kajian yang disajikan di Google Data Studio?

[More Details](#)

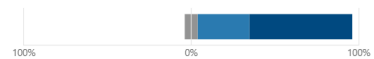
■ Sangat Sulit ■ Sulit ■ Cukup Mudah ■ Mudah ■ Sangat Mudah



7. Apakah informasi terkait ruang lingkup bidang dan substansi di setiap produk kajian sangat dibutuhkan oleh Analisis Legislatif untuk melakukan analisis substansi?

[More Details](#)

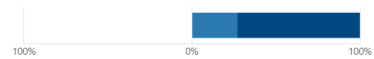
■ Sangat Tidak Dibutuhkan ■ Tidak Dibutuhkan ■ Cukup Dibutuhkan ■ Dibutuhkan ■ Sangat Dibutuhkan



8. Bagaimana penilaian Anda terhadap visualisasi infografis pada dashboard tersebut?

[More Details](#)

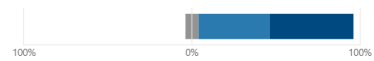
■ Tidak Menarik ■ Kurang Menarik ■ Cukup Menarik ■ Menarik ■ Sangat Menarik



9. Apakah Anda merekomendasikan media monitoring ini untuk diterapkan di seluruh lingkup bidang di Pusaka?

[More Details](#)

■ Sangat Tidak Merekomendasikan ■ Tidak Merekomendasikan ■ Cukup Merekomendasikan ■ Merekomendasikan ■ Sangat Merekomendasikan



10. Berikan saran mengenai prototype Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan AKD?

[More Details](#)

25
Responses

Latest Responses
"Sudah sangat baik"
"Tidak ada, semua sudah bagus!"
"prototype monitoringnya jadi masukan utk tim kerja komisi"

Adapun saran responden dari hasil kuesioner terhadap *prototype* Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan AKD, sebagai berikut:

1. Perlu adanya panduan penggunaan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian.
2. Diharapkan ada penjelasan pada tab *Main Dashboard* bahwa data tersebut adalah produk kajian yang diterbitkan di tahun 2024. Sisanya sudah sangat baik dan perlu diimplementasikan di komisi lainnya untuk monitoring baik untuk Analisis Legislatif dan AKD.
3. Perlu penunjukan *dashboard tracking* dalam bentuk isu yang belum terpenuhi dari yang telah di kreditkan di awal tahun dan perlu adanya integrasi dengan data Microsoft yang disediakan oleh DPR seperti akun portal dan Simfoni.
4. *Dashboard* serupa dapat dibuat menggunakan Microsoft Power BI. Mungkin lebih baik memanfaatkan aplikasi Microsoft agar penggunaan aplikasi ini dapat dioptimalkan, dibandingkan dengan menggunakan *platform* Google.
5. Perlu adanya pengembangan *dashboard* di Bidang Kesra dan Polhukam.
6. *Follow up* terkait kegunaan lanjutan tentang monitoring pengelompokan isu-isu dan produk-produk Pusaka. Pertanyaan "*What's next*" menjadi hal yang bisa dijadikan rekomendasi untuk utilisasi monitoring ini.
7. Perlu perbaikan pada penulisan judul *dashboard* produk kajian dari "Laporan Penelitian" menjadi "Laporan Penelitian".
8. Perlu dilengkapi lagi datanya, misalnya untuk *Parliamentary Review* dari Januari s.d. September sudah terbit sebanyak tiga kali.
9. Sumber data kajian analisis atas permintaan AKD perlu ditambahkan kajian yang tidak diterbitkan,

seperti laporan penguatan analisis atas permintaan AKD, laporan penguatan analisis terhadap RUU dalam daftar prolegnas, kajian atas permintaan AKD. Selain itu, juga dapat ditambahkan kajian yang diterbitkan di jurnal yang ada di Pusat Analisis Keparlemenan.

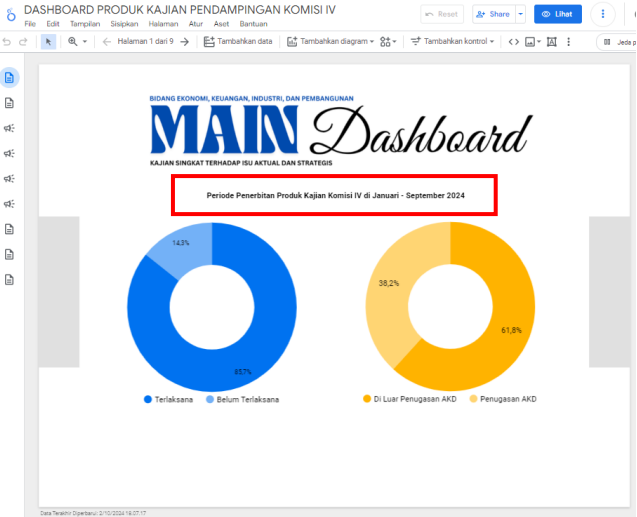
10. Sebaiknya setelah berjalan sekian waktu, perlu evaluasi dan tanggapan dari AKD/anggota DPR terkait manfaat aplikasi tersebut dalam mendukung tugas dan fungsinya.

d. Melakukan perbaikan dari hasil rapat evaluasi

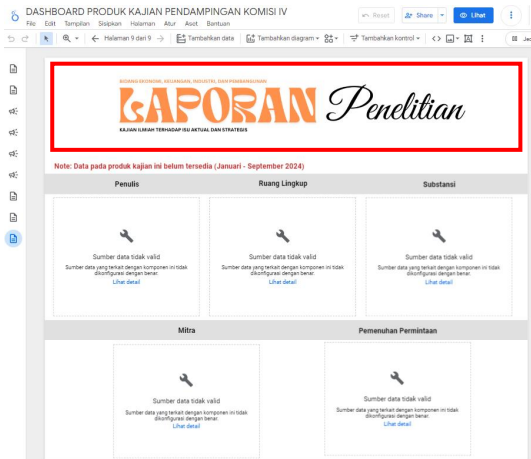
Draf Perbaikan Hasil Evaluasi

Adapun perbaikan secara teknis dari hasil evaluasi yang dapat dilakukan, antara lain:

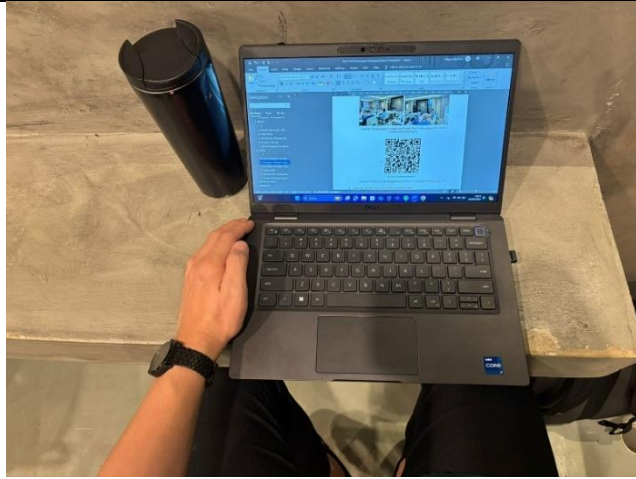
1. Penambahan penjelasan pada tab *Main Dashboard* terkait periode penerbitan produk kajian Komisi IV di Januari – September 2024.



2. Perbaikan kesalahan penulisan (*typo*) dari “Lapoan Penelitian” menjadi “Laporan Penelitian”.



e. Penyusunan laporan akhir aktualisasi



Jakarta, 2 Oktober 2024

Mengetahui,

Mentor

Coach

Handwritten signature of Emi Rahmawati in black ink, featuring a stylized 'E' and 'R' with a small heart and star above the 'i'.

Emi Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 199403222020122001

Handwritten signature of Teddy Prasetiawan in black ink, featuring a stylized 'T' and 'P' with a large loop at the end.

Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
NIP. 198003252009121001

LAMPIRAN


FORMULIR ALAT BANTU *MENTORING, COACHING, DAN* RENCANA AKSI BELA NEGARA

Lampiran 1a: Formulir Alat Bantu *Mentoring* Pelaksanaan Aktualisasi

Nama : Rahmat Sawalman
 NIP : 1997022420241001
 Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
 Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama
 Isu : Belum tersedianya sistem monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Pusaka
 Kegiatan :
 Gagasan : Monitoring Pemenuhan Analisis Substansi atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menggunakan Google Data Studio sebagai *Interactive Dashboard* Produk Kajian di Pusat Analisis Keparlemenan (Studi Kasus: Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Komisi IV)


Kegiatan 1 : *Planning* (Perencanaan)

Persiapan, perencanaan, dan koordinasi dengan mentor dan rekan kerja Komisi IV

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan	Pada tahap ini, mentor memberikan beberapa masukan yang bersifat teknis kepada <i>mentee</i> sehingga kedepannya dapat bermanfaat bagi unit kerja.	
<i>Output</i> kegiatan terhadap pemecahan isu	<i>Mentee</i> sebaiknya dapat memahami permasalahan yang terjadi di Pusaka, khususnya bidang Ekkuinbang Komisi IV.	
Keterkaitan substansi mata pelatihan	Mentor menjelaskan kepada <i>mentee</i> bahwa gagasan yang disusun sangatlah bermanfaat bagi unit kerja.	
Kontribusi terhadap visi-misi organisasi	<i>Mentee</i> perlu menelaah kembali aktualisasi agar sejalan dengan visi misi unit kerja Pusaka dan jabatan fungsional analis legislatif.	
Penguatan nilai BerAKHLAK	Perlu peningkatan nilai kolaboratif sehingga memungkinkan memahami isu secara lebih mendalam.	

Kegiatan 2 : *Organizing* (Pengorganisasian)


Penyusunan *database* dan pengembangan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian Komisi IV

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan	Pada tahap ini, <i>mentee</i> memulai penyusunan <i>database</i> dan pengembangan <i>dashboard</i> . <i>Mentee</i> perlu memastikan produk kajian terinventarisasi dengan baik.	
<i>Output</i> kegiatan terhadap pemecahan isu	Kedepannya pengembangan <i>dashboard</i> ini diharapkan dapat diterapkan tidak hanya di	

	bidang Ekkuinbang Komisi IV saja namun juga di semua bidang di Pusaka.	
Keterkaitan substansi mata pelatihan	Penerapan <i>dashboard</i> produk kajian ini dapat memudahkan monitoring pemenuhan analisis substansi atas permintaan AKD.	
Kontribusi terhadap visi-misi organisasi	Penggunaan <i>dashboard</i> bagi unit kerja akan memudahkan dalam hal monitoring pemenuhan penugasan AKD oleh Kepala Pusaka dan memudahkan Analisis Legislatif dalam <i>searching</i> isu untuk penulisan produk kajian berikutnya.	
Penguatan nilai BerAKHLAK	Penerapan nilai kolaboratif telah diimplementasikan dengan baik dengan melakukan koordinasi yang baik dengan Analisis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV.	

Kegiatan 3 : *Actuating (Aktualisasi)*


Aktualisasi penggunaan Google Data Studio sebagai *interactive dashboard* produk kajian kepada Analisis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan	Pada tahap ini, <i>mentee</i> telah melaksanakan kegiatan aktualisasi melalui diseminasi/sosialisasi dengan baik, namun tentunya masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki.	
<i>Output</i> kegiatan terhadap pemecahan isu	Diseminasi ini kedepannya akan berguna dalam pengembangan <i>dashboard</i> monitoring penugasan atas permintaan AKD dan juga memberikan pemahaman teknis khususnya kepada Analisis Legislatif di Komisi IV.	
Keterkaitan substansi mata pelatihan	Melakukan internalisasi penggunaan kepada Analisis Legislatif Bidang Ekkuinbang Komisi IV, meskipun ditemukan beberapa kendala, namun <i>mentee</i> dapat memberikan Solusi yang efektif.	
Kontribusi terhadap visi-misi organisasi	Aktualisasi ini memiliki peran yang esensial guna mendukung visi – misi organisasi.	
Penguatan nilai BerAKHLAK	Aktualisasi ini didesain dengan menerapkan nilai BerAKHLAK yaitu kolaboratif dan kompeten. Namun, perlu peningkatan nilai adaptif atas perbaikan yang diberikan.	

Kegiatan 4 : *Controlling (Pengendalian)*

Pelaporan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan	Pada tahap ini, <i>Mentee</i> diminta untuk melakukan <i>cross check</i> atas pertanyaan kuesioner yang dibuat.	

Output kegiatan terhadap pemecahan isu	Adanya evaluasi atas <i>dashboard</i> yang dikembangkan sehingga dapat mengoptimalkan monitoring yang dilakukan kedepannya.	
Keterkaitan substansi mata pelatihan	Pengembangan <i>dashboard</i> sangat terkait dengan mata pelatihan dan kedepannya diharapkan dapat memberikan manfaat jangka pendek dan jangka Panjang.	
Kontribusi terhadap visi-misi organisasi	Aktualisasi ini sangat bermanfaat untuk memudahkan pencapaian visi dan misi organisasi.	
Penguatan nilai BerAKHLAK	<i>Mentee</i> telah menerapkan nilai BerAKHLAK dengan sangat baik dalam kegiatan aktualisasi.	

Lampiran 1b: Formulir Alat Bantu *Coaching*






FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XII TAHUN 2024










Nama : Rahmat Sawalman

Nama *Coach*: Emi Rahmawati, S.H., M.H.

NIP : 199702242024041001

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

No.	Tanggal Bimbingan	Pembahasan	Media Komunikasi	Rekomendasi Bimbingan	Tanda Tangan Coach
1.	5 Agustus 2024	Pedoman penugasan Agenda IV mengenai Habituaasi dan format rancangan aktualisasi.	<i>WhatsApp</i>	Memahami panduan yang tersedia dengan menyesuaikan dengan format rancangan aktualisasi yang sudah ditentukan.	
2.	7 Agustus 2024	Identifikasi isu pada unit kerja.	<i>WhatsApp</i>	Memilih isu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.	
3.	8 Agustus 2024	Bimbingan penulisan rancangan aktualisasi mengenai matriks rancangan aktualisasi.	<i>Zoom Meeting</i>	Memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara isu di unit kerja yang dipilih dengan dengan tugas dan fungsi jabatan Analis Legislatif.	
4.	14 Agustus 2024	Pemberian arahan mengenai catatan atau masukan yang akan diberikan oleh Penguji pada saat seminar rancangan aktualisasi.	<i>WhatsApp</i>	Memberikan penjelasan mengenai indikator keterukuran dan keterujian dari rancangan aktualisasi yang sedang disusun.	
5.	19 Agustus 2024	Pemaparan rancangan bahan tayang untuk seminar rancangan aktualisasi.	<i>Zoom Meeting</i>	Menambahkan indikator keterukuran dan keterujian pada setiap kegiatan POAC (<i>Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling</i>).	





6.	23 Agustus 2024	Catatan perbaikan hasil seminar rancangan aktualisasi dari Penguji.	<i>WhatsApp</i>	Menambahkan ukuran <i>output</i> dan alat ukur keberhasilan dan evaluasi dampak implementasi solusi yang diusulkan.	
7.	30 Agustus 2024	Konsultasi Laporan Perancangan Aktualisasi	<i>WhatsApp</i>	Mengirimkan laporan mingguan secara tertib per minggunya untuk memudahkan <i>Coach</i> dalam memantau progres pengerjaan para peserta selanjutnya.	
8.	2 September 2024	Konsultasi Laporan Minggu ke-1 (Kegiatan <i>Planning</i>)	Tatap Muka	Memperhatikan jadwal kegiatan aktualisasi yang telah dibuat agar pelaksanaan habituasi berjalan optimal.	
9.	15 September 2024	Konsultasi Laporan Minggu ke-2 (Kegiatan <i>Organizing</i>)	Tatap Muka	Memperhatikan jadwal kegiatan aktualisasi yang telah dibuat agar pelaksanaan habituasi berjalan optimal.	
10.	25 September 2024	Konsultasi Laporan Minggu ke-3 (Kegiatan <i>Actuating</i>)	<i>WhatsApp</i>	Memperhatikan jadwal kegiatan aktualisasi yang telah dibuat agar pelaksanaan habituasi berjalan optimal.	
11.	30 September 2024	Format penulisan laporan akhir aktualisasi.	<i>WhatsApp</i>	Memberikan panduan penulisan laporan akhir aktualisasi, termasuk mengenai hal-hal yang perlu dimasukkan pada laporan akhir.	
12.	2 Oktober 2024	Konsultasi Laporan Minggu ke-3 (Kegiatan <i>Controlling</i>)	<i>WhatsApp</i>	Memaksimalkan pengerjaan laporan akhir agar dapat diselesaikan tepat waktu.	
13.	3 Oktober 2024	Format penyusunan bahan tayang untuk sidang pelaksanaan aktualisasi	<i>WhatsApp</i>	Memberikan informasi mengenai materi paparan yang perlu disampaikan, termasuk testimoni <i>stakeholder</i> dan pimpinan.	
14.	4 Oktober 2024	Konsultasi laporan akhir aktualisasi dan rancangan bahan tayang untuk sidang akhir aktualisasi.	Tatap Muka	Melakukan perbaikan rancangan laporan dan bahan tayang sesuai dengan saran dan masukan <i>Coach</i> .	





Lampiran 1c: Formulir Alat Bantu Pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara

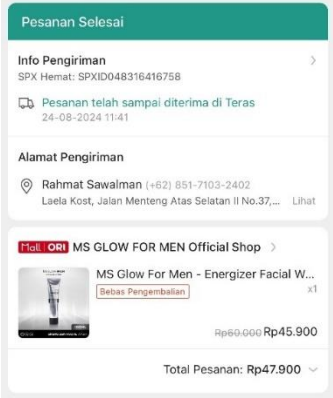



LAPORAN PELAKSANAAN AKSI BELA NEGARA PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2024



Angkatan : XII
 Nama : Rahmat Sawalman
 Nomor Daftar Hadir : 7
 Instansi/Unit Kerja : Setjen DPR RI / Pusat Analisis Keparlemenan
 Nama Mentor : Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
 Jabatan Mentor : Analisis Legislatif Ahli Madya
 Nilai Mentor : 95







No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
1	Cinta Tanah Air	Mencintai dan melestarikan lingkungan hidup	Reuse botol bekas menjadi vas tanaman air	Rumah	Satu bulan sekali		
			Membuang sampah pada tempatnya	Dimanapun	Satu minggu sekali		

No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
		Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa	Mengunjungi <i>food festival</i> produk UMKM	Kantor	Satu kali dalam sebulan		
			Mengunjungi pameran atau galeri seni karya anak bangsa	Pameran / Galeri	Satu kali dalam sebulan		




No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
							
		Menggunakan produk dalam negeri	Menggunakan sepatu produk lokal	Kantor	Satu minggu sekali	 	

No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			Membeli sabun cuci muka produk lokal	Kantor	Sekali sebulan		
2	Sadar Berbangsa dan Bernegara	Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan	Datang ke kantor tepat waktu	Kantor	Setiap hari kerja		



No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			Mengerjakan isu sepekan tepat waktu	Kantor	Sekali dalam sebulan	 <p>Isu dan Permasalahan</p> <p>Nelayan, termasuk juga pembudidaya dan petambak, merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya Indonesia untuk membangun ekonomi biru. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah nelayan di Indonesia tahun 2023 mencapai lebih dari 2 juta orang, dan 85% adalah nelayan kecil. Hingga saat ini, upaya pelindungan kesejahteraan nelayan masih menghadapi tantangan dan berbagai aspek, di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, akses pasar, pemadatan, dan kurangnya kapasitas sumber daya.</p> <p>Selain faktor tersebut, kebijakan Pemerintah di sektor kelautan dan perikanan juga memengaruhi kesejahteraan nelayan. Salah satu contohnya adalah tuduhan <i>on-dumping</i> (OD) yang baru-baru ini dilayangkan kepada Indonesia oleh American Shrimp Processors Association (ASPA), yaitu ASPA yang diajukan ke U.S. Department of Commerce (DOC) pada 25 Oktober 2023 menuduh Indonesia melanggar aturan AD dan <i>countervailing duties</i> (CVD) terkait impor udang. Damping terjadi ketika ekspor menjadi produknya di luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar domestik. Tindakan ini biasanya dikaji oleh negara importir dengan mengenakan tarif <i>on-dumping</i>. Dalam kasus ini, penerapan tarif tersebut telah menyebabkan penurunan ekspor udang, yang berdampak besar pada mata pencaharian sekitar 46.500 petambak dan ratusan ribu pekerja yang terlibat dalam rantai pasokan udang. Dampak dari penerapan tarif ini sangat luas. Bagi petambak kecil, penurunan permintaan internasional menyebabkan kelebihan produksi di pasar lokal dan turunya harga udang. Petambak yang tidak memiliki diversifikasi pasar atau akses ke pasar internasional sangat rentan, karena mereka kesulitan menjual hasil panen mereka. Penurunan volume ekspor ini juga mempengaruhi kondisi ekonomi yang sudah rentan, sehingga menambah tantangan di sektor ini.</p> <p>Kebijakan Pemerintah lainnya yang menjadi perhatian para nelayan adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang akan diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan ini membagi wilayah perairan Indonesia menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dari jumlah tersebut, hanya tiga zona yang diperuntukkan bagi nelayan tradisional, sementara zona lainnya dialokasikan untuk investor domestik dan asing serta zona <i>governing and nursery ground</i>. Akses yang makin terbatas ini berpotensi mengurangi jumlah tangkapan ikan nelayan kecil. Kondisi ini diperparah dengan adanya dampak luas perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola migrasi ikan. Akibatnya, nelayan kecil terus kehilangan ikan, bahkan ke luar zona yang ditunjuk untuk mendapatkan ikan. Namun, dengan ukuran kapal yang biasanya di bawah 10 gross ton (GT), nelayan kecil menghadapi keterbatasan jarak tempuh, membuat mereka sulit bersaing dengan kapal-kapal besar. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelabuhan juga menjadi kendala, karena nelayan kesulitan mendaratkan hasil tangkapannya. Pasar yang tersedia juga masih terbatas, sehingga sulit bagi nelayan kecil untuk segera menjual ikan mereka. Tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai, nelayan berisiko kehilangan hasil tangkapan mereka yang pada akhirnya mengurangi pendapatan.</p> <p>Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama yang terkoordinasi guna melindungi kesejahteraan nelayan kecil. Pertama, pemerintah harus fokus pada peningkatan infrastruktur, dengan menyesuaikan dukungan sesuai kebutuhan nelayan di berbagai wilayah. Bantuan kapal perlu memertahakan karakteristik masing-masing wilayah untuk memastikan kapal dapat digunakan secara efektif oleh nelayan. Kedua, pemerintah perlu membuka akses pasar bagi nelayan kecil, memastikan hasil tangkapan mereka cepat terserap karena umumnya kapal nelayan kecil tidak memiliki sarana penyimpanan hasil tangkapan untuk jangka waktu lama. Pemerintah harus memastikan pelabuhan-pelabuhan dapat menyerap dan memelihara hasil tangkapan mereka. Ketiga, penguatan kapasitas dan pemberdayaan terhadap nelayan harus menjadi prioritas. Perhatian khusus perlu diberikan pada pemberdayaan perempuan dan pemuda. Penguatan kelembagaan nelayan juga penting agar mereka dapat bersaing di tingkat nasional maupun global. Keempat, pemerintah perlu mendorong asuransi bagi nelayan, yang saat ini masih kurang memadai dibandingkan asuransi pertanian, meskipun risiko yang dihadapi nelayan sangat tinggi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa nelayan kecil dapat mengakses fasilitas asuransi tersebut, memberikan keamanan yang sangat dibutuhkan bagi mata pencaharian mereka.</p> <p>Sumber</p> <p>cnbcindonesia.com, 2 September 2024. induziri.kontan.co.id, 3 September 2024. kompas.id, 6 Juni, 2 September 2024. ipusan.com, 3 September 2024 dan vananews.com, 2 September 2024.</p>	

No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
		Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Membawa surat-surat kendaraan pada saat berkendara	Jalan Raya	Setiap berkendara		
			Menaati aturan perpustakaan saat berkunjung	Perpustakaan	Satu kali dalam sebulan		
3	Setia kepada Pancasila Sebagai Ideologi Negara	Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar	Menjadi imam shalat berjamaah	Musholla	Setiap waktu Duhur dan Ashar		



No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			Menonton kajian Islami	Online	Satu kali dalam seminggu		
		Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Mempelajari lagu daerah suku lain	Rumah	Satu sekali sebulan		
			Mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia	Kantor	17 Agustus 2024		


No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
							
4	Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara	Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya	Membantu teman dalam pengerjaan tugas	Dimana saja	Dua kali dalam sebulan		


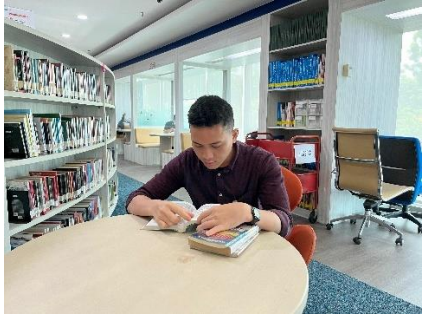

No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			Membeli jualan pedagang lansia	Pedestrian	Dua kali dalam sebulan		
		Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara	Menyusun ringkasan isu aktual mengenai bidang Ekkuinbang	Kantor	Satu minggu sekali	 <p data-bbox="1541 663 1653 687">Pusat Analisa Kepariwisata Badan Keahlian Setan DPR RI</p> <p data-bbox="1603 703 1816 727">TRANSFORMASI TATA KELOLA LOBSTER MELALUI PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO) 724</p> <p data-bbox="1671 735 1816 783">Rahmat Sawalman Bidang Ekkuinbang, Komisi IV DPR RI CPNS Analis Legislatif ANH Pertanian</p> <p data-bbox="1496 791 1592 807">Isu dan Pemmasalahan.</p> <p data-bbox="1496 807 1816 983">Benih Bering Lobster (BBL) menjadi komoditas bernilai ekonomis penting bagi Indonesia untuk di ekspor ke berbagai negara. Namun demikian, ancaman penyakit perkolerasis benih lobster ke laut negeri hingga saat ini masih menjadi ancaman. Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu, Tim gabungan TNI Angkatan Laut (AL) Cilacap dan Tim Esplorasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap pada 12 Juni 2024 menanggapi upaya perkolerasian 16 ribu benih lobster dengan biaya 2.400 ekor jenis Mutiara dan 13.600 ekor jenis Asasi yang dikemas di dalam 16 box, serta petugas berhasil mengamankan satu orang pelaku pembawa benih. Estansi kerupuk negara diperkirakan mencapai Rp 1,6 miliar. Dalam skala nasional, KKP melapaskan bahwa kerupuk negara mencapai 100.000 rumah dengan 500.000 ton. Benih BBL yang keluar dari Indonesia secara ilegal mencapai 500 juta ekor setiap tahun.</p> <p data-bbox="1496 991 1816 1174">Pemaksimalan perkolerasian BBL tentunya menjadi atensi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Scylla</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Etisopus</i> spp.). Sebagai tindak lanjut atas peraturan tersebut, KKP kemudian membentuk Project Management Office (PMO) 724 yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan transformasi tata kelola lobster di Indonesia yang mencakup penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga pemasaran pemaksimalan BBL. Lebih lanjut, PMO 724 ini akan berfokus pada beberapa aspek diantaranya pelaksanaan langkah operasional pemangsaan, kebijakan pengelolaan lobster, koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi kebijakan, dan program yang mendukung tata kelola lobster berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi aktivitas penangkapan BBL dan budidaya lobster serta prosedur, dan komunikasi kepada stakeholder tentang pentingnya menjaga keberlanjutan budidaya lobster.</p>	

No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
						<p>Pembentukan PMO 724 merupakan taban awal yang kehadirannya akan dilaksanakan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan semua Kementerian/lembaga terkait dan aparat, personel, buksa yang dibekali dengan Eselukan Eselukan lainnya. Adapun mewa dari satuan tersebut transformasi tata kelola lobster melalui pembentukan PMO 724 ini adalah untuk memajukan posisi Indonesia dalam global supply chain lobster, dan pambudidaya lobster semakin berkembang, sehingga sumber daya BBL ini membawa manfaat bagi masyarakat, serta meminimalisir eratkan penyelundupan BBL ke luar negeri.</p> <p>Atensi DPR</p> <p>Eselalahan penyelundupan BBL yang terus menerus meningkat menimbulkan kerugian negara yang sangat fantastis. Eselabuhan Project Management Office (PMO) 724 sebagai tindak lanjut atas Eselapan KP No. 7 Tahun 2024 diharapkan mampu menekan eratkan ilegal yang terjadi dan mendukung tata kelola lobster yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas eselaborasi, Komisi IV DPR RI perlu mendukung PMO 724 dan memajukan eselaborasi dari KKP memajukan eselaborasi memajukan program ini dapat berjalan secara optimal. Eselaborasi memajukan eselaborasi memajukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang bereskan dalam melakukan eselaborasi buksa atas eratkan penyelundupan lobster. Selain itu, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk Eselukan Eselukan yang dapat memperkuat eselaborasi Kementerian/lembaga terkait dan aparat, personel, buksa dalam PMO 724.</p> <p>Sumber: CNBC Indonesia, 11 Juni 2024; detik.com, 13 Juni 2024; kompas.com, 14 Juni 2024, dan knp.go.id, 15 Mei 2024</p>	
			Bergabung pada komunitas yang bergerak pada bidang sosial	Panti Asuhan	Satu bulan sekali		

No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
5	Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara	Senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental	Melakukan kegiatan olahraga <i>jogging</i> dan tenis lapangan untuk menjaga kebugaran tubuh.	Ring Road GBK dan Kantor	Satu kali dalam seminggu		

No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
							
			Mendengarkan <i>podcast</i> tentang kesehatan mental	Rumah	Sekali dalam seminggu		

No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
						 	

No.	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
							
		Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelegsensi yang tinggi	Membaca buku <i>self-improvement</i>	Perpustakaan	Satu kali dalam sebulan		
			Membaca Surah Al-Kahfi	Rumah	Setiap malam Jum'ats	